



# Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020

**Direktorat Rencana Penggunaan dan  
Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan**  
Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan  
Kementerian LHK RI

Jakarta, Januari 2021

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diperbarui dalam Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Kegiatan Pembangunan pada tahun 2020 didasarkan pada program/kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 2020-2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 ini diharapkan mampu memberi informasi tentang pelaksanaan pembangunan dan kinerja yang telah dicapai Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam seluruh kegiatan Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, kami ucapkan terimakasih.

Jakarta, 13 Januari 2021

Direktur,



Ir. Roosli Tandrakirana, M.SE  
NIP.19650416 1991032001

MABRI KOORDINASI			
No	PELOPOR	CARA	TANGGAL
1	...		
2	...		
3	...		
4	...		
5	...		
6	...		
7	...		
8	...		
9	...		
10	...		
11	...		
12	...		
13	...		
14	...		
15	...		
16	...		
17	...		
18	...		
19	...		
20	...		
21	...		
22	...		
23	...		
24	...		
25	...		
26	...		
27	...		
28	...		
29	...		
30	...		
31	...		
32	...		
33	...		
34	...		
35	...		
36	...		
37	...		
38	...		
39	...		
40	...		
41	...		
42	...		
43	...		
44	...		
45	...		
46	...		
47	...		
48	...		
49	...		
50	...		
51	...		
52	...		
53	...		
54	...		
55	...		
56	...		
57	...		
58	...		
59	...		
60	...		
61	...		
62	...		
63	...		
64	...		
65	...		
66	...		
67	...		
68	...		
69	...		
70	...		
71	...		
72	...		
73	...		
74	...		
75	...		
76	...		
77	...		
78	...		
79	...		
80	...		
81	...		
82	...		
83	...		
84	...		
85	...		
86	...		
87	...		
88	...		
89	...		
90	...		
91	...		
92	...		
93	...		
94	...		
95	...		
96	...		
97	...		
98	...		
99	...		
100	...		

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diperbarui dalam Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).


Kegiatan Pembangunan pada tahun 2020 didasarkan pada program/kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 2020-2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 ini diharapkan mampu memberi informasi tentang pelaksanaan pembangunan dan kinerja yang telah dicapai Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam seluruh kegiatan Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, kami ucapkan terimakasih.

Jakarta, 13 Januari 2021

Direktur,



Ir. Roosy Tjandrakirana, M.SE  
NIP.19650416 1991032001

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
DAFTAR LAMPIRAN .....	v
I. PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI .....	2
C. SUMBER DAYA MANUSIA .....	3
D. PERMASALAHAN YANG SEDANG DIHADAPI .....	5
II. PERENCANAAN KINERJA .....	7
A. RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024 .....	8
B. RENCANA KERJA TAHUN 2020.....	11
C. PERJANJIAN KINERJA .....	13
D. REVIEW ATAS DOKUMEN PERENCANAAN.....	15
III. AKUNTABILITAS KINERJA .....	16
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	16
1. Metode Pengukuran .....	16
2. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja .....	17
B. REALISASI ANGGARAN .....	74
IV. PENINGKATAN AKUNTABILITAS INSTANSI .....	77
V. PENUTUP.....	79
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel :	Halaman
1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan s.d. 31 Desember 2020.....	4
2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin s.d 31 Desember 2020.....	4
3 Renstra Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2020.....	8
4 Rencana Kerja Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2020.....	11
5 Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Rencana Makro Kehutanan.....	13
6 Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Rencana Kawasan Hutan.....	14
7 Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan.....	14
8 Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Pembentukan Wilayah dan Alokasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan.....	14
9 Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Informasi Spasial dan Dokumentasi.....	14
10 Capaian IKK Tahun 2019.....	17
11 Efektifitas Capaian Kinerja Tahun 2020.....	19
12 Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2020.....	20
13 Progres Capaian Kinerja Tahun 2019 Terhadap Target Renstra.....	22
14 Data Permohonan dan Pelayanan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan...	26
15 Data Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Pembayaran PNBPKH	29
16 Penyusunan / Update peta penetapan dan kelembagaan KPH.....	33
17 Pelaksanaan Kegiatan Analisis Kelayakan Perencanaan Ruang Kawasan	35
18 Fasilitasi Penataan Ruang Kawasan Hutan dalam Rangka Reviu RTRWP	39
19 Monitoring Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Rencana Kegiatan	65
20 Data hasil pelaksanaan kegiatan Perhutanan Sosial.....	76
21 Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran TA 2020 .....	77

## DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
1 sd 2	Dokumentasi Kegiatan Monitoring Pembayaran PNPB PKH di Provinsi Sumatera Selatan dan Sulawesi Utara	30
3	Dokumentasi Kegiatan Analisis Kelayakan Perencanaan Ruang Kawasan Hutan	36
4	Dokumentasi kegiatan Fasilitasi Penataan Ruang Kawasan Hutan Mendukung KPH	40
5	Tempilan Depan Web Sinpasdok KPH+	44
6	Dokumentasi Rapat Pembahasan Pengintegrasian Rencana Pengelolaan KPH dengan RKTP dan RKTN di Propinsi Sumatera Selatan	51
7	Dokumentasi Kegiatan Fasilitasi Penyusunan RKTP di Propinsi Sumatera Utara	54
8	Dokumentasi Kegiatan Rapat Pembahasan Pemantauan Rencana Kehutanan Pusat	59
9	Dokumentasi Rapat Konsultasi Publik Penyusunan RM-RHLDAS	61
10	Dokumentasi Pembahasan Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Propinsi Jawa Tengah, Bengkulu dan NTT	65
11	Dokumentasi kegiatan Penyusunan Data Areal Perhuanan Sosial Wilayah Jawa	76

## **DAFTAR LAMPIRAN**

### **Lampiran**

1. Data Penyusunan dan Update Peta Arah Pemanfaatan Hutan pda 34 Provinsi Tahun 2020
2. Matriks Rencana Kerja Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan TA 2020
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 ( Direktur Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan dengan Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan )
4. Rekapitulasi Database Permohonan IPPKH

# I . PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi agar penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan itu, dalam rangka penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme diterbitkan Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diperbarui dalam Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan Publik, maka disusunlah laporan pertanggungjawaban ini yang merupakan penyesuaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peraturan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2020 merupakan pertanggungjawaban akuntabilitas publik secara administrasi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat yang telah ditetapkan selama kurun waktu satu tahun.



Tujuan penyusunan LKjIP ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Adapun realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini adalah realisasi dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disusun pada awal tahun dan dituangkan dalam Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Tahun 2020.

## **B. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI**

Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan sebagai salah satu unit kerja Eselon II adalah sebagai unsur penunjang pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di bidang Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tanggal 14 April 2015 Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2019 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di bidang rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan.

Dalam melaksanakan tugas Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, satker juga melaksanakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan perumusan kebijakan rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan,

pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan;

3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan;
5. Supervisi atas pelaksanaan urusan rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

### **C. SUMBER DAYA MANUSIA**

Berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.4079/MenLHK-Setjen/Peg/2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang Penataan dan Penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sampai dengan akhir bulan Desember 2019 jumlah Pegawai pada Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan berjumlah 81 orang PNS (2 orang diperbantukan di Lembaga *Forest Investment Program*). Selain itu juga terdapat 14 orang Tenaga Kontrak.

Adapun jumlah pegawai berdasarkan golongan, pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 1 dan 2 di bawah ini.

Tabel 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan s.d. 31 Desember 2020

No	Unit Kerja	Golongan					Jumlah
		IV	III	II	I	Tenaga Kontrak	
1.	Direktur Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	1	-	-	-	-	1
2.	Sub Direktorat Rencana Makro Kehutanan	3	9		-	1	13
3.	Sub Direktorat Rencana Kawasan Hutan	3	5			1	9
4.	Sub Direktorat Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	1	17			1	19
5.	Sub Direktorat Pembentukan Wilayah dan Alokasi Pemanfaatan SDH	4	9			3	16
6.	Sub Direktorat Informasi Spasial dan Dokumentasi	1	20	1		0	22
7.	Sub Bagian Tata Usaha	0	5			8	13
<b>Total</b>		<b>13</b>	<b>65</b>	<b>1</b>		<b>14</b>	<b>93</b>

Tabel 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin s.d 31 Desember 2020

No	Unit Kerja	Pendidikan					Jml	Jenis Kelamin	
		S3	S2	S1	D3	SMU		L	P
1.	Direktur Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan		1				1		1
2.	Sub Direktorat Rencana Makro Kehutanan	1	3	6	2	0	11	4	7
3.	Sub Direktorat Rencana Kawasan Hutan		4	4	1	0	9	8	1
4.	Sub Direktorat Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	0	6	8	1	2	17	11	6
5.	Sub Direktorat Pembentukan Wilayah dan Alokasi Pemanfaatan SDH	0	6	7	1	0	14	7	7
6.	Sub Direktorat Informasi Spasial dan Dokumentasi	0	4	17	1	0	22	8	14
7.	Sub Bagian Tata Usaha	0	0	4	0	1	5	1	4
<b>Total</b>		<b>1</b>	<b>24</b>	<b>46</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>79</b>	<b>38</b>	<b>41</b>

Ket : Jumlah Pegawai Tanpa Tenaga Kontrak

#### D. PERMASALAHAN YANG SEDANG DIHADAPI

Tupoksi Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan menjadikannya sebagai lokomotif untuk mencapai tujuan dari Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Tujuan yang besar tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia, keuangan, serta sarana dan prasarana yang memadai. Adapun potensi dan permasalahan yang dapat menggambarkan kondisi Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan saat ini dijelaskan pada kolom di bawah ini:

<b>Kekuatan :</b>	<b>Kelemahan :</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Koordinasi antar subdit yang memadai</li><li>- Tersedianya dokumen RKTN</li><li>- Tersedianya sistem informasi untuk mendorong pemegang izin melaporkan kegiatan dan pemenuhan kewajiban yang telah dilaksanakan secara online</li><li>- Tersedianya Perdirjen PKTL tentang penyelenggaraan Sinpasdok KPH</li><li>- Penyelenggaraan Sinpasdok KPH dengan berbagi peran, tersebar di tingkat tapak dan terkendali di pusat</li><li>- Tersedia anggaran yang berasal dari sebagian dana PNBK-PKH</li><li>- Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur pembangunan KPH</li><li>- Kualitas SDM yang cukup memadai (S-3 2 orang, S-2 24 orang dan S-1 46 orang)</li><li>- Dukungan regulasi yang memadai</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Terbatasnya SDM baik dari jumlah maupun keahlian</li><li>- Kurang tersedianya ruangan yang nyaman untuk bekerja, salah satunya adalah buruknya kondisi AC sentral KLHK di ruangan yang mengganggu kesehatan pegawai)</li><li>- Tumpang tindih peraturan di bidang kehutanan</li><li>- Belum ada penyesuaian aturan penatausahaan PNBK-PKH dengan adanya beberapa perubahan peraturan perundangan yang baru</li><li>- Berbagai perubahan kebijakan di daerah yang tidak sinkron dengan kebijakan di pusat</li><li>- Belum tersedianya SOP Fasilitasi Penataan Ruang Kehutanan dalam rangka review RTRWP</li><li>- Kondisi negara yang sedang terjadi "pandemi covid-19" sehingga ada WFH</li><li>- Arus pertukaran data untuk sistem informasi yg menjadi kewenangan Direktorat RPP terhambat akibat kurangnya kegiatan dan fasilitas untuk sosialisasi dan Bimtek</li></ul>

Peluang :	Tantangan/Ancaman :
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isu mengenai agraria pada kawasan hutan</li> <li>- Terjalannya koordinasi lintas sektor dengan kementerian/lembaga (K/L) sehingga memudahkan informasi</li> <li>- Peran kelembagaan Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan sangat strategis</li> <li>- Terjalannya koordinasi yang sinergi dan harmonis dengan seluruh Pemerintah Provinsi di Indonesia</li> <li>- Sinpasdok KPH dijadikan Acuan data nasional KPH untuk perencanaan pembangunan KPH oleh Bappenas dan Birocan KLHK</li> <li>- Adanya kebutuhan wadah komunikasi data, informasi dan berbagi pengalaman sebagai pembelajaran dalam pengelolaan KPH</li> <li>- Duplikasi data KPH antar eselon 1</li> <li>- Terdapat dana PNBK –PKH yang belum pernah digunakan</li> <li>- Ketersediaan geodatabase IPPKH yang komprehensif</li> <li>- akan diintegrasikannya SI PNBK PKH dengan Simponi yg dikelola oleh kemenkeu.</li> <li>- KPH masih menjadi isu penting untuk pembangunan salahsatu sektor Kehutanan di daerah</li> <li>- Lahirnya UUCK mendorong perubahan strategi fasilitasi penataan ruang kehutanan terkait penetapan DPCLS dalam rangka review RTRWP Lahirnya beberapa RPP terkait bidang Kehutanan untuk memperbaiki kinerja organisasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Klaim lahan oleh masyarakat Pemda atas lahan di dalam Kawasan Hutan secara Non Prosedural</li> <li>- Maraknya yudisial review atas peraturan di Bidang Kehutanan</li> <li>- Perbedaan persepsi antara instansi pemerintah mengenai kawasan hutan</li> <li>- Tidak ada penghargaan bagi walidata Sinpasdok KPH yang berprestasi</li> <li>- Resistensi dari unit kerja lain yang membangun sistem informasi KPH</li> <li>- Pemahaman unit kerja dapat bersinergi membangun sistem informasi KPH yang komprehensif dan berkualitas menjawab kebutuhan pengguna</li> <li>- Ada beberapa wajib bayar PNBK-PKH tidak melaksanakan kewajiban pembayaran PNBK-PKH belum diproses tindak lanjut pengakhiran IPPKH-nya</li> <li>- Berdasarkan UU No. 9 tahun 2018 tentang PNBK ada tugas baru KLHK ( PKTL,RPP, Subdit Infodok) terkait pemberian rekomendasi penundaan dan pengangsuran pembayaran PNBK-PKH yang dimohon oleh wajib bayar yang mana sebelumnya merupakan kewenangan Kemenkeu</li> <li>- KSP untuk IPPKH, terdapat beberapan dokumen tatabatas yang belum dapat ditemukan dan masih terdapat tatabatas yang menggunakan koordinat lokal yang sulit untuk dilacak.</li> <li>- Berbagai perubahan kebijakan di</li> </ul>

<b>Peluang :</b>	<b>Tantangan/Ancaman :</b>
	<p>daerah yang tidak sinkron</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pejabat kehutanan di daerah dijabat oleh bukan rimbawan dengan kebijakan di pusat</li> <li>- Penganggaran timbu dalam rangka penelitian terpadu perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan masih terkendala</li> </ul>

## **II . PERENCANAAN KINERJA**

### **A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

Sesuai Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024, tujuan utama pembangunan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 2020-2024 adalah Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat" dalam mendukung: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong", dengan rumusan tujuan sebagai berikut :

1. Menetapkan seluruh kawasan hutan yang diakui secara legal dan aktual, menyediakan data dan informasi sumber daya hutan serta mewujudkan perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan dalam mendukung peningkatan kualitas kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
2. Meningkatkan upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan dalam mendukung meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
3. Mengendalikan Penggunaan Kawasan Hutan dalam mendukung peningkatan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
4. Melaksanakan penyelesaian kebijakan reforma agraria dalam mendukung peningkatan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan;
5. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Untuk mendukung sasaran program planologi kehutanan dan tata lingkungan, maka dijabarkan lebih lanjut kedalam beberapa kegiatan, yang mana salah satu kegiatannya merupakan kegiatan yang diharapkan dapat dicapai oleh Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, dengan sasaran sebagai berikut :

1. Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan, dengan indikator: Seluruh pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Tersedianya perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan, dengan indikator: Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Adapun indikator kinerja Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan yang dituang dalam Renstra Direktorat Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 3.

*Tabel 3. Renstra Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2020-2024*

Sasaran Kegiatan	Indikator	Unit Kegiatan	Unit Indikator	Target Kumulatif				
				2020	2021	2022	2023	2024
Terlayannya Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Tersedianya Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan	Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan	Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan	Penelaahan dan Pemantauan Penggunaan Kawasan Hutan	300 pemohon	300 pemohon	300 pemohon	300 pemohon	300 pemohon
			Pemantauan Pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
Tersedianya Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH	Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP	Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP	Penyusunan/Update peta penetapan dan kelembagaan KPH	530 Peta Update	530 Peta Update	530 Peta Update	530 Peta Update	530 Peta Update



Sasaran Kegiatan	Indikator	Unit Kegiatan	Unit Indikator	Target Kumulatif				
				2020	2021	2022	2023	2024
Tersedianya Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan yang telah mengakomodir RKTN 2011-2030	Telaahan Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan Yang Telah Mengakomodir RKTN 2011-2030	Telaahan Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan Yang Telah Mengakomodir RKTN 2011-2030	Analisis Kelayakan Perencanaan Ruang Kawasan Hutan	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok
			Fasilitasi Penataan Ruang Kawasan Hutan Dalam Rangka Review RTRWP	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok
			Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem
			Penyusunan/up date peta indikatif dan areal Perhutanan Sosial mendukung KPH	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
			Pengendalian Perencanaan Makro Kawasan Hutan Dalam Mendukung Pembangunan KPH	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
			Penyusunan Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok

Sasaran Kegiatan	Indikator	Unit Kegiatan	Unit Indikator	Target Kumulatif				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
Tersedianya perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan	Seluruh perencanaan kehutanan yang terintegrasi utuh dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Tersedianya Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH	Forest Investment Program Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1Laporan	1Laporan
Tersedianya perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan	Seluruh perencanaan kehutanan yang terintegrasi utuh dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Tersedianya Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa	Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok

## B. RENCANA KERJA (RENJA)

Rencana Kerja Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2020 merupakan rencana kerja tahun Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan yang merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2020-2024. Adapun Rencana Kerja kegiatan Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2020 ditampilkan pada table di bawah ini :

Tabel 4. Rencana Kerja Tahun 2020

No.	Sasaran Kegiatan	Output Kegiatan	IOK	Target (Volume)
1.	Tersedianya Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH	Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP	Penyusunan Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP	530 Peta
		Forest Investment Program Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project	Forest Investment Program-Project 2 (FIP)	1 Laporan
2.	Pembentukan Unit KPH serta penataan ruang wilayah 34 Provinsi	Telaahan Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan Yang Telah Mengakomodir RKTN 2011-2030	Analisis Kelayakan Perencanaan Ruang Kawasan Hutan	2 Dokumen
			Fasilitasi Penataan Ruang kawasan hutan dalam rangka review RTRWP	3 Dokumen
			Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi, Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	1 Sistem
			Penyusunan/update peta arahan pemanfaatan hutan mendukung KPH	1 Dokumen
			Pengendalian Perencanaan Makro Kawasan Hutan Mendukung KPH	1 Dokumen
			Penyusunan Rencana Makro penyelenggaraan Kehutanan	1 Dokumen
			Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi	1 Dokumen
3.	Terlayannya permohonan penggunaan kawasan hutan khususnya dalam rangka ketahanan energi	Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan	Penelaahan dan Pemantauan Penggunaan Kawasan hutan	300 Pemohon
			Pemantauan Pembayaran PNBK Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%	1 Dok

No.	Sasaran Kegiatan	Output Kegiatan	IOK	Target (Volume)
	Tersedianya Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa	Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa	Penyusunan Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa	1 Dok

Selanjutnya kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan berdasarkan sasaran kegiatan tersebut secara rinci tertuang dalam matriks Rencana Kerja Tahun 2020 pada **Lampiran 1**.

### C. PERJANJIAN KINERJA

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2020, masing-masing Sub Direktorat menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

*Tabel 5. Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Rencana Makro Kehutanan*

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)
Pembentukan Unit KPH serta penataan ruang wilayah 34 Provinsi	Pengendalian Perencanaan Makro Kawasan Hutan Mendukung KPH	1 Dokumen
	Penyusunan Rencana Makro penyelenggaraan Kehutanan	1 Dokumen
	Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi	1 Dokumen

*Tabel 6. Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Rencana Kawasan Hutan*

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)
Pembentukan Unit KPH serta penataan ruang wilayah 34 Provinsi	Analisis Kelayakan Perencanaan Ruang Kawasan Hutan	2 Dokumen
	Fasilitasi Penataan Ruang kawasan hutan dalam rangka review RTRWP	3 Dokumen
Tersedianya Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa	Penyusunan Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa	1 Dokumen

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas lingkup Direktorat Teknis	Dukungan Manajemen Direktorat RPPWPH	1 Kegiatan
Layanan Perkantoran Satker Pusat	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 Layanan ( 12 bulan )

*Tabel 7. Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan*

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)
Terlayannya permohonan penggunaan kawasan hutan khususnya dalam rangka ketahanan energi	Penelaahan dan Pemantauan Penggunaan Kawasan hutan	300 Pemohon

*Tabel 8. Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Pembentukan Wilayah dan Alokasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan*

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)
Tersedianya Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH	Penyusunan Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP	530 Peta
	Forest Investment Program-Project 2 (FIP)	1 Laporan
Pembentukan Unit KPH serta penataan ruang wilayah 34 Provinsi	Penyusunan/update peta arahan pemanfaatan hutan mendukung KPH	1 Dok

*Tabel 9. Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Informasi Spasial dan Dokumentasi*

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)
Terlayannya permohonan penggunaan kawasan hutan khususnya dalam rangka ketahanan energi	Pemantauan Pembayaran PNBK Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%	1 Laporan
Pembentukan Unit KPH serta penataan ruang wilayah 34 Provinsi	Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi, Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	1 Sistem

#### **D. REVIEW ATAS DOKUMEN PERENCANAAN**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Rencana, penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan mengacu pada beberapa dokumen perencanaan berupa Renstra Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024, dan Renja Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020, Renstra Tahun 2020-2024 dan Renja Tahun 2020, Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan dokumen lainnya. Terdapat revisi dokumen perjanjian kinerja yang disebabkan adanya pergantian atau mutasi pejabat (pada level Sub Direktorat Eselon III dan IV). Selibuhnya tidak ada perubahan yang mendasar pada dokumen-dokumen ini sehingga kegiatan tetap berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Dokumen perencanaan yang menjadi dasar kegiatan yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pusat Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020 telah disetujui pada tanggal 12 Nopember 2020, dengan total anggaran DIPA Revisi 4 ( tanggal 4 Desember 2020 ) sebesar Rp. 26.732.599.000,- yang terdiri dari sumber dana APBN sebesar Rp.6.632.599.000,- dan dana Hibah Luar Negeri (HLN) sebesar Rp. 20.100.000.000,-. Dana HLN ini merupakan hibah dari *Forest Investment Program (FIP) Proyek II "Promoting Sustainable Community Based Natural Resources Management and Institutional Development Project"* yaitu kerjasama antara Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dengan *World Bank* dengan jangka waktu 5 tahun (2016 - 2021). Tujuan proyek persiapan ini adalah mendukung penurunan emisi gas rumah kaca dan meningkatkan stok karbon serta memberikan manfaat lanjutan untuk peningkatan mata pencaharian masyarakat sekitar hutan pada tingkat tapak (KPH).

### **III. AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

##### **1. Metode Pengukuran**

###### **a. Pengukuran Kinerja Sasaran**

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi organisasi. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode sederhana, yaitu menentukan persentase capaian kinerja, tingkat efektivitas dan tingkat efisiensi capaian kinerja. Pengukuran capaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian pelaksanaan target yang telah ditetapkan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran efektivitas capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja tahun yang bersangkutan (Ybs) suatu output dengan persentase capaian kinerja pelaksanaan tahun sebelumnya dengan menggunakan rumus:

$$\text{Efektifitas Capaian Kinerja} = \frac{\% \text{ Capaian Kinerja Tahun Ybs}}{\% \text{ Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya}}$$

Rasio efektifitas capaian kinerja yang dihasilkan > 1 bermakna terjadi peningkatan efektivitas. Rasio yang dihasilkan = 1 bermakna efektivitas capaian kinerja tahun berjalan sama dengan tahun sebelumnya. Apabila rasio yang dihasilkan < 1, menunjukkan bahwa terjadi penurunan efektivitas capaian kinerja sasaran, sehingga perlu adanya percepatan pencapaian kinerja pada tahun yang akan datang guna mencapai kinerja yang telah ditetapkan sampai dengan akhir periode Renstra.

Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja (fisik) dengan persentase realisasi anggarannya dengan rumus:

$$\text{Efisiensi Capaian Kinerja} = \frac{\% \text{ Capaian Kinerja Fisik Tahun Ybs}}{\% \text{ Capaian Keuangan Tahun Ybs}}$$

## **b. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja**

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja sasaran untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan, sehingga dapat diambil langkah perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

## **2. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja**

### **a. Capaian Kinerja Sasaran**

Dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Program (IKP) Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dari setiap kegiatan pendukung IKP. Adapun capaian kinerja sasaran IKK Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan tahun 2020 rata-rata tercapai 100% untuk setiap kegiatan seperti yang dapat dilihat pada Tabel 10 di bawah ini.



Tabel 10. Capaian IKK Tahun 2020

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target (Volume)	Realisasi (Volume)	% Capaian
Tertayarnya permohonan penggunaan kawasan hutan khususnya dalam rangka ketahanan energi	Penelaahan dan Pemantauan Penggunaan Kawasan Hutan	300 permohonan	586 unit	195 %
	Pemantauan Pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%	1 Dok	1 Dok	100%
Tersedianya Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH	Penyusunan/Update peta penetapan dan kelembagaan KPH	530 Peta Update	530 Peta Update	100%
	Forest Investment Program-Project 2 (FIP)	1 Laporan	1 Laporan	100%
Pembentukan Unit KPH serta penataan ruang wilayah 34 Provinsi	Analisis Kelayakan Perencanaan Ruang Kawasan Hutan	2 Dok	2 Dokumen	100%
	Fasilitasi Penataan Ruang Kawasan Hutan Dalam Rangka Review RTRWP	3 Dok	3 Dokumen	100%
	Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	1 Sistem	1 Sistem	100%
	Penyusunan/update peta indikatif dan areal Perhutanan Sosial mendukung KPH	1 Dok	1 Dok ( 34 Provinsi )	100%
	Pengendalian Perencanaan Makro Kawasan Hutan Dalam Mendukung Pembangunan KPH	1 Dok	1 Dok	100%
	Penyusunan Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan	1 Dok	1 Dok	100%
	Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi	1 Dok	1 Dok	100%
	Tersedianya Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa	Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa	1 Dok	1 Dok
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Lingkup Direktorat Teknis	Dukungan Manajemen Direktorat RPPWPH	1 Layanan	1 Layanan	100%
Layanan Perkantoran Satker Pusat	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 Layanan	1 Layanan	100%

## b. Efektifitas Capaian Kinerja

Seperti halnya pada tahun ini, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Pada tahun 2020, 7 kegiatan berbeda dari tahun sebelumnya, dan 5 kegiatan sama dengan tahun sebelumnya, mengingat tahun 2020 merupakan awal tahapan Renstra 2020-2024 sehingga tidak semua kegiatan dapat dibandingkan dengan kegiatan tahun sebelumnya. Untuk Kegiatan yang dapat dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu Penelaahan dan Pemantauan Penggunaan Kawasan Hutan, Pemantauan Pembayaran PNPB Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%, Forest Investment Program-Project 2 (FIP), Penyusunan/update peta arahan pemanfaatan hutan mendukung KPH, Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa dengan mempunyai capaian kinerja sebesar rata-rata 100%. Berdasarkan persentase capaian kinerja tahun sebelumnya maka diperoleh rasio efektifitas capaian kinerja = 1,2 yang berarti efektifitas capaian kinerja tahun 2020 lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Dengan demikian diharapkan Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan dapat mencapai kinerja yang telah ditetapkan sampai dengan akhir periode Rensta. Perhitungan Efektifitas Capaian Kinerja Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 11 di bawah ini.

Tabel 11. Efektifitas Capaian IKK Tahun 2020

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	% Capaian Tahun 2019	% Capaian Tahun 2020	Efektifitas Capaian Kinerja
Tersedianya permohonan penggunaan kawasan hutan khususnya dalam rangka ketahanan energi	Penelaahan dan Pemantauan Penggunaan Kawasan Hutan	121	195	1,61
	Pemantauan Pembayaran PNPB Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%	100	100	1
Tersedianya Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH	Penyusunan/Update peta penetapan dan kelembagaan KPH	-	100	1

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	% Capaian Tahun 2019	% Capaian Tahun 2020	Efektifitas Capaian Kinerja
	Forest Investment Program-Project 2 (FIP)	100	100	1
Pembentukan Unit KPH serta penataan ruang wilayah 34 Provinsi	Analisis Kelayakan Perencanaan Ruang Kawasan Hutan	-	100	-
	Facilitasi Penataan Ruang Kawasan Hutan Dalam Rangka Review RTRWP	-	100	-
	Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	-	100	-
	Penyusunan/update peta arahan pemanfaatan hutan mendukung KPH	100	100	1
	Pengendalian Perencanaan Makro Kawasan Hutan Dalam Mendukung Pembangunan KPH	-	100	-
	Penyusunan Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan	-	100	-
	Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi	-	100	-
	Tersedianya Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa	Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa	100	100
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Inkrup Direktorat Teknis	Dukungan Manajemen Direktorat RPPWPH	-	100	-
Layanan Perkantoran Satker Pusat	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	-	100	-

### c. Efisiensi Capaian Kinerja

Tabel 12. Efisiensi Capaian IKK Tahun 2020

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	% Capaian Fisik Tahun 2020	% Capaian Keuangan Tahun 2020	Efisiensi Capaian Kinerja
Terlayannya permohonan	Penelaahan dan Pemantauan Penggunaan Kawasan Hutan	99,90	98,45	1,01

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	% Capaian Fisik Tahun 2020	% Capaian Keuangan Tahun 2020	Efisiensi Capaian Kinerja
penggunaan kawasan hutan khususnya dalam rangka ketahanan energi				
	Pemantauan Pembayaran FNBP Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%	99,85	98,35	1,02
Tersedianya Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH	Penyusunan/Update peta penetapan dan kelembagaan KPH	97,19	94,20	1,03
	Forest Investment Program-Project 2 (FIP)	92,99	91,46	1,02
Pembentukan Unit KPH serta penataan ruang wilayah 34 Provinsi	Analisis Kelayakan Perencanaan Ruang Kawasan Hutan	99,43	92,07	1,08
	Fasilitasi Penataan Ruang Kawasan Hutan Dalam Rangka Review RTRWP	96,09	94,27	1,02
	Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	100	99,69	1,00
	Penyusunan/update peta arahan pemanfaatan hutan mendukung KPH	99,68	89,29	1,12
	Pengendalian Perencanaan Makro Kawasan Hutan Dalam Mendukung Pembangunan KPH	99,85	99,77	1,00
	Penyusunan Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan	98,58	97,15	1,01
	Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi	99,98	99,52	1,00
Tersedianya Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa	Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa	99,12	96,06	1,03
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas lingkup Direktorat Teknis	Dukungan Manajemen Direktorat RPPWP/1	100	96,57	1,03
Layanan Perkantoran Satker Pusat	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	100	87,91	1,13

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan cukup efisien dalam menggunakan anggaran demi terlaksananya kegiatan-kegiatan yang menunjang tupoksi organisasi. Hal ini terlihat dengan nilai efisiensi capaian kinerja rata-rata lebih dari 1.

#### d. Progres Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra

Tabel 13. Progres Capaian Kinerja Tahun 2020 Terhadap Target Renstra

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 5 Tahun (Renstra)	REALISASI					Total Realisasi s.d Tahun 2020	% Realisasi Kumulatif Terhadap Target 5 Tahun
			2020	2021	2022	2023	2024		
Terlayannya permohonan penggunaan kawasan hutan khususnya dalam rangka ketahanan energi	Penelaahan dan Pemantauan Penggunaan Kawasan Hutan	1500 Permohon	586	-	-	-	-	586	39,06%
	Pemantauan Pembayaran PHSF Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%	5 Dok	1 Dok					1 Dok	20%
Tersedianya Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH	Penyusunan/Up date peta penetapan dan kelembagaan KPH	530 Peta	530 Peta ( Update)					530 Peta ( Update)	20%
	Forest Investment Program- Project 2 (FIP)	5 Laporan	1 Lap					1 Lap	20%
Pembentukan Unit KPH serta penataan ruang wilayah 34 Provinsi	Analisis Kelayakan Perencanaan Ruang Kawasan Hutan	10 Dok	2 Dok						20%
	Facilitasi Penataan Ruang Kawasan Hutan Dalam Rangka Review RTRWP	15 Dok	3 Dok						20%
	Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	1 Sistem	-						20%
	Penyusunan/ update peta arahan pemanfaatan hutan	5 Dok	1 Dok					1 Dok	20%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 5 Tahun (Renstra)	REALISASI					Total Realisasi s.d Tahun 2020	% Realisasi Kumulatif Terhadap Target 5 Tahun
			2020	2021	2022	2023	2024		
	mendukung KPH								
	Pengendalian Perencanaan Makro Kawasan Hutan Dalam Mendukung Pembangunan KPH	5 Dok	1 Dok				1 Dok	20%	
	Penyusunan Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan	5 Dok	1 Dok				1 Dok	20%	
	Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi	5 Dok	1 Dok				1 Dok	20%	
Tersedianya Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa	Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa	5 Dok	1 Dok				1 Dok	20%	
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas lingkup Direktorat Teknis	Dukungan Manajemen Direktorat RPPWPH	5 layanan	1 Layanan				1 Layanan	20%	
Layanan Perkantoran Satker Pusat	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	5 layanan	1 Layanan				1 Layanan	20%	

#### e. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

##### Capaian Sasaran Indikator Kinerja Kegiatan

##### 1) Penelaahan dan Pemantauan Penggunaan Kawasan Hutan

Tahun 2020 merupakan awal tahun pelaksanaan renstra 2020 sd 2024. Sesuai Renstra Tahun 2020 – 2024 target pelayanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan adalah 300 unit per tahun. Capaian kinerja Pelayanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan yang telah selesai

terlayani di Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan adalah sebanyak 586 Unit atau sebesar 195,33 % dari target. Sedangkan capaian realisasi keuangan anggaran pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.059.622.111 atau dari target Rp. 1.072.870.000 atau sebesar dengan 98,77%, dengan deviasi anggaran sebesar 15.797.390,- atau 1,23%.

Capaian kinerja penyelesaian pelayanan permohonan penggunaan kawasan hutan juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pada tahun sebelumnya yaitu 2019 pelayanan permohonan penggunaan kawasan hutan terselesaikan sebanyak 364 Unit dari target 300 unit atau sebesar 121 %. Sehingga terdapat peningkatan efektifitas kinerja pelayanan permohonan penggunaan kawasan hutan di Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan yang sangat signifikan yaitu sebesar  $195\% / 121\% = 1,61\%$

• **Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Penelaahan dan Pemantauan Penggunaan Kawasan Hutan adalah sebagai berikut :**

- a) Permohonan Penggunaan kawasan hutan yang ditujukan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal c.q Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dilengkapi dengan persyaratan teknis dan pernyataan komitmen.
- b) Apabila persyaratan terpenuhi maka berkas permohonan dilakukan penelaahan secara spasial (agar tidak terjadi izin yang tumpang tindih) baik dari segi kawasan hutan, izin pemanfaatan (HA/HT/HD), Hkm, KHDTK, PIAPS, TORA, PIPPB, Penutupan lahan, dan Izin Penggunaannya.
- c) Penelaahan dilakukan dari segi teknis dan yuridis dengan batasan waktu 34 hari kerja sampai terbitnya IPPKH.
- d) Dalam hal pemantauan, pemegang IPPKH diberikan waktu 1 (satu) tahun untuk memenuhi komitmen.

e) Setelah pemegang IPPKH memenuhi komitmen makan dapat diberikan Penetapan Areal Kerja IPPKH.

- **Pendukung efisiensi penggunaan anggaran:**

Program yang jelas dan terukur, laporan akuntabel, program sesuai dengan SDM yang ada. Tahun 2020 Pagu Anggaran tersedia sebesar Rp. 1.072.870.000,- Realisasi Rp. 1.057.072.610 atau sebesar 98,52%, Capaian Realisasi Permohonan sebanyak 586 Pemohon dari target 300 Pemohon ( sebesar 195% dari target ), maka jika dilihat dari penggunaan anggaran dapat dikatakan cukup efisien.

- **Penyebab keberhasilan & kegagalan:**

a) Keberhasilan : Semangat Kerja, focus dan integritas yang tinggi; sarana dan prasarana memadai, dan kualitas SDM yang baik.

b) Kegagalan : Volume pekerjaan tidak sebanding kuantitas SDM yang ada dan masa pandemi Covid 19 membuat pemohon kesulitan dalam berkomunikasi dan berkoordinasi dalam permohonan pelayanan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

- **Kegiatan yang menunjang keberhasilan:**

Pelatihan keterampilan bagi SDM, dukungan pimpinan, sarana prasarana lengkap.

- **Hasil (outcome) penting atas tercapainya output sasaran kinerja:**

Proses perizinan terlayani maksimal dengan adanya perbaikan sistem dalam pelayanan, dan revisi peraturan terkait Penggunaan Kawasan Hutan.

- **Upaya perbaikan ke depan**

Peningkatan keterampilan SDM melalui Pelatihan, time schedule untuk setiap program kerja, sarana prasarana memadai (contoh : kondisi ruangan yang sejuk, printer/plotter/PC computer dapat digunakan dengan baik, ketersediaan ATK lengkap dan penambahan SDM yang disesuaikan dengan Volume pekerjaan.



• **Tabel Data hasil pelaksanaan kegiatan dan penjelasannya**

Pada Tahun 2020 kegiatan Permohonan IPPKH sebanyak 461 unit yang terdiri dari permohonan Operasi produksi, Izin Eksplorasi, Izin Survey, Persetujuan Kerjasama, dan Lahan Kompensasi dan Perpanjangan Komitmen. Adapun Pelayanan IPPKH sebanyak 390 unit dan yang masih dalam proses penerbitan IPPKH sebanyak 196 unit. Selengkapnya dapat ditampilkan di Rekap Data Permohonan dan Pelayanan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

*Tabel 14 : Data Permohonan dan Pelayanan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)*

NO	KEGIATAN	S/D BULAN DESEMBER TAHUN 2020			
		Permo honian	PERMOHONAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN YANG SELESAI TERLAYANI		
			Terbit Izin/per setujuan	Ditolak	Selesai ditelaah dan dalam proses penerbitan izin/persetujuan
		Unit	Unit	Unit	Unit
1	IPPKH untuk Operasi Produksi / Non Pertambangan (Listrik, jalan, bendungan, dll)	187	159	31	31
2	IPPKH untuk Eksplorasi	32	23	7	4
3	Persetujuan untuk Survei	19	19	3	3
4	Perpanjangan IPPKH	43	21	6	6
5	Perubahan IPPKH/Pengembalian/Penambahan sebagian areal IPPKH	22	27	9	2
6	Penetapan Areal Kerja	89	72	3	29
7	Persetujuan Kerjasama	21	24	39	12
8	Calon Lahan Kompensasi	6	9	4	-
9	BAST Lahan Kompensasi	2	3	-	1
10	Perpanjangan Komitmen	4	14	6	11
	<b>JUMLAH</b>	<b>425</b>	<b>384</b>	<b>103</b>	<b>99</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>425</b>	<b>586</b>		

Keterangan:

1. Realisasi sejumlah 586 unit, sebagian merupakan permohonan pada tahun sebelumnya yang terselesaikan pada tahun 2020

2. Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan tidak seluruhnya dapat diselesaikan dalam tahun berjalan yang sama antara lain karena :
  - Permohonan dilakukan di akhir tahun.
  - Beberapa permohonan perlu klarifikasi dari instansi lain.

## **2) Pemantauan Pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%**

Tahun 2020 merupakan awal tahun pelaksanaan renstra 2020 sd 2024, pada tahun 2020 dengan capaian realisasi PNBP-PKH sebesar Rp1.925.516.157.743,00 dari target sebesar Rp1.474.200.000.800,00 (130,61%)

Uraian Penjelasan Capaian Realisasi : Realisasi pembayaran PNBP-PKH Tahun 2020 berasal dari IPPKH untuk sektor pertambangan sebesar Rp1.888.393.973.995,00 dan IPPKH untuk sektor non tambang sebesar Rp37.122.183.748,00 dari realisasi tersebut terdapat pembayaran piutang untuk kewajiban tahun 2009 s.d. 2019 sebesar Rp647.950.701.381,00, pembayaran dimuka untuk kewajiban tahun 2021 sebesar Rp10.147.334.500,00 dan tahun 2022 sebesar Rp2.624.000,00

- Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80% adalah sebagai berikut :
  1. Monitoring Pembayaran PNBP-PKH;
  2. Bimbingan Teknis kelengkapan pembayaran PNBP-PKH;
  3. Supervisi Verifikasi pembayaran PNBP-PKH dan
  4. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP-PKH)

- **Pendukung efisiensi penggunaan anggaran:**

Dalam melakukan kegiatan pemantauan pembayaran PNBP-PKH yang maksimal, diperlukan dukungan penganggaran terutama untuk kegiatan Verifikasi pembayaran PNBP-PKH dan tahapan tahapan kegiatan PNBP PKH. Tahun 2020 Pagu Anggaran tersedia sebesar Rp. 764.124.000,- Realisasi Rp. 751.537.767 atau sebesar 98,35%,

Capaian Realisasi Pembayaran PNBPKH Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 1.888.393.973.955,- ( sebesar 128,09% dari target ), maka jika dilihat dari penggunaan anggaran dapat dikatakan cukup efisien.

- **Penyebab keberhasilan/ kegagalan:**

Penatausahaan PNBPKH dilaksanakan oleh Direktorat Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan dalam hal ini Subdit Informasi Spasial dan Dokumentasi dengan segala keterbatasannya, yaitu :

1. Kurangnya sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakan tugas penatausahaan PNBPKH dibandingkan dengan jumlah IPPKH yang harus ditelaah pembayaran PNBPKH nya
2. Perlu adanya pelatihan untuk tenaga verifikator pembayaran PNBPKH

- **Kegiatan yang menunjang keberhasilan:**

Bimbingan Teknis yang dilaksanakan setiap tahun kepada wajib bayar, koordinasi intens dengan instansi terkait diantaranya KPKNL, BPK, BPKP, EDDM Pusat, ESDM Daerah dan tentunya kerjasama yang baik dengan BPKH dan Dinas Kehutanan Provinsi.

- **Hasil (outcome) penting atas tercapainya output sasaran kinerja:**

Realisasi pembayaran PNBPKH yang sesuai dengan target PNBPKH, Kegiatan tahunan yang rutin dilaksanakan dalam mendukung pembayaran PNBPKH dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja tahunan

- **Upaya perbaikan ke depan**

Dalam rangka menyajikan laporan realisasi dan piutang PNBPKH yang mutakhir akan dilakukan integrasi antara Sistem Informasi PNBPKH *Online* dengan sistem informasi PNBPKH Online (SIMPONI). Selain itu, perlu ditingkatkan kegiatan verifikasi di lapangan dengan skala

prioritas antara lain yang melakukan kegiatan di lapangan melebihi rencana yang tertuang pada baseline (Form PNBP-1). Penggunaan sebagian dana PNBP-PKH dapat digunakan untuk kegiatan verifikasi PNBP-PKH

Tabel 15 : Data hasil pelaksanaan kegiatan Pembayaran PNBP PKH th. 2020

No	Indikator Kinerja	Kegiatan rinci	output	Penjelasan
1.	Pemanitaan Pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%	Monitoring Pembayaran PNBP-PKH	1 keg	Salah satu upaya yang dilaksanakan oleh Direktorat Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan hutan untuk memaksimalkan penagihan kewajiban pembayaran antara lain korespondensi persuratan penagihan/peringatan koordinasi dengan instansi terkait
2.		Bimbingan Teknis kelengkapan pembayaran PNBP-PKH	1 Keg	Dalam Pemenuhan kewajiban PNBP-PKH, Wajib Bayar perlu menyampaikan dokumen pendukung sebagai telahan lebih lanjut atas pembayaran yang telah dilakukan. Bimbingan teknis ini difokuskan kepada wajib bayar baru yang menjadi pemegang IPPKH
3.		Supervisi Verifikasi Pembayaran PNBP-PKH	1 Keg	Kegiatan supervisi verifikasi merupakan kegiatan intern antara BPKH dan Dit. RPP sebagai salah satu media/forum diskusi terkait permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan verifikasi pembayaran PNBP-PKH, karena terkendala perosnil dan anggaran maka hanya difokuskan pada BPKH yang wilayah kerjanya mempunyai IPPKH yang lumayan banyak (di antaranya Pulau Kalimantan).
4.		Pengembangan SI PNBP PKH	1 Keg	Sampai dengan saat ini, Dit. RPP telah melakukan pengembangan SI PNBP-PKH secara ONLINE dengan tujuan bahwa database terkait PNBP-PKH dapat diakses oleh semua pihak terkait (pusat dan daerah). Dukungan pendanaan dan perbaikan materi terutama

No	Indikator Kinerja	Kegiatan-rinci	output	Penjelasan
				untuk link dengan ESDM dan Kementerian Keuangan sangat dibutuhkan dalam pengembangan SI PNBSP-PKH.

- **Dokumentasi Kegiatan**

Kegiatan Monitoring Pembayaran PNBSP-PKH di Provinsi Sumatera Selatan dan Sulawesi Utara



### **3) Penyusunan/Update peta penetapan dan kelembagaan KPH**

Tahun 2020 merupakan awal tahun pelaksanaan renstra 2020 sd 2024, pada tahun 2020 dengan capaian realisasi 530 peta terupdate (20 %) tiap tahun dari target 530 peta terupdate selama 5 tahun

Uraian Penjelasan Capaian Realisasi adalah sebagai berikut : dalam renstra 2020 sd 2024 direncanakan pelaksanaan kegiatan updating peta penetapan dan kelembagaan KPH sebanyak 530 peta terupdate selama 5 (lima) tahun berturut-turut. Jadi setiap tahun, peta-peta penetapan dan kelembagaan yang mengalami perubahan akibat perubahan kebijakan tata ruang wilayah per provinsi, akan diupdate disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan.

- **Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan/Update peta penetapan dan kelembagaan KPH :**

Kegiatan Penyusunan/Update peta penetapan dan kelembagaan KPH di tahun 2020 dilakukan dengan pelaksanaan kegiatan penyusunan revisi atas penetapan KPH provinsi dan pemantauan proses revisi RPHJP. Adapun tahapan pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Workshop Kegiatan Keplanologian untuk KPH
2. Persiapan rancangan kegiatan, analisis desk study, pengolahan data sekunder perkembangan wilayah KPHL dan KPHP seluruh Indonesia
3. Pelaksanaan penyusunan revisi atas penetapan KPH provinsi dengan aktor terkait (Dinas Kehutanan Provinsi, Eselon II terkait, UPT KLHK, KPH jika memungkinkan) dan pengumpulan data primer
4. Pembahasan penyusunan revisi atas penetapan KPH provinsi serta mengukur kuantitas dan kualitas data yang sudah didapatkan
5. Pengusulan konsep revisi atas penetapan KPH provinsi kepada Menteri LHK
6. Pemantauan proses revisi RPHJP

- **Pendukung efisiensi penggunaan anggaran :**

- a. Adanya tambahan sumber dana PNBP
- b. Adanya dukungan dana/anggaran dari pihak donor (World Bank) melalui Forest Investment Program (FIP) Project II.

Tahun 2020 Pagu Anggaran tersedia sebesar Rp. 692.285.000,- Realisasi Rp. 652.128.317 atau sebesar 94,19%, Capaian Realisasi Updating peta penetapan dan kelembagaan KPH sebanyak 530, dari target 530 Peta Update ( sebesar 100% dari target ) maka jika dilihat dari penggunaan anggaran dapat dikatakan cukup efisien.

- **Penyebab keberhasilan/ kegagalan:**

- 1) Penyebab keberhasilan kegiatan berupa kerjasama yang baik antar instansi/pihak terkait dan kinerja tim pelaksana terkoordinir dengan baik.
- 2) Adapun penyebab kegagalan adalah adanya perubahan wilayah KPH di beberapa provinsi, beberapa usulan perubahan belum selesai (dalam proses).

- **Kegiatan yang menunjang keberhasilan:**

- a. Kegiatan FIP II
- b. Kegiatan di Eselon I lain lingkup KLHK yang berkaitan dengan pembangunan dan operasionalisasi KPH

- **Hasil (outcome) penting atas tercapainya output sasaran kinerja kegiatan Penyusunan/Update peta penetapan dan kelembagaan KPH**

- a. SK Penetapan wilayah KPHL dan KPHP Provinsi Sulawesi Selatan No. SK.371/MENLHK/SETJEN/PL.0/9/2020 tanggal 17 September 2020.

- b. SK Penetapan wilayah KPHL dan KPHP Provinsi Sulawesi Tenggara No. SK.459/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2020 tanggal 11 Desember 2020.
- c. SK Penetapan wilayah KPHL dan KPHP Provinsi Papua No. SK.28/MENLHK/SETJEN/OTL.1/1/2020 tanggal 10 Januari 2020.

• **Upaya perbaikan ke depan**

- a. Instansi pusat dan daerah terus bersinergi menuju kesepahaman dan kebersamaan dalam proses pembangunan KPH.
- b. Masih diperlukan kegiatan Rapat Koordinasi KPH Nasional serta beberapa Workshop Nasional KPH untuk mendorong optimalisasi kinerja KPH serta berbagi informasi dan keberhasilan (*lesson learn*) antar KPH sehingga KPH yang belum optimal pengelolannya dapat termotivasi untuk lebih maju.
- c. Acara yang bertaraf nasional dalam hubungannya dengan pembangunan KPH, perlu tindak lanjut yang signifikan sehingga mampu mendorong keberhasilan KPH dalam pengelolaan hutan.

Tabel 16 : Penyusunan/Update peta penetapan dan kelembagaan KPH

Indikator	Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Penyusunan/Update peta penetapan dan kelembagaan KPH	Target (KPH)	530	530	530	530	530
	yang mengalami perubahan wilayah (KPH)	3				
	Realisasi	530				

Sumber : Data Sudit Pembentukan Wilayah dan APSCOH

Tahun 2020 hanya 3 (tiga) provinsi saja yang mengalami perubahan wilayah KPH yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Provinsi Papua. Walaupun demikian, provinsi lain sudah dilakukan kegiatan Update Peta, sehingga total realisasi adalah 100 % (530 KPH).



#### 4) Analisis Kelayakan Perencanaan Ruang Kawasan Hutan

Tahun 2020 merupakan awal tahun pelaksanaan renstra 2020 sd 2024, pada tahun 2020 dengan capaian realisasi 2 dokumen dari target 2 dokumen analisis kelayakan perencanaan penataan ruang kawasan hutan.

Realisasi Analisis Kelayakan Perencanaan Ruang Kawasan Hutan dapat terpenuhi dari target yang telah ditetapkan sebelumnya (100%). Dengan demikian kesesuaian target indikator kinerja kegiatan untuk terwujudnya sasaran ini melebihi 100% dan termasuk dalam kriteria **Sangat Baik**.

- **Tahapan Pelaksanaan Kegiatan**

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Analisis, meliputi :

- a. Mengumpulkan dan memperbarui data kawasan hutan terakhir yang akan digunakan untuk analisis.
- b. Menerima dan melakukan download bahan/materi RTRW Kab/Kota, RDTR, RTR KSN dari pemohon.
- c. Melakukan *overlays* bahan/materi peta terhadap peta kawasan hutan terbaru
- d. Membuat deskripsi hasil *overlays* yang sudah dilakukan dengan peraturan yang terkait tata ruang wilayah dan tata ruang kawasan hutan
- e. Menyampaikan hasil telaah analisis baik secara langsung pada saat dilakukan pembahasan maupun secara tertulis kepada instansi pemohon.

- **Pendukung efisiensi penggunaan anggaran :**

Untuk tahun 2020, efisiensi penggunaan anggaran disebabkan oleh kondisi pandemi covid-19 yang memaksa pembahasan permohonan konsultasi dan evaluasi raperda RTRWP, RTRW Kab/Kota, RDTR, RTR

KSN dilakukan juga secara online/daring. Tahun 2020 Pagu Anggaran tersedia sebesar Rp. 319.250.000,- Realisasi Rp. 293.923.000 atau sebesar 92,06%, Capaian Realisasi Analisis Kelayakan Perencanaan Ruang Kawasan Hutan sebanyak 2 Dokumen, dari target 2 Dokumen ( sebesar 100% dari target ) maka jika dilihat dari penggunaan anggaran dapat dikatakan cukup efisien.

- **Penyebab keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini, antara lain :**

- 1) Komitmen pegawai di sub dit RKH dalam menjalankan penelaahan permohonan
- 2) Terjadinya koordinasi yang sudah baik antar skateholder yang terlibat dalam proses penelaahan (Ditkuh, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR/BPN)
- 3) Sarana dan prasarana yang memadai

- **Kegiatan yang menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan**

Penjulang Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini yakni disebabkan telah terjalinnya koordinasi dan Singkronisasi data dengan stakeholder lainnya

- **Hasil (*outcome*) penting atas tercapainya output sasaran kinerja**

Hasil outcome penting atas tercapainya output kegiatan ini berupa dokumen hasil telaah analisis kelayakan penataan ruang kawasan hutan.

- **Upaya perbaikan ke depan kegaitan ini, berupa :**

- a. Meningkatkan kerjasama, koordinasi antar stakeholder terkait
- b. Meningkatkan kapasitas penyimpanan data untuk analisis
- c. Meningkatkan kualitas jaringan Internet

Tabel 17 : Data hasil pelaksanaan kegiatan Analisis Perencanaan Ruang Kawasan Hutan

No	Jenis Dokumen yang dianalisis	Lokus	Keterangan
1	RTRWP	Provinsi Jawa Tengah Provinsi Bali	

No	Jenis Dokumen yang dianalisis	Lokus	Keterangan
2	RTRWK	Kabupaten Tangerang Kabupaten Serang Kabupaten Sragen Kota Surakarta Kabupaten Purbalingga Kabupaten Lamongan Kota Kediri Kabupaten Kaur Kabupaten Natuna Kabupaten Sumba Tengah Kabupaten Konawe Kabupaten Sumbas Kabupaten Mahakam Kabupaten Sintang Kabupaten Soppeng Kabupaten Toraja Utara Kota Palu	
3	RDTR	Karang Plaso, Kota Batu, Malang Perkotaan Batang Perkotaan Patimban Perkotaan Malang Perkotaan Makassar Perkotaan Maros	
4	RTR KSN	Kawasan Soroako	

#### Dokumentasi kegiatan Analisis Kelayakan Perencanaan Ruang Kawasan Hutan



## **5) Fasilitasi Penataan Ruang Kawasan Hutan Dalam Rangka Review RTRWP**

Tahun 2020 merupakan awal tahun pelaksanaan renstra 2020 sd 2024, pada tahun 2020 dengan capaian realisasi 3 dokumen dari target 3 dokumen

Realisasi Fasilitasi Penataan Ruang Kawasan Hutan dalam rangka Review RTRWP dapat terpenuhi dari target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian kesesuaian target indikator kinerja kegiatan untuk terwujudnya sasaran ini melebihi 100% dan termasuk dalam kriteria **Sangat Baik**.

Kegiatan fasilitasi penataan ruang kawasan hutan dalam rangka review RTRWP Bengkulu dimaksudkan untuk memfasilitasi kegiatan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam review RTRWP dalam upaya menyiapkan alokasi ruang kawasan hutan berdasarkan penelitian terpadu .

Adapun tujuan fasilitasi penataan ruang kawasan hutan dalam rangka review RTRWP, antara lain :

- a. Memastikan usulan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam Review RTRWP sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan.
- b. Memfasilitasi pemerintah daerah pada saat pembentukan Tim Terpadu, Tim Teknis dan Tim Sekretariat dan Gugus Kerja GIS.
- c. Memastikan proses penelitian terpadu berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Memfasilitasi penyusunan keputusan menteri kehutanan tentang Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.
- e. Memfasilitasi penyusunan persetujuan substansi kehutanan.
- f. Melakukan koordinasi dalam rangka percepatan untuk setiap tahapan proses Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dalam rangka Review RTRW Provinsi Bengkulu.

- **Tahapan pelaksanaan Fasilitasi Penataan Ruang Kawasan Hutan dalam rangka Review RTRWP :**
  - a. Adanya usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dalam rangka review RTRWP oleh Gubernur
  - b. Telaah Tim Teknis
  - c. Kajian lapangan timdu
  - d. Penentuan kriteria dan indikator perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan
  - e. Pembahasan timdu
  - f. Uji konsistensi timdu
  - g. Penyusunan dan penyampaian laporan timdu
  - h. Penyusunan Risalah Pengolahan Data
  - i. Penerbitan SK Perubahan oleh Menteri
  - j. Penerbitan Persetujuan Substansi Oleh Menteri/Dirjen

- **Pendukung efisiensi penggunaan anggaran :**

Untuk tahun 2020, efisiensi penggunaan anggaran disebabkan oleh fasilitasi dilakukan melalui pendampingan ke daerah dan pusat. Untuk pendampingan/koordinasi ke daerah menggunakan anggaran kementerian sedangkan pembahasan penelitian tim terpadu menggunakan anggaran pemerintah daerah. Tahun 2020 Pagu Anggaran tersedia sebesar Rp. 484.952.000,- Realisasi Rp. 457.170.940 atau sebesar 94,27%, Capaian Fasilitasi Penataan Ruang kawasan hutan dalam rangka review RTRWP 3 Dokumen, dari target 3 Dokumen ( sebesar 100% dari target ) maka jika dilihat dari penggunaan anggaran dapat dikatakan cukup efisien.

- **Penyebab keberhasilan kegiatan**

adanya komitmen dan koordinasi yang baik antara pemda pengusul dan KLHK. Sedangkan yang menghambat pelaksanaan kegiatan berupa perbedaan persepsi aturan dan mekanisme penganggaran yang berbeda.

- **Kegiatan yang menunjang keberhasilan meliputi :**

- a. Adanya perjalanan dinas dalam rangka pendampingan/fasilitasi
- b. Koordinasi yang baik antar stakeholder

Hasil (*outcome*) penting atas tercapainya output sasaran kinerja

berupa dokumen Fasilitasi Penataan Ruang Kawasan Hutan dalam rangka Review RTRWP telah tersusun.

*Tabel 18 : Fasilitasi Penataan Ruang Kawasan Hutan Dalam Rangka Review RTRWP*

No	Lokasi	Keterangan
1	Provinsi Bengkulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan Fasilitasi Penataan Ruang Kawasan Hutan Dalam Rangka Review Rencana Tata Ruang Wilayah sampai dengan saat baru tercapai sampai dengan tahap awal kegiatan Penelitian Tim Terpadu yakni : Pembentukan Tim Terpadu, Tim Teknis dan Tim Sekretariat dan Gugus GIS serta penyiapan data-data pendukung penelitian Tim Terpadu Oleh Tim Terpadu.</li> <li>- Pandemic COVID-19 berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Penataan Ruang Kawasan Hutan Dalam Rangka Review Rencana Tata Ruang Wilayah. Adanya pandemic tersebut menyebabkan pelaksanaan kegiatan kurang berjalan lancar, bahkan pemerintah daerah mengalihkan anggaran untuk Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi anggaran penanggulangan me Pandemic Covid -19.</li> <li>- Permasalahan tersebut ditindaklanjuti dengan koordinasi ke Pemerintah Daerah dengan hasil pada tahun 2022 akan diupayakan proses penelitian terpadu perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam rangka Review RTRWP Bengkulu.</li> </ul>
2	Provinsi Sulawesi Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan Fasilitasi Penataan Ruang Kawasan Hutan Dalam Rangka Review Rencana Tata Ruang Wilayah sampai dengan saat ini telah menerbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tengah</li> </ul>
3	Provinsi Kalimantan Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan Fasilitasi Penataan Ruang Kawasan Hutan Dalam Rangka Review</li> </ul>

No	Lokasi	Keterangan
		Rencana Tata Ruang Wilayah sampai dengan saat baru tercapai sampai dengan tahap awal kegiatan Penelitian Tim Terpadu yakni : ekspose usulan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan oleh Gubernur Kaltara kepada Menteri Kehutanan.

*Dokumentasi kegiatan Fasilitasi Penataan Ruang Kawasan Hutan Mendukung KPH*



#### **6) Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan**

Tersedianya Data dan Informasi Spasial dan Dokumentasi Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan dengan update terbaru yang lebih kompleks dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tahun 2020 merupakan awal tahun pelaksanaan renstra 2020 sd 2024, pada tahun 2020 dengan capaian realisasi data dan informasi yang tertuang dalam Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi, Penggunaan Kawasan

Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan meliputi 3 sistem informasi dari target 1 sistem informasi.

- **Uraian Penjelasan Capaian Realisasi :**

Dalam rangka mendukung saran dari KPK agar seluruh sistem informasi yang ada di lingkup Direktorat RPP dapat diintegrasikan menjadi satu sistem informasi saja maka diperlukan upaya integrasi dan penyatuan dari 3 sistem informasi yang ada yaitu Sinpasdok KPH, sistem informasi penggunaan kawasan hutan dan sistem informasi PNBP menjadi satu sistem informasi saja yg mencakup ketiga tema data dan informasi diatas. Namun hingga sekarang belum bisa tercapai hal yang diinginkan tersebut.

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan adalah sebagai berikut :

Selama Tahun 2020, ketiga sistem informasi tersebut diatas telah berjalan optimal dalam memberi dukungan data dan informasi bagi para pengambil keputusan di masing-masing bidang. Namun memang belum menjadi satu sistem yang terintegrasi dengan cukup mengakses satu sistem informasi saja maka pengguna akan dapat mengakses 3 bidang data dan informasi. Pengguna masih harus mengakses dari 3 sistem informasi tersebut untuk tahun 2020 ini.

- **Pendukung efisiensi penggunaan anggaran:**

Dukungan bantuan dana dari pihak GIZ Forclime dan dana PNBP PKH Tahun 2020 Pagu Anggaran tersedia sebesar Rp. 508.581.000,- Realisasi Rp. 506.997.350 atau sebesar 99,68%, Capaian Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi, Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan digunakan untuk 3 sistem



yang akan digabungkan menjadi 1 sistem, dan saat ini masih dalam proses.

- **Penyebab kegagalan:**

Kurangnya anggaran untuk mempekerjakan tenaga ahli teknologi informasi yang bisa menyatukan ketiga sistem informasi tersebut.

- **Kegiatan yang menunjang keberhasilan:**

Dukungan dari sosialisasi sistem informasi melalui grup WA dan komitmen ASN sebagai walidata dan admin sinpaspok

- **Faktor yang menunjang kegagalan:**

1) Kurangnya fasilitas hardware seperti server dan jaringan internet yang cepat untuk mendukung kelancaran updating data.

2) Kurangnya kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis (terutama di wilayah Indonesia bagian timur) untuk melatih para walidata untuk mengupdate data ke sistem informasi

3) Kondisi Indonesia mengalami Pandemi Covid 19 menyebabkan tidak dilakukannya sosialisasi langsung ke lapangan

- **Hasil (outcome) penting atas tercapainya output sasaran kinerja:**

Tersedianya Kompleksitas, keterbaharuan dan validitas data dan informasi terkini dari ketiga sistem informasi

- **Upaya perbaikan ke depan**

1) Mencari dukungan pendanaan untuk outsourcing tenaga ahli teknologi informasi yang menyatukan dan mengintegrasikan ketiga sistem informasi

2) Pengajuan tambahan anggaran untuk pengadaan hardware dan menyampaikan keluhan tentang jaringan internet ke Pusdatin

3) Pengajuan anggaran untuk bantuan dana dari NGO atau kerjasama internasional untuk kegiatan sosialisasi dan Bimtek.

Data hasil pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

No.	Nama Sistem Informasi	Sajian Data dan Informasi dalam sistem informasi sd Desember 2020
1.	Sinpasdok KPH	<p>Rekapitulasi Perkembangan data dan Informasi Pembangunan KPH dalam Sinpasdok-KPH sampai dengan akhir Desember 2020 adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekapitulasi jumlah KPH berdasar SK Penetapan adalah = 687 unit yg terdiri atas 148 KPHK; 195 KPHL dan 344 KPHP.</li> <li>2. Rekapitulasi Penetapan kelembagaan KPH (UPTD) berdasarkan Pergub adalah sebanyak 337 KPH.</li> <li>3. Rekapitulasi Jumlah RPHJP sah sebanyak 354 terdiri atas RPHJP KPHP sebanyak 202 dan RPHJP KPHL 152.</li> <li>4. Rekapitulasi Jumlah SDM di KPH sampai dg akhir Desember 2020 adalah sebanyak 15.141 orang.</li> <li>5. Rekapitulasi data kontribusi KPH terhadap PSDH PNBP sampai dengan akhir Desember 2020 adalah sebesar Rp. 1.277.634.218,- dengan jumlah KPH yg menyector PNBP sebanyak 63 KPH (sumber data : Sinpasdok KPH dan SI PNBP).</li> <li>6. Rekapitulasi pengisian data Kelompok Tani Hutan (KTH) di wilayah KPH di 29 Provinsi, terdiri atas 148 KPH; dengan 1.873 KTH, dan jumlah anggota KTH kurang lebih 85.876 orang. Sedangkan jumlah input data koordinat KTH sebanyak 257 dan jumlah data Shp KTH sebanyak 128.</li> <li>7. Rekapitulasi jumlah Shp tata hutan KPHP dan KPHL pada 29 Provinsi adalah sebanyak 337 yg terdiri atas Shp Tata hutan KPHL sebanyak 145 unit dari 195 KPHL dan Shp tata hutan KPHP sebanyak 192 unit dari 344 KPHP.</li> <li>8. Rekapitulasi pengisian data Inventarisasi Hutan di wilayah KPH adalah 10 BPKH pada 65 KPH dan Rekapitulasi pengisian data Inventarisasi Sosial Budaya adalah 11 BPKH pada 53 KPH.</li> </ol>
2.	Sistem Informasi laporan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekapitulasi IPPKH Operasi Produksi/Non Tambang pada tahun 2020 adalah 165 unit dengan luas</li> </ol>

No.	Nama Sistem Informasi	Sajian Data dan Informasi dalam sistem informasi sd Desember 2020
	6 bulanan IPPKH	<p>55.990,26 Ha dan IPPKH Eksplorasi adalah 23 unit dengan luas 58.040,60 Ha.</p> <p>2. Rekapitulasi laporan kewajiban IPPKH semester I tahun 2020 yang melaporkan sebanyak 214 IPPKH, dengan kewajiban yang dilaporkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reklamasi : 44 IPPKH seluas 1.122,83 Ha,</li> <li>- Rehabilitasi DAS : 47 IPPKH seluas 62.491,60 Ha</li> <li>- Kewajiban Pemberdayaan Masyarakat : 56 IPPKH dengan total Rp. 87.442.081.068 dan 8 IPPKH dengan total \$ 5.796.395</li> </ul>

- Gambar Tampilan Depan web Sinpaskok KPH+



## **7) Penyusunan/update peta indikatif dan areal Perhutanan Sosial mendukung KPH**

Tahun 2020 merupakan awal tahun pelaksanaan renstra 2020 sd 2024, pada tahun 2020 dengan capaian realisasi 1 dokumen dari target 1 dokumen

Indikator Jumlah Provinsi yang Memiliki **Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial** yang terupdate setiap tahun sebanyak 34 Provinsi terdiri dari dua unit kegiatan, yaitu : Penyusunan / Update **Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial** dalam Mendukung KPH serta Unit Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Arahan Pemanfaatan Hutan (Koordinasi/Penyiapan/Monitoring/Bimbingan Teknis KHDTK ) yang masing-masing telah tercapai sesuai target yaitu sebanyak 34 provinsi. Dengan demikian rata-rata kesesuaian target indikator kinerja kegiatan untuk terwujudnya sasaran ini sebesar 100% dan termasuk dalam kriteria Sangat Baik (Tabel terlampir )

- **Perbandingan dengan pelaksanaan pekerjaan dengan tahun sebelumnya dan/atau beberapa tahun terakhir :**

Pekerjaan tahun 2020 relatif lebih berat karena penyusunan dan penetapan peta arahan pemanfaatan hutan (PIAPS) mendapatkan perhatian dan input yang lebih besar dari para pihak terkait, sehingga perlu dilakukan koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif agar PIAPS dapat mengakomodir para pihak terkait yaitu :

1. Sekditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
2. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
3. Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

4. Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
5. Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
6. Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
7. Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
8. Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
9. Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung, Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung
10. Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam dan Ekosistem, Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem
11. Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
12. Direktorat Kawasan Konservasi, Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem
13. Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
14. Perum Perhutani.
15. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove

- **Pendukung efisiensi penggunaan anggaran:**

Alokasi anggaran yang tepat dan memadai namun perlu dilakukan penambahan anggaran dengan adanya penugasan baru terkait

terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan *Food Estate*. Penetapan Penyediaan Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan ini diproses oleh Direktorat RPPWPH untuk 34 Provinsi.

Tahun 2020 Pagu Anggaran tersedia sebesar Rp. 174.820.000,- Realisasi Rp. 156.090.200 atau sebesar 89,28%, Capaian Realisasi Penyusunan/update peta arahan pemanfaatan hutan mendukung KPH sebanyak 1 Dokumen ( 34 Provinsi ), dari target 1 Dokumen ( 34 Provinsi ) sebesar 100% dari target, maka jika dilihat dari penggunaan anggaran dapat dikatakan cukup efisien.

- **Penyebab keberhasilan/ kegagalan:**

- a. Alokasi anggaran yang belum memadai
- b. Input para pihak yang belum optimal
- c. Koordinasi dan komunikasi dengan para pihak yang belum intensif

- **Hasil (outcome) penting atas tercapainya output sasaran kinerja:**

- a. Dipedomaninya peta arahan pemanfaatan hutan (PIAPS) dalam penyusunan RPHJP KPHL/KPHP
- b. Dipedomaninya peta arahan pemanfaatan hutan (PIAPS) dalam proses perizinan pemanfaatan hutan
- c. Dipedomaninya peta arahan pemanfaatan hutan (PIAPS) dalam pengusulan program Perhutanan Sosial
- d. Dipedomaninya peta arahan pemanfaatan hutan (PIAPS) dalam proses perizinan pinjam pakai kawasan hutan
- e. Dipedomaninya peta arahan pemanfaatan hutan (PIAPS) dalam penyusunan peraturan dan kebijakan kehutanan

- **Upaya perbaikan ke depan**

- a. Alokasi anggaran yang memadai
- b. Optimalisasi input peran para pihak dalam penyusunan peta arahan pemanfaatan hutan (PIAPS)
- c. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif dengan para pihak terkait

## **8) Pengendalian Perencanaan Makro Kawasan Hutan Mendukung KPH**

Sebagai upaya mewujudkan keselarasan antara Rencana Kehutanan pusat dan daerah, maka pada tahun 2020 telah dilaksanakan kegiatan Pengendalian Perencanaan Makro Kawasan Hutan yang meliputi 4 sub kegiatan; yaitu:

- a) Pengintegrasian Rencana Pengelolaan KPH dengan RKTP dan RKTN
- b) Fasilitasi Penyusunan/Review RKTP
- c) Pemantauan Rencana Kehutanan Pusat
- d) Sosialisasi Peraturan Bidang Perencanaan Kehutanan

Pelaksanaan kegiatan Pengendalian Perencanaan Makro Kawasan Hutan secara rinci dapat dilihat pada uraian berikut:

### **a. Pengintegrasian Rencana Pengelolaan KPH dengan RKTP dan RKTN**

- **Capaian pelaksanaan kegiatan sampai dengan tahun berjalan dibandingkan dengan capaian target tahun sebelumnya :**

- Pada tahun 2019, pengintegrasian RKPH ke dalam RKTN dan RKTP dilakukan terhadap 390 KPH yang telah memiliki dokumen RPHJP yang telah disahkan, yang terdiri dari 104

- KPHL, 139 KPHP, 49 KPHK Taman Nasional, 38 KPHK Non Taman Nasional dan 57 KPH di wilayah Perum Perhutani;
- Sampai tahun 2020 telah dilakukan Pengintegrasian Rencana Pengelolaan KPH dengan RKTN terhadap 476 KPH yang telah memiliki dokumen RPHJP yang telah disahkan, yang terdiri atas 145 KPHL, 186 KPHP, 49 KPHK-TN, 39 KPHK-Non TN dan 57 KPH Perum Perhutani;

• **Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengintegrasian RKP dengan RKTN dan RKTP adalah sebagai berikut :**

- Data blok tata hutan KPH (KPHL dan KPHP) di luar Jawa diperoleh dari Sub Direktorat Informasi Spasial dan Dokumentasi. Sedangkan blok tata hutan KPH Perum Perhutani di peroleh dari Perum Perhutani dan BPKH Wilayah XI Yogyakarta.
- Dari data tersebut selanjutnya dilakukan kodefikasi dan pengelompokan blok tata hutan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P.5/VII-WP3H/2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP;
- Hasil dari kodefikasi dan pengelompokan tersebut kemudian diintegrasikan dengan arahan ruang kawasan hutan dalam RKTN Tahun 2011-2030, dengan melakukan overlay dari kedua data tersebut; dan
- Dari hasil analisis diperoleh data kesesuaian yang didasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P.5/VII-WP3H/2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP.



- **Pendukung efisiensi penggunaan anggaran :**

Penggunaan anggaran berasal dari APBN Murni, Tahun 2020 Pagu Anggaran tersedia sebesar Rp. 585.783.000,- Realisasi Rp. 584.411.800 atau sebesar 99,76%, Capaian Realisasi kegiatan Pengendalian Perencanaan Makro Kawasan Hutan Mendukung KPH sebanyak 1 Dokumen, dari target 1 Dokumen ( sebesar 100% dari target ) maka jika dilihat dari penggunaan anggaran dapat dikatakan cukup efisien.

- **Penyebab kegagalan :**

Kegiatan pengintegrasian KPH dalam RKTN dan RKTP sangat tergantung pada ketersediaan dokumen RPHJP KPH dan RKTP yang sudah disahkan. Jika dokumen-dokumen tersebut belum tersedia, maka kegiatan pengintegrasian KPH dalam RKTN dan RKTP tidak dapat dilaksanakan. Untuk itu komitmen dari para pihak untuk menyusun RPHJP KPH dan RKTP sangat menentukan.

- **Kegiatan yang menunjang keberhasilan :**

- Fasilitasi dan bimbingan teknis penyusunan RPHJP KPH dan RKTP;
- FGD untuk menyamakan persepsi antara pusat dan daerah; dan
- Rapat koordinasi dengan para pihak.

- **Hasil (outcome) penting atas tercapainya output sasaran kinerja :**

Terintegrasinya perencanaan dalam pengelolaan dan pengurusan hutan di tingkat Nasional, Provinsi sampai dengan tingkat tapak sehingga rencana kawasan hutan dan rencana pembangunan kehutanan dapat terlaksana secara sinergis dan harmonis.

- **Upaya perbaikan ke depan :**

- Meningkatkan koordinasi antara Pusat dan Daerah;

- Meningkatkan koordinasi dengan unit kerja yang menangani penyusunan dan pengesahan RPHJP KPH;
  - Meningkatkan anggaran kegiatan fasilitasi dan bimbingan teknis penyusunan RPHJP KPH dan RKTP;
  - Bekerjasama dengan para pihak dan lembaga donor untuk mendukung proses penyusunan, pengesahan dan pengintegrasian RPHJP KPH dan RKTP dengan RKTN.
- **Data Kegiatan Pengintegrasian:**

Pada tahun 2020 kegiatan pengintegrasian telah dilaksanakan pada 6 propinsi yaitu:

    1. Banten
    2. Jawa Timur
    3. Daerah istimewa Yogyakarta
    4. Jawa Barat
    5. Sumatera Selatan
    6. Sumatera Utara

Rapat Pembahasan Pengintegrasian Rencana Pengelolaan KPH dengan RKTP dan RKTN di Propinsi Sumatera Selatan



**b. Fasilitas Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP)**

- **Capaian pelaksanaan kegiatan sampai dengan tahun berjalan** dibandingkan dengan capaian target tahun sebelumnya
  - Pada tahun 2019, kegiatan fasilitasi penyusunan RKTP dilaksanakan terhadap provinsi Sumatera Barat (revisi RKTP), dan Kalimantan Utara;
  - Pada tahun 2020, kegiatan fasilitasi RKTP dilaksanakan terhadap provinsi Papua Barat dan Sumatera Utara,
  
- **Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Penyusunan RKTP adalah sebagai berikut :**
  - Direktur Jenderal PKTL mengirimkan surat kepada Gubernur seluruh Indonesia dengan arahan sebagai berikut : bagi provinsi yang belum Menyusun RKTP agar segera menyusun RKTP, bagi provinsi yang RKTPnya sudah 5 (lima) tahun atau lebih diharapkan melakukan review dan revisi RKTP, bagi provinsi yang sudah menyusun RKTP tetapi terdapat kebijakan signifikan terkait kawasan hutan diwilayahnya diharapkan melakukan review dan revisi RKTP dengan menyesuaikan kebijakan yang berlaku, dan bagi provinsi yang belum mempunyai RKTP tetapi sudah menyusun/menyampaikan draft agar segera menyelesaikan draft tersebut dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan data dan kebijakan terbaru.
  - Draft dokumen RKTP disusun oleh Dinas Kehutanan Provinsi sedangkan peta lampiran RKTP tentang arahan ruang pemanfaatan Kawasan hutan dilakukan pembahasan bersama antara Subdit Rencana Makro Kehutanan, BPKH, Dinas Kehutanan dan KPH.

- Draft dokumen dan peta lampiran RKTP disampaikan ke Pusat c.q Direktorat RPP untuk kemudian dilakukan pencermatan pada Subdit Rencana Makro Kehutanan.
  - Dari hasil pencermatan akan dilakukan rapat pembahasan final sebelum diajukan pengesahannya melalui Peraturan Gubernur.
- **Pendukung efisiensi penggunaan anggaran :**  
 Penggunaan anggaran berasal dari APBN Murni, Anggaran PNP dan dukungan pembiayaan kegiatan dari GIZ Forclime dan Conservation International Indonesia. Kegiatan fasilitasi juga dilakukan melalui pertemuan/pembahasan virtual/daring. Tahun 2020 Pagu Anggaran tersedia sebesar Rp. 514.516.000,- Realisasi Rp. 499.874.900,- atau sebesar 97,15%, Capaian Realisasi kegiatan Penyusunan Rencana Makro penyelenggaraan Kehutanan sebanyak 1 Dokumen, dari target 1 Dokumen ( sebesar 100% dari target ) maka jika dilihat dari penggunaan anggaran dapat dikatakan cukup efisien.
- **Penyebab kegagalan/ hambatan :**  
 Kegiatan fasilitasi penyusunan RKTP sangat tergantung kepada komitmen Pemerintah Daerah untuk menyediakan acuan perencanaan kehutanan di daerah.
- **Kegiatan yang menunjang keberhasilan :**
    - Fasilitasi dan bimbingan teknis penyusunan RKTP;
    - FGD untuk menyamakan persepsi antara pusat dan daerah; dan Rapat koordinasi dengan para pihak.
- **Hasil (outcome) penting atas tercapainya output sasaran kinerja :**  
 Terdapat acuan atau pedoman perencanaan dalam pengelolaan dan pengurusan hutan di tingkat Provinsi sampai dengan tingkat tapak dalam jangka panjang sehingga rencana kawasan hutan

dan rencana pembangunan kehutanan dapat terlaksana secara sinergis dan harmonis antara Pusat/Nasional, Provinsi dan tapak.

• **Upaya perbaikan ke depan :**

- Meningkatkan koordinasi antara Pusat dan Daerah;
- Memberikan masukan kepada daerah agar menyediakan anggaran yang memadai untuk kegiatan penyusunan/revisi RKTP;
- Meningkatkan koordinasi dengan unit kerja yang berkepentingan dengan kawasan hutan di daerah;
- Meningkatkan anggaran kegiatan fasilitasi dan bimbingan teknis penyusunan RKTP;
- Bekerjasama dengan para pihak dan lembaga donor untuk mendukung proses penyusunan dan pengesahan RKTP.

Dokumentasi Kegiatan Fasilitasi Penyusunan RKTP di Provinsi Sumatera Utara



### **c. Sosialisasi Peraturan Bidang Perencanaan Kehutanan**

- **Capaian pelaksanaan kegiatan sampai dengan tahun berjalan dibandingkan dengan capaian target tahun sebelumnya :**
  - Pada tahun 2020, kegiatan fasilitasi RKTP dilaksanakan dilaksanakan di 8 (delapan) lokasi;
- **Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Bidang Perencanaan Kehutanan adalah sebagai berikut :**

Mempersiapkan bahan-bahan sosialisasi untuk disampaikan ke daerah baik melalui perjalanan dinas, rapat koordinasi, kunjungan pihak daerah ke Pusat maupun melalui fasilitas yang lain (pos, jasa titipan, dan email)
- **Pendukung efisiensi penggunaan anggaran :**

Selain penggunaan anggaran berasal dari APBN Murni dan Anggaran PNP; pelaksanaan sosialisasi melalui fasilitas yang lain seperti melalui website KLHK.
- **Penyebab kegagalan/hambatan :**
  - Keberhasilan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Bidang Perencanaan Kehutanan tergantung dari ketersediaan anggaran; antara lain untuk pengadaan bahan sosialisasi (penjilidan buku) dan perjalanan dinas serta kompetensi pegawai untuk mensosialisasikan peraturan.
  - Kurangnya antusiasme atau keingintahuan para pihak terhadap peraturan perencanaan kehutanan.
- **Kegiatan yang menunjang keberhasilan :**
  - Rapat koordinasi atau pertemuan dengan para pihak.
  - Pencetakan buku peraturan
  - Pengiriman materi sosialisasi berupa buku RKTN ke 34 propinsi

- 
- **Hasil (outcome) penting atas tercapainya output sasaran kinerja :**

Peraturan perencanaan kehutanan dapat diketahui oleh para pihak untuk dijadikan acuan atau pedoman.

- **Upaya perbaikan ke depan :**
  - Memperbanyak pertemuan atau rapat koordinasi di daerah untuk mensosialisasikan peraturan perencanaan kehutanan dengan mengundang para pihak yang berkepentingan dengan kehutanan
  - Mengirimkan bahan sosialisasi berupa buku RKTN ke instansi terkait lainnya
  - Membuka komunikasi dengan para pihak yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut terkait perencanaan kehutanan

- **Data Kegiatan Sosialisasi Peraturan Bidang Perencanaan Kehutanan:**

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Bidang Perencanaan Kehutanan dilakukan dalam rangka sosialisasi RKTN ke 8 lokasi, yaitu:

1. Sumatera Barat
2. Gorontalo
3. Sulawesi Barat
4. Jawa Tengah
5. Taman Nasional Ujung Kulon
6. Taman Nasional Gunung Halimun Salak
7. Bali
8. Bangka Belitung

#### **d. Pemantauan Rencana Kehutanan Pusat**

- Tahun 2020 merupakan awal tahun pelaksanaan Restra 2020-2024 maka pada tahun 2020 dilakukan kegiatan pemantauan

rencana kehutanan pusat dengan berdasarkan pada Renstra 2020-2024.

- **Uraian Penjelasan Capaian Realisasi :**

- Pada sub kegiatan pemantauan rencana kehutanan pusat, telah dilaksanakan pemantauan terhadap kesesuaian antara Renstra KLHK tahun 2020-2024 dengan RKTN 2011-2020 Revisi I.

- **Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Perencanaan Makro Kawasan Hutan mendukung KPH adalah sebagai berikut:**

- Pada sub kegiatan pemantauan rencana kehutanan pusat dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan eselon I terkait (Biro Perencanaan KLHK dan Bagian Program dan Evaluasi Setditjen Bidang Kehutanan lingkup KLHK)
  - b) Mengumpulkan data dan informasi baik secara langsung ke Eselon I terkait
  - c) Menganalisa data dan informasi secara *desk analysis*
  - d) Menyusun hasil analisa data dan informasi
  - e) Melakukan rapat pembahasan internal
  - f) Menyempurnakan hasil pemantauan
  - g) Menyampaikan hasil pemantauan Eselon I terkait dan melakukan diskusi
  - h) Menyusun laporan hasil pemantauan

- **Penyebab keberhasilan/ kegagalan:**

- Pelaksanaan sub kegiatan Pemantauan Rencana Kehutanan Pusat pada tahun 2020 dilaksanakan dalam bentuk pemantauan terhadap kesesuaian antara Renstra KLHK dengan RKTN 2011-2030 Revisi I, karena Renstra KLHK secara umum telah mencakup program dan kegiatan seluruh Eselon I lingkup KLHK.



- **Kegiatan yang menunjang keberhasilan:**
  - Komitmen daerah
  - Dukungan dari Eselon I terkait dalam penyampaian data dan informasi serta masukan dalam perbaikan hasil *desk analysis* pemantauan rencana kehutanan
- **Hasil (outcome) penting atas tercapainya output sasaran kinerja:**
  - RKTN 2011-2030 Revisi I telah dijadikan salah satu acuan dalam penyusunan Renstra KLHK 2020-2024.
- **Upaya perbaikan ke depan**
  - Akan dilaksanakan pemantauan secara berkala terhadap kesesuaian antara RKTN 2011-2030 dengan Renstra dan Renja Eselon I bidang Kehutanan lingkup KLHK
- **Pelaksanaan kegiatan dan penjelasannya**

Sub kegiatan Pemantauan Rencana Kehutanan pusat dilaksanakan melalui pemantauan secara *desk analysis* terhadap kesesuaian antara Renstra KLHK 2020-2024 dengan RKTN 2011-2030 Revisi I dan Rapat Pembahasan yang melibatkan 12 Eselon I bidang Kehutanan lingkup KLHK; yaitu Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal; Bagian Program dan Evaluasi Ditjen PKTL; Bagian Program dan Evaluasi Ditjen KSDAE; Bagian Program dan Evaluasi Ditjen PDASHL; Bagian Program dan Evaluasi Ditjen PSKL; Bagian Program dan Evaluasi Ditjen PHPL; Bagian Program dan Evaluasi Ditjen PPI; Bagian Program dan Evaluasi Ditjen Gakkum; Bagian Program dan Evaluasi Ditjen PPKL; Bagian Program dan Evaluasi BP2SDM; Bagian Program dan Evaluasi BLI; serta Inspektorat Wilayah I, II, III dan IV.

## Dokumentasi kegiatan Rapat Pembahasan Pematauan Rencana Kehutanan Pusat



### 9) Penyusunan Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan

Penyusunan Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan dilaksanakan pada tahun 2020 terhadap 1 (satu) dokumen Rencana Makro.

- **Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan adalah sebagai berikut :**
  - a) Membentuk Tim Kerja Penyusunan Rencana Makro yang akan Menyusun draft awal dokumen Rencana Makro.
  - b) Melakukan pembahasan dengan para pihak terkait dari Eselon I dan II lingkup KLHK untuk menjangring masukan yang diperlukan.
  - c) Melaksanakan Fokus Group Discussion atau Konsultasi Publik dengan mengundang para pihak dan narasumber.
  - d) Tim Pokja menyusun draft final Rencana makro untuk diusulkan pengesahannya
- **Pendukung efisiensi penggunaan anggaran :**

Penggunaan anggaran berasal dari APBN Murni, dan dukungan pembiayaan kegiatan dari GIZ Forclime.
- **Penyebab kegagalan / hambatan :**
  - Kurangnya komitmen para pihak untuk Menyusun Rencana Makro.

- Adanya pemikiran beberapa pihak bahwa suatu kegiatan dapat dilaksanakan tanpa perencanaan yang sistematis
- Kurangnya dukungan pimpinan
- Kurangnya anggaran
- **Kegiatan yang menunjang keberhasilan :**
  - Keberhasilan Kegiatan Penyusunan Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan bergantung dari kesamaan persepsi, data dan informasi, kompetensi Tim Pokja, masukan dari berbagai pihak, dan ketersediaan waktu para pihak untuk melakukan pembahasan bersama menyusun Rencana Makro.
  - Rapat koordinasi atau pertemuan dengan para pihak.
- **Hasil (outcome) penting atas tercapainya output sasaran kinerja :**
  - Rencana Makro akan menjadi acuan/pedoman jangka panjang bagi penyelenggara kehutanan dari Pusat sampai dengan Daerah.
- **Upaya perbaikan ke depan :**
  - Memperbanyak pertemuan atau rapat koordinasi antara Tim Pokja dan para pihak terkait.
  - Melibatkan pakar dalam penyusunan rencana makro
  - Komitmen pimpinan dalam mendukung tersusunnya rencana makro
- **Tabel Data hasil pelaksanaan kegiatan dan penjelasannya**
  - Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan yang telah tersusun pada tahun 2020 adalah Rencana Makro Rehabilitasi Hutan dan Lahan DAS



#### 10) Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi

Kegiatan Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi dilaksanakan sebagai bentuk pengendalian kesesuaian antara rencana pembangunan kehutanan (Renstra dan Renja) dengan rencana Kawasan Hutan (RKTN/RKTP) baik di pusat maupun di daerah sebagai upaya untuk mewujudkan keselarasan antara rencana kehutanan pusat dan daerah.

Tahun 2020 merupakan awal tahun pelaksanaan renstra 2020 sd 2024, pada tahun 2020 dengan capaian realisasi 100% dari target yang telah ditentukan pada tahun 2020.

##### • Uraian Penjelasan Capaian Realisasi :

Kegiatan Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi bertujuan untuk:

- a) Memantau Kesesuaian antara Rencana Kehutanan Provinsi (RKTN) dengan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTP).
- b) Memantau kesinambungan antara Kebijakan dan Strategi di dalam rencana kawasan hutan provinsi (RKTP) dengan

Program dan Kegiatan pada rencana pembangunan di provinsi (Renstra dan Renja).

- c) Mendapatkan data dan informasi mengenai pelaksanaan perencanaan kehutanan di provinsi
- d) Mendapatkan saran/masukan dan umpan balik (*feedback*) guna perbaikan rencana kegiatan kehutanan di tingkat nasional dan provinsi serta rencana pembangunan kehutanan.

Pada tahun 2020 telah dilaksanakan Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Propinsi secara *desk analysis* pada 17 propinsi, yaitu: 16 Propinsi yang telah memiliki RKTP yang telah disahkan melalui peraturan gubernur; dan 1 propinsi yang RKTPnya belum disahkan.

Dari 17 propinsi yang telah dilakukan pemantauan secara *desk analysis* dimaksud, telah dilaksanakan rapat pembahasan pada 7 propinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bangka Belitung, Bengkulu, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, sebagai bahan masukan terhadap 7 propinsi tersebut.

Rapat pembahasan terhadap 10 propinsi lainnya yang telah dipantau secara *desk analysis* akan dilaksanakan pada tahun 2021.

• **Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Propinsi adalah sebagai berikut :**

- a) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait di daerah
- b) Mengumpulkan data dan informasi baik secara langsung ke propinsi terkait maupun secara daring
- c) Menganalisa data dan informasi secara *desk analysis*
- d) Menyusun hasil analisa data dan informasi
- e) Melakukan rapat pembahasan internal
- f) Menyempurnakan hasil pemantauan

g) Menyampaikan hasil pemantauan ke provinsi terkait dan melakukan diskusi

h) Menyusun laporan hasil pemantauan

- **Pendukung efisiensi penggunaan anggaran:**

Pelaksanaan rapat pembahasan di daerah dapat dilaksanakan pada kantor BPKH wilayah setempat atau kantor Dinas Kehutanan di Daerah.

Tahun 2020 Pagu Anggaran tersedia sebesar Rp. 160.672.000,- Reallisasi Rp. 159.893.400,- atau sebesar 99,51%, Capaian Realisasi kegiatan Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi sebanyak 1 dokumen, dari target 1 dokumen ( sebesar 100% dari target ) maka jika dilihat dari penggunaan anggaran dapat dikatakan cukup efisien.

- **Penyebab keberhasilan/ kegagalan:**

Pelaksanaan kegiatan pada tahun 2020 mendapatkan kendala terutama terkait adanya pandemi COVID 19 sehingga diberlakukannya PSBB yang berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan rapat pembahasan. Namun demikian, hal ini dapat diatasi dengan pelaksanaan rapat secara daring dan luring.

- **Kegiatan yang menunjang keberhasilan:**

Tidak seperti tahun sebelumnya, mulai tahun 2020 pelaksanaan pemantauan rencana kegiatan kehutanan propinsi dimulai dengan pemantauan secara *desk analysis* terlebih dahulu, sehingga pada saat pemantauan ke daerah, telah ada hasil pemantauan pendahuluan yang dapat menjadi masukan bagi propinsi dalam perbaikan rencana kegiatan kehutanan tahun berikutnya baik rencana pembangunan (renstra dan renja) maupun rencana kawasan hutan (revisi RKTP)

- **Hasil (outcome) penting atas tercapainya output sasaran kinerja:**

*Terwujudnya kesinambungan antara perencanaan kehutanan di tingkat pusat dengan perencanaan kehutanan di daerah.*

Berdasarkan hasil diskusi pada rapat pembahasan yang dilaksanakan pada 7 propinsi dimaksud, hampir semua propinsi bersedia untuk melakukan perbaikan/merevisi terhadap RKTP yang telah disusun dan disahkan sebelumnya dengan mengacu pada RKTN 2011-2030 Revisi I

- **Upaya perbaikan ke depan**

- 1) Guna mengoptimalkan hasil (outcome) dalam kegiatan pemantauan rencana kegiatan kehutanan propinsi, maka akan dilaksanakan pemantauan secara berkala ke semua propinsi di Indonesia dengan menyesuaikan ketersediaan anggaran dan SDM, dan diutamakan dilaksanakan pada propinsi yang telah memiliki RKTP yang telah disahkan melalui Peraturan Gubernur. Hal ini dilakukan agar semua propinsi berkenan merevisi RKTP dengan mengacu pada RKTN 2011-2030 Revisi I
- 2) Pada tahun 2021 akan dilaksanakan pemantauan secara desk analysis semua pada propinsi yang telah memiliki RKTP, namun belum dipantau pada tahun 2020. Disamping itu juga akan dilaksanakan diskusi (rapat pembahasan) pada 10 propinsi yang telah dipantau secara *desk analysis* dan pemantauan hingga ke tingkat tapak (KPH) pada beberapa propinsi terpilih guna melihat kesesuaian antara RKTN, RKTP dan RPHJP.

- **Tabel Data hasil pelaksanaan kegiatan dan penjelasannya**

*Tabel 19 : Monitoring Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Propinsi hingga tahun 2020*

NO	PROPINSI	RKTP	DESK ANALYSIS	DIBAHAS <sup>1)</sup>	KET <sup>**1</sup>
1	D.I. Yogyakarta	Telah disahkan	Sudah	Sudah	
2	Kalimantan Timur	Telah disahkan	Sudah	Belum	2021
3	Jawa Tengah	Telah disahkan	Sudah	Sudah	
4	Sumatera Barat	Telah disahkan	Sudah	Belum	2021
5	Jawa Timur	Telah disahkan	Sudah	Belum	2021
6	Nusa Tenggara Barat	Telah disahkan	Sudah	Sudah	Baru dibahas internal dengan Dishut NTB
7	Sulawesi Tengah	Telah disahkan	Sudah	Belum	2021
8	Bengkulu	Telah disahkan	Sudah	Sudah	
9	Nusa Tenggara Timur	Telah disahkan	Sudah	Sudah	
10	Jawa Barat	Telah disahkan	Sudah	Sudah	
11	Bangka Belitung	Telah disahkan	Sudah	Sudah	
12	Gorontalo	Telah disahkan	Belum	Belum	
13	Sulawesi Barat	Telah disahkan	Belum	Belum	
14	Bali	Telah disahkan	Sudah	Belum	2021
15	Kalimantan Selatan	Telah disahkan	Sudah	Belum	2021
16	Sulawesi Tenggara	Telah disahkan	Sudah	Belum	2021
17	Sulawesi Utara	Telah disahkan	Sudah	Belum	2021
18	Kalimantan Barat	Telah disahkan	Sudah	Belum	2021
19	Maluku Utara	Telah disahkan	Belum	Belum	
20	Sulawesi Selatan	Telah disahkan	Sudah	Belum	2021
21	Sumatera Utara	Proses Pengesahan	Belum	Belum	
22	Banten	Proses Pengesahan	Belum	Belum	
23	Lampung	Proses Pengesahan	Belum	Belum	
24	Kalimantan Tengah	Proses Penyempurnaan	Belum	Belum	
25	Jambi	Proses Penyempurnaan	Belum	Belum	
26	Riau	Proses Penyempurnaan	Belum	Belum	
27	Papua Barat	Proses Penyempurnaan	Belum	Belum	
28	DKI Jakarta	Proses Penyusunan	Belum	Belum	
29	Sumatera Selatan	Proses Penyusunan	Belum	Belum	
30	Kalimantan Utara	Proses Penyusunan	Belum	Belum	
31	Papua	Proses Penyusunan	Belum	Belum	
32	Aceh	Proses Penyusunan	Belum	Belum	
33	Maluku	Proses Penyusunan	Belum	Belum	
34	Kepulauan Riau	Proses Penyusunan	Belum	Belum	

Catatan: <sup>1)</sup> Pembahasan dilakukan dengan melibatkan instansi terkait bidang Kehutanan di tingkat Propinsi seperti UPT KLHK, Bappeda, PUPR, dll.

<sup>\*\*1)</sup> Pembahasan direncanakan akan dilaksanakan pada tahun

- Dokumentasi  
Rapat Pembahasan Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Propinsi Jawa Tengah, Bengkulu dan NTT





## **11) Implementasi Forest Investment Program-Project 2 (FIP)**

Tahun 2020 merupakan awal tahun pelaksanaan renstra 2020 sd 2024, pada tahun 2020 dengan capaian realisasi 1 Laporan dari target 1 Laporan. Pelaksanaan Proyek II FIP Tahun 2020 agak berbeda dari tahun sebelumnya, dimana ada beberapa isu penting yang terjadi, antara lain:

1. Perpindahan EA dari Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan kepada Sekjen KLHK berdasarkan hasil PSC Meeting ke IV tanggal 13 Desember 2019.
2. Hasil *Mid Term Review* (MTR) yang berdampak pada penyesuaian perencanaan kegiatan tahun 2020 dan 2021.
3. Terbitnya SK Sekjen KLHK Nomor: SK. 13/SETJEN/ROKLN/KLN.0/3/2020 tanggal 3 Maret 2020 tentang Penetapan Ditjen PHLP sebagai EA Baru dan Dit. KPHP sebagai Pelaksana Harian Proyek II FIP.
4. Tidak diberikannya persetujuan NOL AWP atas pelaksanaan komponen 1 Tahun 2020, sehingga pelaksanaan kegiatan dan anggaran tersebut tidak bisa dilaksanakan walaupun anggaran tersebut terdapat pada DIPA Ditjen PKTL Tahun 2020.
5. Kejadian Pandemi COVID-19 sejak Bulan Maret 2020 berdampak pada pelaksanaan kegiatan sehingga dilakukan penyesuaian kegiatan dan optimalisasi penggunaan anggaran khususnya yang melibatkan banyak personil.
6. Penyesuaian pekerjaan safeguard dan GRM yang sebelumnya dikerjakan oleh konsultan firma (kontrak dihentikan sementara pertanggal 31 Juli 2019), di tahun 2020 hal tersebut dikerjakan oleh konsultan individu.

7. Dalam hal proyek diperpanjang, disusun kerangka Restrukturisasi proyek berdasarkan penyesuaian capaian PDO dan sisa dana Hibah.

Uraian Penjelasan Capaian Realisasi : Proyek II FIP Tahun 2020 pada Dit. RPP mencakup komponen 4 yaitu implementasi proyek. Dimana kegiatan dan anggaran digunakan dalam mendukung kegiatan *Project Management Unit* (PMU), *Project Coordinator Unit* (PCU), dan *Supporting Unit* (SU) di 10 KPH target proyek.

• **Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Implementasi Forest Investment Program-Project 2 (FIP) adalah sebagai berikut :**

1. Fasilitasi penyusunan rencana kegiatan tahun 2020 berdasarkan hasil MTR dengan tetap mengacu pada alur kebijakan pemerintah dan target pencapaian PDO serta realisasi pelaksanaan kegiatan.
2. Fasilitasi pengajuan AWP Tahun 2020 dalam rangka persetujuan NOL dari Bank Dunia.
3. Pendampingan pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada EA baru khususnya dalam monitoring pekerjaan konsultan baik di pusat maupun di daerah, fasilitasi penyusunan laporan bi-annual, pengadaan barang/jasa, pembayaran dan penyusunan dokumen pertanggungjawaban serta penyelesaian isu implementasi proyek.
4. Melakukan komunikasi dan koordinasi aktif kepada EA dan para IA Proyek II FIP.
5. Melakukan perbaikan, optimalisasi dan penyesuaian atas pelaksanaan implementasi proyek.

- **Pendukung efisiensi penggunaan anggaran:**

Besar anggaran HLN pada DIPA Ditjen PKTL tahun 2020 memang lebih kecil dari pada anggaran yang tertera pada AWP 2020. Akan tetapi dalam pelaksanaannya penggunaan anggaran tersebut sangat efektif dan optimal dengan mempertimbangkan prioritas kegiatan serta penyesuaian terhadap Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka pencegahan penularan COVID-19.

Tahun 2020 Pagu Anggaran tersedia sebesar Rp. 20.100.000.0000,- Realisasi Rp. 18.690.588.255,- atau sebesar 92,98%,Capaian Realisasi Kegiatan Forest Investment Program-Project 2 (FIP) sebanyak 1 Laporan dari target 1 Laporan ( sebesar 100% dari target ) maka jika dilihat dari penggunaan anggaran dapat dikatakan cukup efisien.

- **Penyebab keberhasilan/kegagalan:**

- 1) Tidak adanya persetujuan NOL atas pelaksanaan komponen 1 dari pihak Bank Dunia.
- 2) Komunikasi yang efektif dan efisien antar EA/IA, PMU, PCU dan SU serta pihak lain yang terkait.

- **Hasil (outcome) penting atas tercapainya output sasaran kinerja:**

Hasil kegiatan komponen 1 tahun 2020 adalah pendampingan atas tugas dan fungsi EA Baru atas pelaksanaan kegiatan Implementasi Proyek oleh PMU, PCU dan SU baik meliputi capaian volume pekerjaan maupun outcome terhadap keberhasilan pelaksanaan implementasi proyek.

- ❖ Capaian terhadap Outcomes :

- ✓ Pengaturan UPTD KPH secara fungsional harus merealisasikan praktek pengelolaan hutan lestari dengan prestasi nyata di lapangan yaitu tegakan hutan berkualitas, pendapatan masyarakat meningkat dan investasi kehutanan meningkat.

- ✓ Masyarakat sebagai subyek dalam operasionalisasi UPTD KPH melalui Program Perhutanan Sosial dan kegiatan usaha tani hutan perlu pengaturan bagi hasil yang adil sesuai dengan potensi resiko yang ditanggungnya.
- ✓ Kegiatan Rehabilitasi Hutan Lahan (RHL) merupakan kegiatan investasi pemerintah wajib berada di dalam areal kerja di KPH.
- ✓ Dalam sistem akuntansi yg sedang dikembangkan, tegakan hutan dikategorikan sebagai aset biologi (biological asset), maka pembiayaan Rehabilitasi Hutan Lahan (RHL) dari belanja barang menjadi belanja modal. Untuk itu perlu diatur mekanisme hibah tanaman RHL hibah agar dapat menjadi aset UPTD KPH.
- ✓ Anggaran pemerintah sangat terbatas, investasi masyarakat perlu dijamin keamanan investasi dan kepastian usaha pada usaha kehutanan.
- ✓ Untuk mengatasi keterbatasan SDM, pembiayaan dan data informasi serta untuk kemandirian UPTD KPH perlu mewujudkan sebagai UPTD KPH BLUD.
- ✓ Merangkai mata rantai hubungan Pusat, Provinsi dan UPTD KPH dalam hubungan kewenangan, tupoksi, SDM, keuangan, pengawasan dan pemanfaatan SDH.
- ✓ Dengan disusunnya konsep – konsep manual/petunjuk kerja/alat kelengkapan kerja/toolkit, maka UPTD KPH dapat mendukung pelaksanaan praktek pengelolaan hutan lestari.

- **Upaya perbaikan ke depan**

Terhadap hasil kegiatan tahun 2020 akan digunakan oleh khususnya EA Baru dan umumnya pelaksana proyek baik di tingkat pusat maupun daerah. Kegiatan yang direncanakan pada tahun berikutnya yaitu dilakukan serangkaian kegiatan melalui rapat, FGD dan dialog

yang melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan untuk berkontribusi dan berpartisipasi dalam penyusunan dan pencetakan manual teknis pengelolaan hutan oleh KPH.

## **12) Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa**

Tahun 2020 merupakan awal tahun pelaksanaan renstra 2020 sd 2024, pada tahun 2020 dengan capaian realisasi 4 dokumen dari target 4 dokumen.

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan di 4 provinsi : yakni Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Indikator kinerja penyiapan data areal Perhutanan Sosial Jawa masing-masing tahun telah tercapai sesuai target yaitu sebanyak 4 dokumen. Dengan demikian kesuaian target indikator kinerja kegiatan untuk terwujudnya sasaran ini sebesar 100% dan termasuk dalam kriteria **sangat baik**.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya dukungan terhadap skema perhutanan sosial yang sesuai diimplementasikan di Pulau Jawa sebagaimana mandat Peraturan Menteri LHK Nomor: 39/MenLHK/Setjen/ Kum.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani.

Maksud penyusunan laporan kegiatan Penyediaan Data Perhutanan Sosial Jawa ini untuk mendukung program perhutanan sosial Pulau Jawa pada areal kerja Perum Perhutani dalam rangka mewujudkan tujuan reforma agraria. Sedangkan tujuan untuk menyajikan data areal perhutanan sosial jawa sebagai bahan masukan bagi dasar penerbitan ijin perhutanan sosial, revisi Peta PIAPS dan perbaikan tata kelola hutan oleh Perum Perhutani.

- **Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa**

Kegiatan teknis utama penyiapan data perhutanan sosial yakni pengumpulan data perhutanan sosial Jawa yang didukung oleh beberapa komponen pendukung kegiatan lainnya. Secara rinci diuraikan sebagai berikut :

- a) Tahap Persiapan

Tahap persiapan meliputi persiapan administrasi dan teknis. Persiapan administrasi meliputi kegiatan persiapan guna mendukung kegiatan pengumpulan data areal perhutanan sosial berjalan tertib administrasi , antara lain : pembuatan Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perjalanan Dinas (SPD), surat pengantar ke instansi terkait, kelengkapan administrasi keuangan (blanko rincian perjalanan/kwitansi/materai). Persiapan teknis berupa pengumpulan data dan informasi awal sebagai bahan analisis dalam penentuan lokasi Perhutanan Sosial Jawa dilakukan melalui konfirmasi data dengan instansi terkait dan atau mengundang para wali data dari untuk dibahas dan dianalisis., termasuk pembuatan peta kerja .

- b) Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan meliputi analisis data spasial dan pengecekan lapangan dalam rangka pengumpulan data perhutanan sosial. Analisis data spasial dilakukan dengan melakukan *overlay* data dan informasi yang telah diperoleh untuk memperoleh lokasi perhutanan sosial yang ideal. Adapun kriteria utama lokasi perhutanan sosial tersebut sebagaimana termuat dalam pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017. Sedangkan pengecekan lapangan dalam rangka pengumpulan data perhutanan sosial Jawa dilaksanakan dengan metode sampling tutupan lahan dan melakukan observasi lapangan untuk mengetahui kondisi aktual lokasi perhutanan sosial. Observasi dilakukan dengan mengamati

kondisi fisik lapangan, dan penutupan/vegetasi. Apabila dimungkinkan dilakukan pengumpulan data dengan metode pemetaan fotogrametri yakni melakukan perekaman data dengan menggunakan *drone*.

Keberhasilan implementasi kegiatan penyediaan data perhutanan sosial Jawa disebabkan beberapa hal antara lain:

- Dukungan sumberdaya berupa: sumberdaya manusia (SDM), finansial, dan peralatan. Ketersediaan kualifikasi SDM yang memiliki kualifikasi teknis dibidang Perencanaan, Sistem Informasi Geografis (SIG) dan survey terestis merupakan faktor utama keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini. Disamping itu, adanya dukungan finansial dan peralatan seperti ketersediaan alat GPS (*Global Position System*), *drone*, dan instrumen pemetaan merupakan faktor pendukung lainnya.
- Terjalannya koordinasi yang baik antara pelaksana kegiatan dengan pemohon/pengusul perhutanan sosial, pendamping, Ditjen PSKL, Perum Perhutani, instansi terkait di daerah, dan para pihak lainnya lainnya.

- **Pendukung efisiensi penggunaan anggaran:**

Kegiatan Penyusunan Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa Tahun 2020 didanai dari APBN Murni dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 572.860.000,- Realisasi sebesar Rp. 554.886.648,- ( 96,86%), realisasi output 1 dokumen dari target 1 dokumen ( realisasi sebesar 100% ), maka jika dilihat dari penggunaan anggaran dapat dikatakan cukup efisien.

- **Kegiatan yang menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan penyediaan perhutanan sosial Jawa, antara lain:**

- 1) Adanya rapat persiapan pelaksanaan kegiatan sebelum pelaksanaan kegiatan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pengumpulan data, termasuk didalamnya penalahaan terhadap kondisi penutupan lahan.



2) Adanya Evaluasi pasca pelaksanaan kegiatan pengumpulan data.

3) Adanya kegiatan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

• **Hasil (*outcome*) penting atas tercapainya *output* sasaran kegiatan**

Tersedianya data perhutanan sosial wilayah jawa berupa data penutupan lahan yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan sebagai salah satu pertimbangan penerbitan skema-skema perijinan Perhutanan Sosial, perbaikan revisi PIAPS, dan perbaikan tata kelola hutan Perum Perhutani untuk lebih mengedepankan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan.

Pandemic COVID-19 berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan penyediaan data perhutanan sosial Jawa. Adanya pandemic tersebut menyebabkan pelaksanaan kegiatan kurang berjalan lancar terutama pada bulan-bulan awal tahun 2020, sebelum diberlakukannya *new normal* (era baru). Disamping pandemic tersebut permasalahan lapangan seperti : kondisi lapangan, cuaca, dan tenaga teknis masih menjadi permasalahan meskipun bukan permasalahan yang krusial.

• **Upaya ke depan agar pelaksanaan kegiatan ini berjalan secara efektif dan efisien, dilakukan hal-hal sebagai berikut :**

1. Pemilihan lokasi pengumpulan data areal perhutanan sosial yang merupakan lokasi yang berada bukan pada zona mereka, kecuali apabila lokasi yang merupakan permintaan khusus dari Ditjen PSKL untuk segera dilakukan tafsir penutupan lahan yang memerlukan kegiatan pengumpulan data ke lapangan.
2. Mempersiapkan perencanaan pelaksanaan kegiatan dengan matang, untuk mengantisipasi kemungkinan cuaca dan kondisi lapangan yang berat
3. Koordinasi dengan Eselon II lainnya untuk permintaan tenaga yang mempunyai kemampuan teknis di lapangan .

Upaya kedepan berupa tertibnya penjadwalan dan penentuan lokus kegiatan penyediaan data Perhutanan Sosial sehingga kegiatan berjalan lebih efektif dan efisien.

Tabel 20 : Data hasil pelaksanaan kegiatan Perhutanan Sosial

No	Desa	Kec	Kab	Provinsi	Pengusul/PIAPS	Tindak Lanjut
1	Desa Lengkong	Lengkong	Sukabumi	Jawa Barat	Gapoktan Jagapatrah	S.356/REN/RKH/Pla.0/6/2020
2	Desa Lengkong	Lengkong	Sukabumi	Jawa Barat	Gapoktan Jagapatrah	S.356/REN/RKH/Pla.0/6/2020
3	Desa Ciguba	Sukanegara	Cianjur	Jawa Barat	KTH Cegah Rimba Tani	S.356/REN/RKH/Pla.0/6/2020
4	Desa Tanjung Jaya	Banjarwangi	Garut	Jawa Barat	KTH Sadagoni	S.423/REN/RKH/Pla.0/7/2020
5	Desa Csangkal	Cihurip	Garut	Jawa Barat	LMDH Rindu Alam	S.581/REN/RKH/Pla.0/9/2020
6	Desa Lamarantarung	Cantigi	Indramayu	Jawa Barat	PIAPS	
7	Desa Cikawung	Trisi	Indramayu	Jawa Barat	PIAPS	
8	Cikawung	Trisi	Indramayu	Jawa Barat	PIAPS	
9	Desa Simajaya	Csurupan	Garut	Jawa Barat	LMDH Keramat Jaya	
10	Desa Garumukti	Pamulihan	Garut	Jawa Barat	PIAPS	
11	Desa Mekarwangi	Cihurip	Garut	Jawa Barat	KTH Wangi Lestari	S.824/REN/RKH/Pla.0/12/2020
12	Desa Mekarwangi	Cihurip	Garut	Jawa Barat	KTH Sugah Muati	S.824/REN/RKH/Pla.0/12/2020
13	Desa Mekarwangi	Cihurip	Garut	Jawa Barat	KTH Giri Tani Gunung Kuda	S.824/REN/RKH/Pla.0/12/2020
14	Desa Waringin Jaya	Cigeulis	Pandeglang	Banten	PIAPS	PIAPS
15	Desa Cibaling	Cibaling	Pandeglang	Banten	PIAPS	PIAPS
16	Desa Sudimanik	Cibaling	Pandeglang	Banten	PIAPS	PIAPS
17	Desa Nanggala	Cikurik	Pandeglang	Banten	PIAPS	PIAPS
18	Desa Karang Sari	Brati	Grobogan	Jawa Tengah	LMDH Sido makmur	S.423/REN/RKH/Pla.0/7/2020
19	Desa Karang Sari	Brati	Grobogan	Jawa Tengah	LMDH Sido makmur	S.423/REN/RKH/Pla.0/7/2020
20	Desa Genduren	Purwojati	Banyumas	Jawa Tengah	LMPHD Genduren	S.581/REN/RKH/Pla.0/9/2020
21	Desa Grugu	Kawunganten	Cilacap	Jawa Tengah	PIAPS	
22	Desa Brangun	Bantarsari	Cilacap	Jawa Tengah	PIAPS	
23	Desa Kaljeruk	Kawunganten	Cilacap	Jawa Tengah	PIAPS	
24	Desa Gondang	Subah	Kendal	Jawa Tengah	PIAPS	
25	Desa Jengkuharjo	Tanggung Gunung	Tulungagung	Jawa Timur	KTH Sanggar Bersatu	S.356/REN/RKH/Pla.0/6/2020

Sumber : Data Subdit Rencana Kawasan Hutan

## Dokumentasi kegiatan Penyusunan Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa



### B. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun 2020, besar anggaran yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan tertuang dalam DIPA Kantor Pusat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang telah disahkan tanggal 12 Nopember 2019, yang terdiri dari sumber dana APBN sebesar Rp.6.632.599.000,- dan dana Hibah Luar Negeri sebesar Rp.20.100.000.000,-.

Sampai dengan akhir tahun 2020 realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan adalah sebesar 93,79% dan capaian kinerja rata2

100%, dengan demikian efisiensi sumberdaya pendukung dilakukan dengan sangat baik dan dengan skala ordinary capaian kinerja sangat baik pula. Hal ini disebabkan Direktorat Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan memiliki 2 (dua) sumber anggaran yaitu APBN dan HLN dengan rincian sebagai berikut :

Pagu APBN :

- Jumlah Pagu Anggaran Rp. 6.632.599.000,-
- Realisasi Anggaran (Netto) Rp. 6.381.053.163,- (96,21%)

Sedangkan yang bersumber dari Hibah Luar Negeri dengan rincian :

- Jumlah Anggaran Rp. 20.100.000.000-
- Realisasi Anggaran Rp. 18.690.588.255,- (92,99%)

kegiatan HLN terdapat deviasi keuangan sebesar 7,01%. Ada beberapa kegiatan yang tidak dapat diselesaikan secara maksimal dikarenakan pelaksanaan kegiatan tergantung *Annual Work Planning /AWP*) dari Bank Dunia dan usulan penghematan kegiatan Pengembangan efektivitas pelaksanaan pengukuhan dan penggunaan lahan dalam dan sekitar KPH tidak mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Anggaran, sehingga mempengaruhi persentase capaian realisasi DIPA tahun 2020

Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan TA. 2020 per kegiatan adalah sebagai Berikut :

Tabel 21 : Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran TA.2020

No	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran sd bulan Desember 2020	Realisasi (%)
1	Penelaahan dan Pemantauan Penggunaan Kawasan Hutan	1.072.870.000	1.057.072.610	98.52
2	Pemantauan Pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%	764.124.000	751.537.767	98.35
3	Penyusunan Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP	692.285.000	652.128.317	94.19
4	Analisis Kelayakan Perencanaan	319.250.000	293.923.000	92.06

No	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran sd bulan Desember 2020	Realisasi (%)
	Ruang Kawasan Hutan			
5	Fasilitasi Penataan Ruang kawasan hutan dalam rangka review RTRWP	484.952.000	457.170.940	94,27
6	Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi, Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	508.581.000	506.997.350	99,68
7	Penyusunan/update peta arahan pemanfaatan hutan mendukung KPH	174.820.000	156.090.200	89,28
8	Pengendalian Perencanaan Makro Kawasan Hutan Mendukung KPH	585.783.000	584.411.800	99,76
9	Penyusunan Rencana Makro penyelenggaraan Kehutanan	514.516.000	499.874.900	97,15
10	Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi	160.672.000	159.893.400	99,51
11	Forest Investment Program-Project 2 (FIP)	20.100.000.000	18.690.588.255	92,98
12	Penyusunan Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa	572.860.000	554.886.648	96,86
13	Layanan Perkantoran	781.886.000	707.066.231	90,43
	TOTAL	26.732.599.000	25.071.641.418	93,79

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja antara lain, sebagai berikut:

1. Metode pencairan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan sehingga beberapa kegiatan yang tidak dapat direalisasikan, khusus untuk bantuan Hibah Luar Negeri proses pencairan anggaran tergantung *Annual Work Planning (AWP)* dari Bank Dunia.
2. Penyelesaian administrasi SPJ lebih dari 5 hari kerja setelah kegiatan selesai menyebabkan terhambatnya penyediaan pendanaan untuk kegiatan selanjutnya,
3. Keterbatasan SDM yang mempunyai kemampuan dalam hal teknis dan keuangan.
4. Terbatasnya SDM/Pegawai yang menguasai GIS.

5. Adanya pandemic Covid-19 menyebabkan kegiatan terhambat karena adanya PSBB

Adapun upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut antara lain :

1. Perlunya perencanaan dan pengaturan metode pencairan dana kegiatan.
2. Mempercepat proses penyelesaian SPJ sesuai dengan tata waktu.
3. Pemberdayaan seluruh SDM dengan pembagian tugas dan tanggung jawab pada setiap individu secara proporsional sesuai kemampuannya.
4. Perlu dilakukan pelatihan dan/atau penambahan pegawai yang ahli dalam mengoperasikan GIS
5. Melakukan revisi dan penghematan anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi Covid-19

## **IV. PENINGKATAN AKUNTABILITAS INSTANSI**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Dengan adanya pemahaman tentang SAKIP diharapkan *“berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan dalam akhir periode bisa tercapai”*.

SAKIP diimplementasikan secara *“self assesment”* oleh masing-masing instansi pemerintah, ini berarti instansi pemerintah secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Pelaksanaan system dengan mekanisme semacam ini memerlukan evaluasi dari pihak yang lebih independen agar diperoleh umpan balik yang obyektif untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan hasil pemantauan Inspektorat Jenderal KLHK, pada tahun 2019 Direktorat Rencana, Penggunaan, Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan mendapatkan nilai SAKIP sebesar 78,80 dengan kategori BB (SANGAT BAIK), yang bermakna perlu sedikit perbaikan.

Beberapa hal yang harus diperbaiki adalah Laporan Kinerja Tahun 2019 yang perlu disempurnakan agar lebih informatif. Rekomendasi perbaikan ini telah ditindaklanjuti sepenuhnya oleh Direktorat Rencana, Penggunaan, Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan. Untuk itu diharapkan pada tahun 2020 Direktorat Rencana, Penggunaan, Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan dapat memperoleh nilai SAKIP yang lebih besar atau minimal sama.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas instansi ini, data realisasi anggaran dan pelaporan kinerja Direktorat Rencana, Penggunaan, Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan secara periodik dilaporkan setiap bulan dengan menginput data capaian keluaran/output *online* melalui Aplikasi *SMART* (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan) yang digunakan sebagai bahan masukan penyusunan kebijakan tahun anggaran berikutnya. Selain itu juga dilakukan penginputan data pencapaian kinerja setiap triwulan *online* melalui aplikasi *e-Monev* (Sistem Monitoring dan Evaluasi) Bappenas.

Sesuai hasil Reviu LKjIP oleh Inspektorat Jenderal KLHK RI pada Direktorat RPPWPH tahun 2019 lalu, bahwa Laporan Kinerja belum menyajikan informasi keuangan setiap sasaran kinerja instansi. Dalam laporan kinerja informasi yang termuat berupa sumber dana, pagu anggaran, dan realisasi anggaran secara keseluruhan (total), dan sebagai tindak lanjut hasil reviu tersebut telah kami jelaskan besaran anggaran dan realisasinya pada setiap sasaran kinerja sebagaimana tercantum pada BAB III huruf e , " Evaluasi dan Analisis Capaian" dan pada Tabel 21 : "Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran TA.2020" .



## V. PENUTUP

Dari hasil evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan, dimana Rencana Kerja Tahun 2020 yang dituangkan dalam DIPA Tahun 2020 yang memuat rencana kegiatan, sasaran/keluaran serta indikator kegiatan dan unit-unit kegiatan yang dapat mencerminkan pencapaian realisasi di tahun 2020 dalam mendukung tercapainya sasaran dan tujuan yang tercantum dalam Renstra, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan rencana kerja tahun 2020, 4 ( empat ) sasaran kegiatan yang diemban oleh Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan secara global mempunyai nilai kinerja '**Sangat Baik**' hal ini terlihat dari 13 unit kegiatan yang tercapai rata-rata capaian outputnya 100% dengan realisasi anggaran (netto) sebesar 93,79%.
2. Tercapainya kategori "Sangat Baik" ini diharapkan dapat dipertahankan mengingat pada tahun 2020 ini merupakan awal periode Renstra 2020-2024 dan kegiatan sudah didukung dengan Penetapan Kinerja dan Sasaran Kerja Pegawai untuk pelaksanaan kegiatan yang lebih terencana dan terarah serta akuntabel.
3. Dalam mengusulkan anggaran pada tahun anggaran berikutnya tetap perlu diperhatikan bahwa kegiatan yang diusulkan haruslah tercantum dalam dokumen rencana Kerja pada tahun yang bersangkutan, sehingga diharapkan sasaran yang direncanakan pada tahun tersebut merupakan sarana yang tepat untuk mendukung tercapainya sasaran dan tujuan yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada tahun berjalan.

Lampiran 1 : Penyusunan dan Update Peta Arah Pemanfaatan Hutan pada 34 provinsi Tahun 2020

BPS	Provinsi	PIAPS REVISI V			ARAHAN PEMANFAATAN HP 2020			Jumlah Arah Pemanfaatan (2+3+4+5+6)
		Definitif PS (1)	Pencadangan (2)	Potensi (3)	Hutan Alam (4)	Hutan Tanaman (5)	Restorasi (6)	
11	Aceh	92.054	329.263	22.990	-	-	13.481	365.734
12	Sumatera Utara	55.138	464.971	42.406	-	-	6.493	513.871
13	Sumatera Barat	194.169	438.167	24.018	-	-	-	462.185
14	Riau	75.610	197.959	1.008.863	-	-	52.431	1.259.253
15	Jambi	153.563	111.918	52.940	-	35.443	23.758	224.058
16	Sumatera Selatan	73.173	210.466	20.434	-	8.177	-	239.076
17	Bengkulu	22.236	94.970	-	-	-	-	94.970
18	Lampung	67.758	134.483	35.508	-	-	-	169.991
19	Kepulauan Bangka Belitung	32.194	39.399	66.763	-	16.191	22	122.374
21	Kepulauan Riau	10.967	27.923	96.202	-	-	-	124.125
32	Jawa Barat	13.075	-	-	-	-	-	-
33	Jawa Tengah	13.265	-	-	-	-	-	-
34	Yogyakarta	-	1.865	-	-	-	-	1.865
35	Jawa Timur	61.090	-	-	-	-	-	-
36	Banten	2.985	-	-	-	-	-	-
51	Bali	12.320	1.547	-	-	-	-	1.547
52	Nusa Tenggara Barat	6.380	250.435	27.946	-	-	52.217	330.599
53	Nusa Tenggara Timur	38.106	236.663	232.088	-	30.958	-	499.710
61	Kalimantan Barat	356.191	545.549	541.423	159.027	231.982	90.944	1.568.924
62	Kalimantan Tengah	223.548	545.385	300.438	12.980	40.304	293	899.400
63	Kalimantan Selatan	47.376	69.085	18.142	-	15.242	-	102.469
64	Kalimantan Timur	210.931	309.657	155.400	104.041	36.658	79.205	684.961
71	Kalimantan Utara	4.428	75.935	15.750	61.027	-	-	152.712
72	Sulawesi Utara	61.877	211.432	111.851	146.234	-	-	469.517

BPS	Provinsi	PIAPS REVISI V			ARAHAN PEMANFAATAN HP 2019			Jumlah Arahan Pemanfaatan (2+3+4+5+6)
		Definitif PS (1)	Pencadangan (2)	Potensi (3)	Hutan Alam (4)	Hutan Tanaman (5)	Restorasi (6)	
73	Sulawesi Tengah	93.881	175.087	2.506	-	-	8.573	186.166
74	Sulawesi Selatan	59.410	178.475	79.218	31.178	27.330	136.420	452.621
75	Sulawesi Tenggara	15.953	28.182	4.048	18.426	6.351	-	57.008
76	Gorontalo	22.566	73.064	9.027	-	-	-	82.091
81	Sulawesi Barat	131.920	16.855	82.677	280.212	88.687	68.735	537.166
82	Maluku	59.408	85.492	30.965	127.322	18.419	10.823	273.021
91	Maluku Utara	48.911	69.791	517.726	133.694	47.007	-	768.218
92	Papua Barat	56.312	221.733	2.084.824	459.624	132.131	578.093	3.476.405
	<b>Jumlah</b>	<b>2.316.795</b>	<b>5.145.751</b>	<b>5.584.153</b>	<b>1.533.764</b>	<b>734.880</b>	<b>1.121.488</b>	<b>-</b>

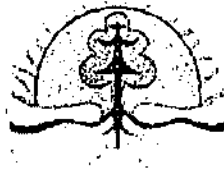
Sumber : Seksi Alokasi dan Pemanfaatan SDH , Subdit Pembentukan Wilayah dan Alokasi PSDH

## LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Rencana Kerja (Perubahan) Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2020

Kegiatan/IKK/Output/Sub Output/Komponen	Sasaran Kegiatan	TARGET-Sasaran	Alokasi (Rupia/Rupiah)	Lokasi	Kategori Prioritas	Program Prioritas	Pelaksanaan Nasional	Nawacita	1000 Jari Persegi	Debu (Tamanik)	Meningkatkan Regulasi
<p><b>1.</b></p> <p><b>01-Tersedianya Peta Penetapan dan Keberhasilan KPH</b></p> <p>002-Peta Renvisi atau Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Renvisi RPHUP</p> <p>Tanggap Sub Out Put</p> <p>051-Penyusunan Peta Renvisi atau Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Renvisi RPHUP</p>	<p><b>2.</b></p> <p>01-Tersedianya Peta Penetapan dan Keberhasilan KPH</p>	<p>3</p> <p>S30-Peta</p> <p>S30-Peta</p>	<p>4</p> <p>692,285</p>	<p>5</p> <p>Pusat</p>	<p>6</p> <p>MP 1: Penetapan Kawasan Hutan</p>	<p>7</p> <p>PP 2 : Peningkatan Kualitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air</p>	<p>8</p> <p>PM 4 : Kesehatan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup</p>	<p>9</p>	<p>20</p>	<p>11</p> <p>Bukan tematik</p>	<p>12</p> <p>Tidak</p>
<p><b>007-Forest Investment Program Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project</b></p> <p>Tanggap Sub Output:</p> <p>Forest Investment Program-Project 2 (FIP)</p>	<p><b>02-Pembentukan Unit KPH serta penataan ruang wilayah Provinsi</b></p>	<p>1-Laporan</p> <p>1-Laporan</p>	<p>20,100,000</p>	<p>Pusat</p>	<p>MP 1: Penetapan Kawasan Hutan</p>	<p>PP 2 : Peningkatan Kualitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air</p>	<p>PM 4 : Kesehatan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup</p>			<p>Bukan tematik</p>	<p>Tidak</p>
<p><b>Jumlah Provinsi yang memiliki peta arahan pemantauan hutan yang terupdate setiap tahun</b></p>											
<p><b>Seluruh KPH terintegrasi dalam RKTN dan RKTP</b></p> <p><b>Pergerakan Pergerakan Perundang-undangan dan Kelembagaan KPH</b></p> <p><b>Seluruh KPH terintegrasi dalam Tata Ruang Wilayah</b></p> <p><b>004-Tebahan Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan Yang Telah Mengakomodir RKTN 2011-2030</b></p> <p>Tanggap Sub Output</p> <p>051-Analisis Kelayakan Perencanaan Ruang Kawasan Hutan</p> <p>052-Fasilitasi Penataan Ruang kawasan hutan dalam rangka review RTRWP</p> <p>053-Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi, Pemantauan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Penetapan Hutan</p> <p>054-Penyusunan/Update peta arahan pemantauan hutan mendukung KPH</p> <p>055-Pengendalian Perencanaan Makro Kawasan Hutan</p> <p>056-Mendukung KPH</p> <p>057-Penyusunan Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan</p> <p>057-Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi</p>	<p><b>03-Terlaksananya pemantauan kawasan hutan</b></p>	<p>10-Dokumen</p> <p>2-Dokumen</p> <p>3-Dokumen</p> <p>1-Sistem</p> <p>1-Dokumen</p> <p>1-Dokumen</p> <p>1-Dokumen</p> <p>1-Dokumen</p> <p>1-Dokumen</p> <p>1-Dokumen</p> <p>1-Dokumen</p>	<p>2,748,574</p>	<p>Pusat</p>		<p>Bidang / Reguler</p>				<p>Bukan tematik</p>	<p>Tidak</p>
<p><b>Seluruh pemantauan penggunaan kawasan hutan yang</b></p> <p><b>003-Layanan Pemantauan Penggunaan Kawasan Hutan</b></p> <p>Tanggap Sub Out Put</p> <p>051-Pemantauan dan Pemantauan Penggunaan Kawasan Hutan</p> <p>052-Pemantauan Pembayaran PABP Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%</p>	<p><b>03-Terlaksananya pemantauan kawasan hutan</b></p>	<p>3-Dokumen</p> <p>300-pemohon</p> <p>1-Dokumen</p>	<p>1,838,824</p>	<p>Pusat</p>		<p>Bidang / Reguler</p>				<p>004 - Hidang Perubahan Dalam</p>	<p>Tidak</p>





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Roosi Tjandrakirana, M.SE.  
Jabatan : Direktur Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah  
Pengelolaan Hutan  
selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.  
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan  
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2020

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.  
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Ir. Roosi Tjandrakirana, M.SE.  
NIP. 19650416 199103 2 001

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

SATUAN KERJA : 465013. KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI  
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

ESELON II : DIREKTORAT RENCANA, PENGGUNAAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH  
PENGELOLAAN HUTAN

No./Kode (1)	Kegiatan/Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
5432.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	Tata Kelola yang baik di lingkungan Ditjen PKTL sesuai dengan kerangka reformasi birokrasi	
5432.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Terlayannya Dukungan Manajemen Eselon 1	1 Layanan
5432.950.002	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Lingkup Direktorat Teknis	Terlayannya Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Lingkup Direktorat RPPWPH	1 Layanan
		051. Dukungan manajemen Direktorat RPPWPH	1 Layanan
5432.994	Layanan Perkantoran	Terlayannya kebutuhan kantor operasional pimpinan dan kantor	1 Layanan
		002. Operasional dan pemeliharaan kantor	1 Layanan
5435.	Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Tersedianya data dan informasi penataan ruang pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	
5435.001	Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan	Terlayannya Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan	300 Dokumen
5435.002	Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP	Tersedianya peta penetapan kelembagaan KPH	530 Peta
5435.004	Telaahan Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan Yang Telah Mengakomodir RKTN 2011-2030	Tersedianya data dan informasi penataan ruang, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	10 Dokumen
5435.007	<i>Forest Investment Program Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project</i>	Tersedianya peta penetapan kelembagaan KPH yang pembiayaannya bersumber dari dana HLN	1 Laporan
5435.011	Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa	Tersusunnya data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa	1 Dokumen



**Kegiatan**

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan.

Jumlah

**Anggaran**

Rp. 781.886.000,- (Tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Rp. 25.950.713.000,- (Dua puluh lima milyar sembilan ratus lima puluh juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah).

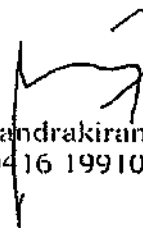
Rp. 26.732.599.000,- (Dua puluh enam milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Jakarta, Oktober 2020

Direktur Jenderal Planologi  
Kehutanan dan Tata Lingkungan,

Direktur Rencana, Penggunaan dan  
Pembentukan Wilayah Pengelolaan  
Hutan,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.  
NIP. 19610202 198603 1 003

  
Ir. Roosi Tjandrakirana, M.SE.  
NIP. 19650416 199103 2 001

Lampiran 4 : REKAP DATA BASE PERMOHONAN IPPKH S.D TAHUN 2020

No	pulau	Provinsi	Nama Perusahaan	Penggunaan	Nomor Permohonan	Tanggal Diterima	Kab/Kota	Luas (ha)	Ket. Permohonan
1	JAWA	JAWA TENGAH	PT. Semen Grobogan	OP. Batu Gamping	002/Din/2020	16 Januari 2020	Kab. Tegal Provinsi Jawa Tengah	31,4	Calakom
2	KALIMANTAN	KALIMANTAN TIMUR	PT. Bumi Dharma Kencana	OP. Batubara	02-ADM/BDK-HUT/1/2020	28 Januari 2020	Kab. Kutai Provinsi Kalimantan Timur	7070	Perpanjangan IPPKH
3	KALIMANTAN	KALIMANTAN TIMUR	PT. Davis Bumi Perkasa	OP. Batubara	03-ADM/BDK-HUT/1/2020	29 Januari 2020	Kab. Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur	3750	Perpanjangan IPPKH
4	JAWA	JAWA TIMUR	PT. Pamerang Highland	Jalan Akses menuju calon Wisata	0000/PHL-Gen-Exp/1/2020	27 Januari 2020	Kab. Malang Provinsi Jawa Timur	3,91	Calakom
5	SUMATERA	SUMATERA SELATAN	PT. Sari Semesta Utama	Op. Pertambangan Pasir Kuarsa	20/Dt-Ssu/SK/03/2019	16 Januari 2020	Kab. Ogan Komering Lingsing	166,5	IPPKH
6	KALIMANTAN	KALIMANTAN UTARA	Badan nasional Pengelola Perbatasan	Pembangunan POS Lintas Batas Negara	BNN/86.01/203/1/2020	20 Januari 2020	Kab. Nunukan Provinsi Kalimantan Utara	4,21	IPPKH
7	SUMATERA	RIAU	PT. PLN (Persero)	Pembangunan Jalur Transmisi SUTET 500 KV Sumatera New	00195/KLH.01.01/4/2000/2020	25 Januari 2020	Kab. Indragiri Hulu Provinsi Riau	357,38	Perpanjangan Calon Areal
8	KALIMANTAN	KALIMANTAN SELATAN	CV Wahyu Taruna Bakti	OP Batubara	1/WTB-IPPKH/1/2020	06 Januari 2020	Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan	7,33	IPPKH
9	SULAWESI	SULAWESI TENGAH	PT. Integro Mining Nusantara	OP Nikel	046/MN/03/2019	09 Januari 2020	Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah	118	IPPKH
10	MALUKU	MALUKU UTARA	PT. PLN (Persero)	Pembangunan SUIT	0043/KON.00.03/010300/2020	16 Januari 2020	Pulau Halmahera, Provinsi Maluku Utara	209,58	IPPKH
11	MALUKU	MALUKU UTARA	PT. PLN (Persero)	Pembangunan SUIT	0043/KON.00.03/010300/2020	16 Januari 2020	Pulau Tanimbar, Provinsi Maluku Utara	6,99	IPPKH
12	MALUKU	MALUKU	PT. PLN (Persero)	Pembangunan SUIT	0048/KON.00.03/010300/2020	16 Januari 2020	Pulau Seram dan Pulau Buru, Prov Maluku	149,28	IPPKH
13	SUMATERA	RIAU	PT. Bara Prima Pratama	OP Batubara	005/BPP-DIR/1/2020	17 Januari 2020	Kab. Bangka Tengah, Prov Riau	152	IPPKH
14	SUMATERA	RIAU	PT. Bara Prima Pratama	OP Batubara	006/BPP-DIR/1/2020	17 Januari 2020	Kab. Bangka Tengah, Prov Riau	686	IPPKH
15	SUMATERA	RIAU	PT. Wale Tampas Citratama	OP Batubara	001/WTC-KLH/1/2020	17 Januari 2020	Kab. Bangka Tengah, Prov Riau	112,53	IPPKH
16	SUMATERA	JAMBI	PT. Bangun Energi Perkasa	Eksplorasi Batubara	020/BER/03/2019	07 Januari 2020	Kabupaten Tebo, Prov Jambi	3587	Eksplorasi
17	KALIMANTAN	KALIMANTAN BARAT	PT. Pusaka Jamban Raja	Eksplorasi Lanjutan Bauksit	001/JA/PJ/1/2020	09 Januari 2020	Kabupaten Ketapang, Prov Kalimantan Barat	6904	Eksplorasi
18	SULAWESI	SULAWESI UTARA	PT. Gorontalo Sejahtera Mining	Eksplorasi Lanjutan Emas dmp	GSM/SK/LICAR/2019/03/437	14 Januari 2020	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara	1526	Eksplorasi
19	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	Berkat Bumi Pesada PT	Eksplorasi Batubara	008/BBP-JKT/1/2020	15 Januari 2020	Kab. Barito Utara, Prov Kalimantan Tengah	299,72	Perpanjangan IPPKH
20	MALUKU	MALUKU UTARA	Botani Megah Indah PT	OP Bijih Besi	247/DIR/ISM/FORS/03/2019	13 Januari 2020	Kab. Pulau Taliabu, Prov Maluku Utara	515,15	PAK
21	SUMATERA	RIAU	Grace Rich Marine PT	Industri Galangan Kapal	001/PPAK.GRM/Dn/03/2019	17 Januari 2020	Kab. Karimun, Kep Riau	7,5	PAK
22	SUMATERA	RIAU	PT. Cahaya Karimun Perkasa	Industri Galangan Kapal	001/PPAK.OXP/Dn/03/2019	17 Januari 2020	Kab. Karimun, Kep Riau	6,5	PAK

No	puisi	Provinsi	Nama Perusahaan	Penggunaan	Nomor Permohonan	Tanggal Diterima	Kab/Kota	Luas (ha)	Ket. Permohonan
23	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	PT. Indo Mineralita Prima	OP Galena	225/IMP-SRT/KLHK/001/19	17 Januari 2020	Kab. Seruyan, Prov. Kalteng	190,85	PAK
24	SUMATERA	SUMATERA UTARA	Bupati Mandailing Natal	Pembangunan Jalan	5900052/DISNAH/2020	07 Januari 2020	Kab. Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara	20,22	IPPKH
25	SUMATERA	RIAU	PT. Bumi Sialk Pusako-Pertamina Hulu	eksplorasi Pemboran Sumur Nuri-1X	SRT.0018/SKKM/2000/2020/S0	29/1/2020	Kab. Kampar Provinsi Riau	2,43	IPPKH
26	SUMATERA	SUMATERA SELATAN	SKK-Migas PT. Pertamina EP	Eksplorasi Lapangan Sopa Pemboran Smur SPA-D26 & SPA-D27 dan jalan	SRT.0030/SKKM/2000/2020/S0	24/1/2020	Kab. Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan	4,62	IPPKH
27	SUMATERA	JAMBI	SKK-Migas -ConocoPhillips (South Jambi)	Jaringan Pipa Gas dtp	SRT.0013/SKKM/2000/2020/S0	27/1/2020	Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi	111,55	Perpanjangan IPPKH
28	SUMATERA	SUMATERA SELATAN	SKK-Migas PT. Tropik Energi Pandan	Pemboran Sumur Ario Dilah (ADL-1,ADL-2 dan ADL-3) dan akses Jalan	SRT-0029/SKKM/2000/2020/S0 tanggal 20 Januari 2020	01 Maret 2020	Kab. Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan	9,45	IPPKH
29	SUMATERA	RIAU	SKK-Migas -EMP Malacca Strait S.A	Eksplorasi survei 2D	SRT.1026/SKKM/000/2018/S0	03 Desember 2020	Kab. Bengkalis Provinsi Riau	10.171,58	Survei Seismik
30	JAWA	JAWA BARAT	CV.Cadas Wangi	OP Batu	004/01/2020	27/1/2020	Kab. Cirebon Provinsi Jawa Barat	5	Perpanjangan IPPKH
31	JAWA	JAWA BARAT	PT. Yabo Mekmur Perkasa	Alur Jalan untuk Angkutan Hasil Produksi	0009/044.3/SEKPER/DIR/2020	28/1/2020	Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat	1,68	Kerjasama
32	SUMATERA	BENGKULU	PT. PLN (Perseri)	Pembangunan PLTA Musi 71 MW	0127/KON.00.03010300/2020	24/1/2020	Kab. Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu	80,13	IPPKH
33	SUMATERA	SUMATERA BARAT	Oriental Consultants Global Co Ltd	Pekerjaan jalan Tol Ruas Pekanbaru-Padang saki Pangkajene	STMN008	28/1/2020	Kab. Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat	0,047	IPPKH
34	SUMATERA	SUMATERA UTARA	PT. Pertamina Geothermal Energy	Pembangunan PLT Panas Bumi Sarulla	0002/PGE000/2020-S0	15/1/2020	Kab. Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara	295	Perubahan Areal IPPKH
35	SUMATERA	BENGKULU	PT. Bukit Sunur	Sarana dan prasarana jalan angkut	001/BI/2020	23/1/2020	Kab. Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu	513	Pengembalian IPPKH
36	SULAWESI	SULAWESI TENGGARA	Kementerian PUPR	Bendungan	IPS. 03.01/BWS.14/172 tanggal 29 Januari 2020	31/01/2020	Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara	63,1	PAK
37	NUSA TENGGARA	NUSA TENGGARA	PT. Sumbawa Timur Mining	Kegiatan Survei Pendahuluan Panas Bumi	034/02020/STM/BE -on	02 April 2020	Kab. Bima dan Kab. Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat	22029	Perpanjangan Perseetujuan survei
38	NUSA TENGGARA	NUSA TENGGARA	PT. Dayantra Telekomunikasi	Kelancaran komunikasi di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara	522/31/INTT.2020	03 Februari 2020	Provinsi Nusa Tenggara Timur		Kerjasama
39	JAWA	JAWA TENGAH	Samet Sujaryanto	Jalan Angkutan Produksi	359/044.3/SEKPER/DIR/2019	07 Februari 2020	Kab. Kendal Provinsi Jawa Tengah	2,97	Kerjasama
40	MALUKU	MALUKU UTARA	PT. Arjan Tbk	Nikel dmp	378/09/PAT/2020	06 Februari 2020	Kab. Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara	492,86	Perpanjangan IPPKH
41	SUMATERA	SUMATERA UTARA	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Jalan Penghubung Kabupaten Padang Lawas-kab. Mandailing natal	620/DMK-PE/0325/2019	07 Februari 2020	Kab. Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara	51,93	Perpanjangan Pemenuhan
42	JAWA	JAWA TIMUR	CV. Sumber Payung Mas	Pengangkutan Hasil Produksi Batu Limestone	0004/004.3/SEKPER/DIR/2020	02 Juli 2020	Kab. Lamongan Provinsi Jawa Timur	1,22	Kerjasama
43	JAWA	JAWA TIMUR	PT. PLN (Perseri)	Pembangunan Jaringan Listrik 20 KV	0003/044.3/SEKPER/DIR/2019	16/1/2020	Kab. Banyuwangi Provinsi Jawa Timur	10400±2	Kerjasama
44	SUMATERA	JAMBI	SKK Migas- Petrochina International Ltd	Kegiatan OP Migas Sumur Gemah#51,Gemah#52 #Gemah	0026/SKKM/2000/2020/S0	28/01/2020	Kab. Tanjung Jabung Provinsi Jambi	17,32	IPPKH
45	SUMATERA	JAMBI	SKK Migas- Petrochina International Ltd	PAK Pembangunan jalur pipa Gemah #53 PAD ke Gemah #8 PAD	0004/SKKM/2000/2020/S0	22 Januari 2020	Kab. Tanjung Jabung Provinsi Jambi	1,66	PAK

No	pusat	Provinsi	Nama Perusahaan	Penggunaan	Nomor Permohonan	Tanggal Diterima	Kab/Kota	Luas (ha)	Ket. Permohonan
46	SUMATERA	JAMBI	SKK Migas- Petrochina International Ltd	PAK Pembangunan jalur pipe	0031/SKMM/2000/2020/S0	22 Januari 2020	Kab. Tanjung Jabung Provinsi Jambi	12.5297	PAK
47	KALIMANTAN	KALIMANTAN SELATAN	PT. Pelsart Tambang Kenora	Eksplorasi Emas	AG.10.G.001PTK-HOIGHILICM/2020	22 Januari 2020	Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan	39907,11	Eksplorasi
48	SUMATERA	BANGKA BELITUNG	PT. Kurnia Mandiri Adpekasta	OP Pasir Kawasa	031/KMA/0/2020	12 Februari 2020	Kab. Belitung Timur Provinsi Bangka Belitung	184,89	Perpanjangan IPPKH dan
49	MALUKU	MALUKU UTARA	PT. Halmahera Sukses Mineral	OP Nikel dnp	032/HSMUKT/0/2020	13 Februari 2020	Kab. Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara	905,2	Perpanjangan IPPKH dan
50	JAWA	JAWA TIMUR	SKK Migas-PT. Pertamina EP	Eksplorasi Lapangan Kawangan (KWG-PXAT) & KWG PYA1)	SRT.0085/SKMM/2000/2020/S)	03 Mei 2020	Kab. Bojonegara Provinsi Jawa Timur	5,77	IPPKH
51	SUMATERA	SUMATERA BARAT	PT. PLN (Persero)	Pembangunan Jalur Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET)	7869/TRS.01.02/A010400/2020	12 April 2020	Kab. Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat	20,22	IPPKH
52	SUMATERA	RIAU	PT. Bumi Sialk Pusako-Pertamina Hulu	Sarana Penunjang Fasilitas Migas Lapangan Pusaka	SR.0053/SKMM/2000/2020/S0	02 Juli 2020	Kab. Sialk Provinsi Riau	115,2	IPPKH
53	JAWA	JAWA TENGAH	Sarwo Edi	Jalan angkut hasil produksi	80/044.3/Sekper/Di/2020 tanggal 24 Februari 2020	26/2/2020	Kab. Pemalang Provinsi Jawa Tengah	8,14	Mekanisme Kerjasama
54	SUMATERA	SUMATERA BARAT	Bupati Pasaman Barat	Pembangunan Pelabuhan umum dan jalan tolak tapang- Air Bangsa	050/079/SAPPEDA-2020	13 Februari 2020	Kab. Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat	122,01	Perubahan IPPKH
55	SUMATERA	SUMATERA UTARA	SKK Migas- EMP Gebang Ltd	3D Blok Gebang	0058/SKMM/2000/2020/S0	13 Februari 2020	Kab. Langkat, Sumatera Utara	348,6 Km <sup>2</sup>	Survei Seismik
56	SULAWESI	SULAWESI TENGGARA	PT. Maseppo Dale	OP. Nikel dnp	01/MO/0-2020	03 Februari 2020	Kab. Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara	103,2	IPPKH
57	JAWA	JAWA TIMUR	Yayasan Soerjo Modopahit	Taman Perumahan	017/YSM/0/2020	21/2/2020	Kab. Mojokerto Provinsi Jawa Timur	22,55	Survei
58	JAWA	JAWA TIMUR	PT.Solusi Bangun Indonesia Tbk	OP. Batu Gamping	143/Sbil/LCCS DIR/0/2020	03 Februari 2020	Kab. Tuban Provinsi Jawa Timur	1242,1	IPPKH
59	JAWA	JAWA TIMUR	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	Perubahan Trase Pembangunan Jalan Lintas selatan	660.1/198/07.118/2020	02 Nopember 2020	Kab. Tulungagung Provinsi Jawa Timur	1119,572	Calakan
60	SUMATERA	RIAU	SKK Migas-EMP Malacca	Pembaran sumur MSTQ-01	SRT.0012/SKMM/2000/2020/S0	15 Januari 2020	Kab. Meranti, Provinsi Riau	1,78	Eksplorasi
61	SULAWESI	SULAWESI TENGGARA	PT Bumi Inti Sulawesi	Operasi Produksi Bijih Nikel	002/SU DIR/BIS/0/2020	13/2/2020	Kota Bontol provinsi Sulawesi Tenggara	1245	Survei
62	SULAWESI	SULAWESI TENGAH	PT. Sulawesi Resource	Operasi Produksi Bijih Nikel	001/SU DIR/BIS/0/2020	13/2/2020	Kab. Morowali provinsi Sulawesi Tengah	1444	Survei
63	SUMATERA	SUMATERA SELATAN	SKK Migas PT. Pertamina EP	Pengeboran Sumur SFA-023 dan Akses Jalan Masuk	157/EP/000/2020-S0	01 Februari 2020	Kab. Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan	3,5	Perpanjangan Pemenuhan
64	JAWA	JAWA BARAT	PT.Republika Mandiri Energ	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM)	005/RME/TWSIAS/0/2020	20/2/2020	Kab. Garut Provinsi Jawa Barat	6,2515	Survei
65	JAWA	JAWA TENGAH	Bupati Kebumen	Pembangunan Embung	320/044.3/Sekper/Di/2020	26/02/2020	Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah	2,41	Kerjasama
66	JAWA	JAWA BARAT	Cv. Purna Beton Purnakarta	Pembangunan Jalan Tol dan MRT	029/OPP-AHTRM/0/2020	02 April 2020	Kab. Karawang Provinsi Jawa Barat		IPPKH
67	JAWA	JAWA TENGAH	Muhammad Husna	Angkutan Hasil Produksi Galian C	0025/044.3/Sekper/Di/2020	03 Maret 2020	Kab. Kendal Provinsi Jawa Tengah	0,14	Mekanisme Kerjasama
68	JAWA	JAWA TIMUR	Fa.Fasir Mas	Pertambangan Mineral Non Logam	03/SP.LH/25.02/2020	02 Maret 2020	Kab. Tuban Provinsi Jawa Timur		IPPKH

No	daerah	Provinsi	Nama Perusahaan	Penggunaan	Nomor Permohonan	Tanggal Diterima	Kab/Kota	Luas (ha)	Ket. Permohonan
69	SUMATERA	RIAU	Kesatuan Pengelolaan Hutan Sorek	Pembangunan dan Pemasangan Listrik	800KPH-SRK/II/2020	17/3/2020	Kab. Pelalawan Provinsi Riau		Kerjasama
70	SULAWESI	SULAWESI TENGGARA	PT.Sulawesi Cahaya Mineral	Ekplorasi Lanjutan Nikel	003/GR-J/SCM/SP-IPPKH/EKSN/2020	18/3/2020	Kab. Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara	21100	Ekplorasi
71	JAWA	JAWA BARAT	PT. Pusaka Indah Raya	Pesambangan Batu Marmer	090/PPYH/PM/II/2020	24/2/2020	Kab. Bandung Barat Provinsi Jawa Barat	25,75	Perpanjangan IPPKH
72	JAWA	JAWA TENGAH	PT.Walit Kular Sukses	OP Mineral Bukan Logam	018/WKS/II/2020 tanggal 18 Februari 2020	15/04/2020	Kab. Pemalang Provinsi Jawa Tengah	5,67	IPPKH
73	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	PT Bangun nusantara jaya makmur	Jetty dan jalan Hauling	010/BNJM-IPPKH/II/2020	02 April 2020	Kab. Bario Utara, Prov. Kalimantan Tengah	3074	PAK
74	JAWA	JAWA BARAT	PT.Bhumivarin Mineral Indonesia	OP Batu gamping	02.02/DIR-BM/II/20	23/3/2020	Kab. Bandung Barat Provinsi Jawa Barat	2,33	IPPKH
75	SUMATERA	BENGKULU	PT. Isti Sara Perdana	OP. Batubara	004/II/SP-DIR/2020 tanggal 02 Maret 2020	10 Maret 2020	Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu		PAK
76	SULAWESI	SULAWESI TENGGARA	PT. Ceria Nugraha	OP. Nikel dmp	054/CM-JK/II/2020	25/2/2020	Kab. Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara	623,46	PAK
77	SULAWESI	SULAWESI TENGAH	PT. PLN (Persero)	Pembangunan saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV G	0291/KON.00.03/010300/2020	03 September 2020	Kab. Morowali provinsi Sulawesi Tengah	49,2	IPPKH
78	JAWA	JAWA TIMUR	PT. Solusi Bangun Indonesia	OP Clay dan Gamping	143/SB/LCCS.DIR/II/2020 tanggal 26 Februari 2020	26 Februari 2020	Kab. Tuban Prov. Jawa Timur	345,56	IPPKH
79	MALUKU	MALUKU UTARA	PT. Gebe Sentra Nickel	OP Biji Nikel	02/ISN-DISHUT/II/2020 tanggal 17 Maret 2020	23/3/2020	Kab. Halmahera Tengah, Prov. Maluku Utara	110,36	PERPANJANGAN IPPKH
80	JAWA	JAWA BARAT	PT. Pusaka Marmer Indonesia	OP Marmer	090/PPYH/PM/II/2020 tanggal 25 Januari 2020	18 Februari 2020	Kab. Garut, Prov. Jawa Barat	25,75	PERPANJANGAN IPPKH
81	SULAWESI	SULAWESI TENGGARA	PT. Vale Indonesia	OP Biji Nikel	00055/LGO-JR/2020 tanggal 20 Februari 2020	21 Februari 2020	Kab. Kolaka, Prov. Sulawesi Tenggara	11608,69	IPPKH
82	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	PT. Bharinto Ekatama	OP. Batu Bara	0211/L/BEK/NCP/01/2020	22/1/2020	Kab. Bario Utara, Prov. Kalimantan Tengah	22000	PAK
83	MALUKU	MALUKU UTARA	PT. Tekindo Energi	Jalan Angkut tambang	TE/PO-LO/027/II/2020	03 Desember 2020	Kab. Halmahera Tengah, Prov. Maluku Utara	1000	PAK
84	JAWA	JAWA TIMUR	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi	EM.0702-M/IT/26 tanggal 14 April 2020	20 April 2020	Kab. Probolinggo, Prov. Jawa Timur	43,99	IPPKH
85	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	PT. Batu Dama - Sejahtera	Ekplorasi Lanjutan Batubara	015/BOS/II/2020 tanggal 5 Maret 2020	18/3/2020	Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah	1225	Ekplorasi
86	KALIMANTAN	KALIMANTAN SELATAN	PT. Antang Gunung Meratus	OP Batubara	041/DIR-AGM/SRK/II/2020 tgl 26 Februari 2020	27 Februari 2020	Kab. Hulu Sungai Selatan dan Kab. Tapin, Prov. Kalimantan	110,19	PAK
87	JAWA	JAWA BARAT	SKK Migas - PT. Pertamina EP	OP Migas	SRT-0144/SKKM/2000/2020/SO tanggal 18 Maret 2020	20 April 2020	Kab. Indramayu, Prov. Jawa Barat	4,16	IPPKH
88	SUMATERA	JAMBI	SKK Migas - PT. Sele Raya Merangin Dua	Ekplorasi Migas	SRT-0156/SKKM/2000/2020 tanggal 31 Maret 2020	08 April 2020	Kab. Sarolangun Prov. Jambi	1,2	IPPKH
89	MALUKU	MALUKU	SKK Migas - Balan Energy, Ltd. Pte	Survey Migas	SRT-0125/SKKM/2000/2020/SO tanggal 10 Maret 2020	23 April 2020	Kab. Serang Bagian Timur, Prov. Maluku	500 KM	Survey
90	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	CV. Ajuna	OP Batubara	004P-IPPKH-IU/PIA/II/2020 tanggal 14 Februari 2020	18 Februari 2020	Kab. Bario Utara, Prov. Kalimantan Tengah	25	IPPKH
91	SUMATERA	RIAU	PT.Mira Persada Resources	Batu Granit dsp	001/DIR-MPR/II/2020 tanggal 17 Februari 2020	21/4/2020	Kab. Lingga Provinsi Kep.Riau	67,85	PAK

No	pulau	Provinsi	Nama Perusahaan	Penggunaan	Nomor Pemohonan	Tanggal Diterima	Kab/Kota	Luas (ha)	Ket. Pemohonan
92	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	PT. Huma Amar Indonesia	OP Batubara	01.016HAI-MLHK/0/2020	10 Maret 2020	Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah	633,97	PPKH
93	SUMATERA	SUMATERA UTARA	PT. Energi Praxest Jaya	Pembangunan PLTA	053EPJALHK/0/2020 tanggal 4 Maret 2020	05 Maret 2020	Kab. Humbang Hasundutan, Prov. Sumatera Utara	104	PPKH
94	SULAWESI	SULAWESI UTARA	PT. Sumber Permata Selaras	OP Nikel DMP	02-01/SPS-Dir/Jakarta/0/2020 tanggal 28 Februari 2020	02 Maret 2020	Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Utara	112,77	PPKH
95	SUMATERA	SUMATERA UTARA	Baka Wilayah Sungai Sumatera II	Pembangunan Penyedia Air Baku menunjang Pariwisata Danau toh	PS. 03.01.BWS.2/172 tanggal 12 Maret 2020	16 Maret 2020	Provinsi Sumatera Utara		PPKH
96	JAWA	JAWA TIMUR	CV Fa Pasir Masi	Pertambangan Mineral Non Logam	03/SP LHK/25.02/2020 tanggal 25 Februari 2020	25 Februari 2020	Kab. Tuban Provinsi Jawa Timur	4,25	PPKH
97	KALIMANTAN	KALIMANTAN TIMUR	PT. Indobara Pratama	Jalan Angkut Batubara	06/IBP-PPKH/0/2020 tanggal 14 Februari 2020	14 Februari 2020	Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur	17,96	PPKH
98	SULAWESI	SULAWESI TENGGARA	PT. Masempo Delle	Nikel Disp	01/MD/0-2020	27 Februari 2020	Kab. Konawe Utara, Prov. Sulawesi Tenggara	86,81	PPKH
99	SUMATERA	SUMATERA UTARA	PT. PLN (Persero)	Transmisi Eksisting Pematang Siantar - Porsea	0265/KON.00.03/010300/2020 tanggal 13 Februari 2020	28 Februari 2020	Kab. Simalungun dan Kab. Toba Samosir, Prov. Sumatera Utara	56,44	PPKH
100	SUMATERA	SUMATERA UTARA	PT. PLN (Persero)	Transmisi Eksisting 150 kV Sidikalang Berastagi	0264/KON.00.03/010300/2020 tanggal 13 Februari 2020	28 Februari 2020	Kab. Karo dan Kab. Deli, Prov. Sumatera Utara	80,42	PPKH
101	SUMATERA	SUMATERA UTARA	PT. PLN (Persero)	Transmisi Eksisting 150 kV Tarutung - Sidikalang	0260/KON.00.03/010300/2020 tanggal 18 Februari 2020	28 Februari 2020	Kab. Samosir dan Kab. Deli, Prov. Sumatera Utara	101,34	PPKH
102	SUMATERA	SUMATERA BARAT	PT. PLN (Persero)	Transmisi Eksisting 150 kV Singkarak Padang Panjang	0290/KON.00.03/010300/2020	28 Februari 2020	Kab. Padang Pariaman dan Kab. Tanah Datar, Prov.	11,98	PPKH
103	SUMATERA	SUMATERA BARAT	PT. Rekindi Daye Mampu	Pembangunan SUTT	102/RCM/DIR.LT/0/2020	26 Februari 2020	Kab. Mampu, Prov. Sulawesi Barat	11,4	PPKH
104	JAWA	JAWA TIMUR	PT. Pertamina	OP Minyak dan Gas Bumi	SRT-0065/SKRM/0000/2020(S)	04 Maret 2020	Kab. Tuban, Prov. Jawa Timur	5,77	PPKH
105	SUMATERA	SUMATERA UTARA	PT. Energi Praxest Jaya	Pembangunan PLTA	053EPJALHK/0/2020	05 Maret 2020	Kab. Humbang Hasundutan, Prov. Sumatera Utara	104	PPKH
106	SUMATERA	SUMATERA UTARA	PT. Sumber Energi Sukses Makmur	Pembangunan PLTS	003/SESM-GON/0/2020 tanggal 22 Januari 2020	06 Maret 2020	Kab. Samosir, Prov. Sumatera Utara	117,2	PPKH
107	SUMATERA	SUMATERA UTARA	PT. PLN (Persero)	Pembangunan Jaringan Transmisi	0281/KON.00.03/010300/2020 tanggal 18 Februari 2020	05 Maret 2020	Kab. Karo dan Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara	5,94	PPKH
108	SULAWESI	SULAWESI TENGAH	PT. PLN (Persero)	Pembangunan Jaringan Transmisi	0281/KON.00.03/010300/2020 tanggal 26 Februari 2020	05 Maret 2020	Kab. Poso, Morowali, dan Morowali Utara, Prov. Sulawesi	49,2	PPKH
109	SUMATERA	BENGKULU	PT. Bera Indah Lestari	OP Batubara disp	004/IBP-Dir/0/2020 tanggal 02 Maret 2020	10 Maret 2020	Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu		PAK
110	KALIMANTAN	KALIMANTAN TIMUR	PT. Berau Coal	OP Batubara Site Gumbang	115/BC/LCC-YNP/0/2020 tanggal 2 Maret 2020	10 Maret 2020	Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur	996,81	PPKH
111	SUMATERA	SUMATERA UTARA	PT. PLN (Persero)	Pembangunan Jaringan Transmisi Existing	0284/KON.01.03/010300/2020 tanggal 28 Februari 2020	11 Maret 2020	Kab. Karo dan Kab. Deli, Prov. Sumatera Utara	86,68	PPKH
112	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	PT. Bekat Bumi Persada	OP Batubara	045/BEP_KT/0/2020 tanggal 11 Maret 2020	13 Maret 2020	Kab. Berau Utara, Prov. Kalimantan Tengah	67,64	PPKH
113	SULAWESI	SULAWESI TENGAH	PT. Sulawesi Cahaya Mineral	Pembangunan Conveyor	006/0-2020/SOM tanggal	16 Maret 2020	Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Tengah	288,9	PPKH
114	JAWA	JAWA BARAT	PT. Bhumiwan Mineral Indonesia	OP Galian C	02.02/DIR-SM/0/2020 tanggal	16 Maret 2020	Kab. Bandung Barat, Prov. Jawa Barat	2,33	PPKH

No	pusu	Provinsi	Nama Perusahaan	Penggunaan	Nomor Permohonan	Tanggal Diterima	Kab/Kota	Luas (ha)	Ket. Permohonan
115	JAWA	JAWA BARAT	PT. Wilton Wahana Indonesia	OP Emas DMP	012/WW/III/2020 tanggal 18 Maret 2020	23 Maret 2020	Kab. Sukabumi, Prov. Jawa Barat	365,07	PPKH
116	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	PT. Nusa Persada Resources	OP Batubara	0864/LN/PR/NCP/4/2020 tanggal 8 April 2020	13 April 2020	Kab. Bontol Utara, Prov. Kalimantan Tengah	621	PPKH
117	SULAWESI	SULAWESI TENGGARA	PT. Sulawesi Cahaya Mineral	OP Nikel	035/GR-JSCM/SP- (PPKH.OP/IV/2020)	13 April 2020	Kab. Kolaka, Prov. Sulawesi Tenggara	993,31	PPKH
118	JAWA	JAWA TIMUR	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi	EM.0702-Min/728 tanggal 14 April 2020	17 April 2020	Kab. Probolinggo, Prov. Jawa Timur	43,99	PPKH
119	SULAWESI	SULAWESI TENGGARA	PT. James & Armando Pundimas	OP Nikel	SK.001/GAP/W/2020 tanggal 5 April 2020	20 April 2020	Kab. Konawe Utara Prov. Sulawesi Tenggara	146,25	PPKH
120	JAWA	JAWA BARAT	SKK Migas - PT. Pertamina EP	OP Migas	SRT-0144/SKKM/2000/2020/SC tanggal 18 Maret 2020	20 April 2020	Kab. Indramayu, Prov. Jawa Barat	4,16	PPKH
121	SULAWESI	SULAWESI BARAT	PT. Jindafa Investment Indonesia	PLTM	006/JA/PLTA/W/2020 tanggal 13 April 2020	27 April 2020	Kab. Mamasa, Prov. Sulawesi Barat	13,27	PPKH
122	KALIMANTAN	KALIMANTAN SELATAN	PT. Bahari Cakrawala Sebuku	OP Batubara	BCC-SHL 022/KL/H/W/2020 tanggal 28 April 2020	04 Mei 2020	Kab. Kotabaru, Prov. Kalimantan Selatan	178,42	PPKH
123	KALIMANTAN	KALIMANTAN SELATAN	PT. Sri Raya Persada	OP Batubara	03/SRP-MLHK/SKPM/W/2020 tanggal 30 April 2020	05 Mei 2020	Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan	41,2	PPKH
124	SUMATERA	JAMBI	PT. PLN (Persero)	Pembangunan Jembatan SUTT	2286/HKM.07.03/10300/2020 tanggal 13 Maret 2020	14 April 2020	Kab. Tanjung Jabung Barat, Prov. Jambi	37,68	PPKH
125	KALIMANTAN	KALIMANTAN SELATAN	PT. Grand Anugrah Jaya	OP Batubara	001/SPVGAJ/W/2020 tanggal 18 Mei 2020	22 Mei 2020	Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan	261,6	PPKH
126	KALIMANTAN	KALIMANTAN TIMUR	PT. Fiman Ketaun Perkasa	OP Batubara	140/FPK-MENLHKUKT/IV/2020 tanggal 19 Mei 2020	25 Mei 2020	Kab. Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur	10220	PPKH
127	MALUKU	MALUKU	PT. Eksday Mula	Nikel dsp	01/PM-HL/GUEM/VI/2020 tanggal 8 Mei 2020	15 Mei 2020	Kab. Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara	24,99	PAK
128			PT. Manunggal Inti Aramas						PPKH
129	SUMATERA	RIAU	PT. Budi Indah Mula Coal	OP Batubara	001/Dr-BM/SIV/2020 tanggal 13 Mei 2020	20 Mei 2020	Kab. Rokan Hulu Provinsi Riau	642,68	PPKH
130	KALIMANTAN	KALIMANTAN TIMUR	PT. Berau Coal	Ekplorasi Lanjutan Batubara	013/BC/LCC-YM/IV/2020 tanggal 2 Maret 2020	10 Maret 2020	Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur	6740,30	Ekplorasi
131	SUMATERA	BANGKA BELITUNG	PT. Munda Cirebon Mining	Ekplorasi Pasir Kuarsa	12/MCM/IV/2020 tanggal 12 Maret 2020	16 Maret 2020	Kab. Belitung Timur, Prov. Kep. Bangka Belitung	1,14	Ekplorasi
132	SUMATERA	BANGKA BELITUNG	CV. Senoka	Ekplorasi Pasir Kuarsa	12/SAND/III/2020 tanggal 12 Maret 2020	16 Maret 2020	Kab. Belitung Timur, Prov. Kep. Bangka Belitung	122,8	Ekplorasi
133	SUMATERA	BANGKA BELITUNG	PT. Multidynamik Binasejahtera	Ekplorasi Pasir Kuarsa	12/MDS/IV/2020 tanggal 12 Maret 2020	16 Maret 2020	Kab. Belitung Timur, Prov. Kep. Bangka Belitung	127,6	Ekplorasi
134	SUMATERA	JAMBI	PT. Nazmira Energi Prima	Ekplorasi Batubara	020/NEP/IV/2020 tanggal 11 Maret 2020	16 Maret 2020	Kab. Tebo, Provinsi Jambi	5000	Ekplorasi
135	NUSA TENGGARA	NUSA TENGGARA	PT. Sumbawa Timur Mining	Ekplorasi Panas Bumi	122/IV/2020/STMBE-ra tanggal 11 Maret 2020	06 April 2020	Kab. Bima dan Kab. Dompu, Prov. Nusa Tenggara Barat	8008,33	Ekplorasi
136	SUMATERA	JAMBI	SKK Migas - PT. Sele Raya Merangin Dua	Ekplorasi Migas	SRT-0156/SKKM/2000/2020 tanggal 31 Maret 2020	08 April 2020	Kab. Sarolangun Prov. Jambi	1,2	Ekplorasi
137	JAWA	JAWA BARAT	PT. Pusaka Marmer Indonesia	OP Marmer	090/PPKH-IPM/IV/2020 tanggal 29 Januari 2020	18 Februari 2020	Kab. Garut, Prov. Jawa Barat		Perpanjangan PPKH

No	Daerah	Provinsi	Nama Perusahaan	Penggunaan	Nomor Permohonan	Tanggal Diterima	Kab/Kota	Luas (ha)	Ket. Permohonan
138	MALUKU	MALUKU UTARA	PT. Tekindo Energi	Perpanjangan dan Revisi OP Nikel	TEDD-L/003/II/2020 tanggal 19 Februari 2020	20 Februari 2020	Kab. Halmahera Tengah, Prov. Maluku Utara	720,3	Perpanjangan IPPKH
139	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	PT. Indo Muro Kencana	Perpanjangan OP Emas	AG.10.G.010/MM-HOIGHUJ/II/2020 tanggal 21	26 Februari 2020	Kab. Murang Raya, Prov. Kalimantan Tengah	249,60	Perpanjangan IPPKH
140	KALIMANTAN	KALIMANTAN SELATAN	PD. Baratata Tuntung Pandang	OP Biji Besi	B11P-25A/OPS/II/2020 tanggal 28 Februari 2020	04 Maret 2020	Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan	23,49	Perpanjangan IPPKH
141	KALIMANTAN	KALIMANTAN TIMUR	PT. Mahakam Sumber Jaya	OP Batubara	043MS,II/II/2020 tanggal 2 Maret 2020	04 Maret 2020	Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur	614,23	Survei
142	KALIMANTAN	KALIMANTAN TIMUR	PT. Santan Batubara	OP Batubara	032SBB/II/2020 tanggal 2 Maret 2020	04 Maret 2020	Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur	507,3	Perpanjangan IPPKH
143	SUMATERA	MALUKU UTARA	PT. Antam, Tbk	OP Biji Nikel	705/05/PAT/2020 tanggal 26 Februari 2020	05 Maret 2020	Kab. Halmahera Timur, Prov. Maluku Timur	492,86	Perpanjangan IPPKH
144	JAWA	JAWA BARAT	Koperasi Pondok Pesantren Balerante	OP Galian C	076KPPB/II/2020 tanggal 16 Maret 2020	13 April 2020	Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat	6,96	Perpanjangan IPPKH
145	KALIMANTAN	KALIMANTAN SELATAN	PT. Karbon Mahakam	Reklamasi IPPKH OP	KM-SHL.005/KL.H/II/2020 tanggal 22 April 2020	24 April 2020	Kab. Kotabaru, Prov. Kalimantan Selatan	184,22	Perpanjangan IPPKH
146	KALIMANTAN	KALIMANTAN TIMUR	PT. Kitadin	OP Batubara	0417L/KTD/ER/2020 tanggal 10 Februari 2020	18 Februari 2020	Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur	413,42	Perubahan Area IPPKH
147	SULAWESI	SULAWESI TENGGARA	PT. Sulawesi Cahaya Mineral	Eksplorasi Biji Nikel	023/GR-J/SCM/SP-IPPKH Eks/II/2020 tanggal 19	20 Februari 2020	Kab. Kotawae, Prov. Sulawesi Tenggara	586,27	Perubahan Area IPPKH
148	KALIMANTAN	KALIMANTAN TIMUR	PT. Fajar Sakti Prima	Jalangi angkut Batubara	146/SP-MENLHK/II/2020 tanggal 25 Februari 2020	26 Februari 2020	Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur	143,7	Perubahan Area IPPKH
149	JAWA	JAWA BARAT	Star Energy Geothermal Darajat II, Limited	OP Panas Bumi (Perubahan Nama)	SEGD 0/31a-PGPA/II/2020 tanggal 26 Februari 2020	27 Februari 2020	Kab. Garut, Prov. Jawa Barat	7,5	Perubahan Area IPPKH
150	JAWA	JAWA BARAT	Star Energy Geothermal Darajat II, Limited	OP Panas Bumi (Perubahan Nama)	SEGD 0/31b-PGPA/II/2020 tanggal 26 Februari 2020	27 Februari 2020	Kab. Garut, Prov. Jawa Barat	35,26	Perubahan Area IPPKH
151	SUMATERA	RIAU	PT. Mahunggal Inti Arthamas	OP Batubara	001/DIR-MA/PPKH/II/2020 tanggal 2 Maret 2020	03 Maret 2020	Kab. Kuantan Singingi, Prov. Riau	53,89	Perubahan Area IPPKH
152	KALIMANTAN	KALIMANTAN SELATAN	PT. Anutrin Indonesia	OP Batubara	167A/II/II/2020 tanggal 23 Maret 2020	12 Februari 2020	Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan		PAK
153	SUMATERA	KALIMANTAN SELATAN	PT. Adaro Indonesia	OP Batubara	AI/01-VI/201AH-BRIERO tanggal 5 Mei 2020	06 Mei 2020	Kab. Tabalong dan Banjaran, Prov. Kalimantan Selatan		Perubahan Area IPPKH
154	SULAWESI	SULAWESI TENGAH	PT. Di Eya Abadi	OP Nikel	020/CEA/DIR/II/2020 tanggal 10 Februari 2020	18 Februari 2020	Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Tengah	649,83	PAK
155	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	PT. Bangunmasantara Jayamakmur	OP Batubara	010/BNM-IPPKH/II/2020 tanggal 20 Februari 2020	26 Februari 2020	Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah	58,15	PAK
156	KALIMANTAN	KALIMANTAN SELATAN	PT. Kalimantan Energi Lestari	OP Batubara	0032/KEL-DUPTL/II/2020 tgl 24 Februari 2020	27 Februari 2020	Kab. Kotabaru, Prov. Kalimantan Selatan	552,72	PAK
157	SUMATERA	BANGKA BELITUNG	PT. Mitra Siania	OP Timah	026/MSP/DIR/II/2020 tanggal 27 Februari 2020	27 Februari 2020	Kab. Bangka, Prov. Bangka Belitung	21,86	PAK
158	SUMATERA	RIAU	PT. Sekumbang Permata Engineering	Pembangunan Galangan Kapal	023/SPE/II/II/2020 tanggal 11 Maret 2020	12 Maret 2020	Kab. Karimun, Prov. Kep. Riau	63,636 M2	PAK
159	SUMATERA	BANYUASIN	PT. Masi Mitra Jaya	OP Batubara	04/MMLP-A/II/2020 tgl 10 Maret 2020	12 Maret 2020	Kab. Musi Banyuasin	38,48	PAK
160	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	CV. Lahai Jaya Mandiri	OP Batubara	010/CIV, JM-LGJ/II/2020 tanggal 5 Maret 2020	08 April 2020	Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah	1015	PAK



No	ulas	Provinsi	Nama Perusahaan	Penggunaan	Nomor Permohonan	Tanggal Diterima	Kab/Kota	Luas (ha)	Ket. Permohonan
161	KALIMANTAN	KALIMANTAN SELATAN	PT. Tunas Inti Abadi	OP Batubara	L-015/TIADIR/UKT/III/2020 tanggal 18 Maret 2020	13 April 2020	Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan	308,53	PAK
162	KALIMANTAN	KALIMANTAN SELATAN	PT. Tunas Inti Abadi	OP Batubara	L-014/TIADIR/UKT/III/2020 tanggal 18 Maret 2020	13 April 2020	Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan		PAK
163	SULAWESI	SULAWESI BARAT	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembangunan Bendungan Budong - Budong	PS. 03.01.MN/486 tanggal 13 Maret 2020	20 Maret 2020	Kab. Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat	499,14	IPPKH
164	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	PT. Sebura Duanbu Abadi	OP Batubara	010/BDA/W/2020 tanggal 3 Februari 2020	7 Februari 2020	Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah	9578,71	Pengembalian IPPKH
165	SUMATERA	JAMBI	PT. PLN (Persero)	Jalur Transmisi SUTT 150 KV Muara Sabak	0250/TRS.01.03/420000/2020 tanggal 2 April 2020	08 Mei 2020	Kab. Tanjung Jabung Barat dan Kab. Tanjung Jabung Timur	73,53	PAK
166	SUMATERA	RAU	PT. Karsa Adhitama Persada	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2X120mW	004/Per_LINAP/W/2020 tanggal 20 April 2020	05 Mei 2020	Kota Batam Provinsi Riau	65,98	IPPKH
167	SUMATERA	SUMATERA UTARA	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Pembangunan Penyedia Air Baku menunjung Pariwisata Danau toba	522/2420/Dishut/2020	12 Agustus 2020	Kab. Toba Provinsi Sumatera Utara	0,5	Mekanisme Kerjasama
168	PAPUA	PAPUA	Sadan Intelijen Negara Daerah Papua	Pembangunan Istana Kepresidenan Papua	R. 16/V/2020 tanggal 13 Mei 2020	14/5/2020	Kota Jayapura Provinsi Papua	40	IPPKH
169	KALIMANTAN	KALIMANTAN SELATAN	PT. Sebuku Iron Latentic Ores	OP Biji Besi	43/SILO/DIR-EFT/III/2020 tanggal 27 Maret 2020	08 Mei 2020	Kab. Kotabaru, Prov. Kalimantan Selatan	1709,42	PAK
170	SUMATERA	SUMATERA SELATAN	PT. Bera Anugerah Sejahtera	OP Batubara	011/BAS.BOD/04/2020 tanggal 20 April 2020	15 Mei 2020	Kab. Muara Enim dan Kab. Lahat, Prov. Sumatera Selatan	26,51	PAK
171	KALIMANTAN	KALIMANTAN TIMUR	PT. Nusantara Berau Coal	OP Batubara	74hBC-KLHW/W/2020 tanggal 15 Mei 2020	18 Mei 2020	Kab. Berau, Prov. Kalimantan Timur	591,68	PAK
172	SUMATERA	JAMBI	PT. Sarolangun Ketalo Coal	OP Batubara	001/PPKH/SK/D/III/2020 tanggal 13 Mei 2020	18 Mei 2020	Kab. Sarolangun Prov. Jambi	635,33	PAK
173	MALUKU	MALUKU UTARA	PT. Weda Bay Nikel	OP Nikel	0056/PWBN-LJLO/05/20 tanggal 5 Mei 2020	29 Mei 2020	Kab. Halmahera Timur, Prov. Maluku Utara	938,11	PAK
174	SUMATERA	SUMATERA UTARA	PT. Jajahan Batubara	Operasi Produksi Batubara	009/OP/W/2020 tanggal 14 Mei 2020	17 Mei 2020	Kab. Labuhanbatu utara Provinsi Sumatera Utara	203,35	PAK
175	JAWA	JAWA TENGAH	Kementerian PUPR	Pembangunan Bendungan Bener	PR.0101-Aq.3/Satker Bendungan/222 tanggal 4 Mei 2020	15 Mei 2020	Kab. Purworejo Provinsi Jawa Tengah	40,696	PAK
176	KALIMANTAN	KALIMANTAN TIMUR	PT. Berau Coal	OP Batubara Site Binungan	114/BCL/CC-YNP/III/2020 tanggal 2 Maret 2020	10 Maret 2020	Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur	1039,93	IPPKH
177	SUMATERA	SUMATERA BARAT	LPTD KPHL Bukit Barisan	Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa Air Bersih	522.1/105/KPHL.06-2020	06 Mei 2020	Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat	0,86	Mekanisme Kerjasama
178	SUMATERA	SUMATERA UTARA	PT. Ilampu Electric	PLTA dsp	WPI-20-100-034	14 Mei 2020	Kab. Karo Provinsi Sumatera Utara	59,83	PAK
179	SULAWESI	SULAWESI SELATAN	PT. Arkamira Memorial Stone	OP Marmer		10 Desember 2019	Kab. Pangkajene Provinsi Sulawesi Selatan	12,13	IPPKH
180	SUMATERA	RAU	PT. Riau Green Energy	PLTMB 1X10 MW	013/RGE/DIR/W/0019	17 Juli 2020	Kab. Rokan Hulu Provinsi Riau	5,45	IPPKH
181	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	PT. Graha Equity Investment	OP Mineral logam pasir	05/VIGE/Or/2020 tanggal 18 Juni 2020	23 Juni 2020	Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah	966,06	IPPKH
182	JAWA	JAWA BARAT	SKK MIGAS-PT. Pertamina EP Cepu	Pembangunan fasilitas proyek Pengembangan GAS lapangan	SRT.0240/SK/M/2000/2020/S0	03 Juli 2020	Kab. Cilacap Provinsi Jawa Barat	125	IPPKH
183	JAWA	JAWA BARAT	PT. Banyuwesi Artha	Kepatan Penambangan Pasir	001/PT.BRA/W/2020	15 Juni 2020	Kab. Indramayu, Prov. Jawa Barat	20,51	IPPKH

No	pulau	Provinsi	Nama Perusahaan	Penggunaan	Nomor Permohonan	Tanggal Diterima	Kab/Kota	Luas (ha)	Ket. Permohonan
184	SULAWESI	SULAWESI SELATAN	PT. UPC Sidrap Bayu Energi	Survei potensi sumber daya angin	021.L/DIR/UPC-SISE/IV/2020	25 Mei 2020	Kab. Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan	4,1	PPKH
185	JAWA	JAWA TENGAH	SKK Migas-PT.Pertamina EP	OP Sumur Semanggi	SRT.0229/SKKM/2000/2020/S0	27 Juni 2020	Kab. Blora Provinsi Jawa Tengah	2,38	PPKH
186	KALIMANTAN	KALIMANTAN TIMUR	PT. Cristian Eka Pratama	OP Batubara dtp	015/PT.CEP-KemenLHKM/2020	28 Juni 2020	Kab. Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur	5273	PPKH
187	KALIMANTAN	KALIMANTAN TIMUR	PT. Mahakam Sumber Jaya	OP Batubara	089MSJ/IV/2020 tanggal 11 Juni 2020	20 Juni 2020	Kab. Kutai Kartanegara, Prov Kalimantan Timur	258,93	PAK
188	SUMATERA	RIAU	PT. Mirasindo Perdana	OP Granit	120/S.DIR/UT-LHKM/2020	20 Maret 2020	Kab. Karimun Provinsi Kepulauan Riau	70,136	PAK
189	SULAWESI	SULAWESI TENGGARA	PT. Babarina Putra Solung	OP Nikel	12/SPS/IV/2020 tanggal 25 Mei 2020	02 Juni 2020	Kab. Kolaka, Prov. Sulawesi Tenggara	35,13	PPKH
190	SULAWESI	SULAWESI TENGAH	PT. Bima Cakra Perkasa Mineralindo	OP Nikel	L-005/BCPMDR-JKT/IV/2020 tanggal 12 Mei 2020	02 Juni 2020	Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Tengah	126,75	PPKH
191	SULAWESI	SULAWESI TENGAH	PT. Bima Cakra Perkasa Mineralindo	OP Nikel	L-006/BCPMDR-JKT/IV/2020 tanggal 12 Mei 2020	02 Juni 2020	Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Tengah	70,11	PPKH
192	KALIMANTAN	KALIMANTAN TIMUR	Pusat Koperasi Kartika Mulawaman	OP Batubara	BAAdmin IPPKH/Maw/IV/2020 tanggal 15 Mei 2020	08 Juni 2020	Kab. Kutai Kartanegara, Prov Kalimantan Timur	92,81	PPKH
193	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	PT. Riyanta Jaya	OP Batubara	02/PLAK-RJAN/IV/05/2020 tanggal 11 Juni 2020	11 Juni 2020	Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah	641,86	PPKH
194	KALIMANTAN	KALIMANTAN TIMUR	PT. Mahakam Sumber Jaya	OP Batubara	089MSJ/IV/2020 tanggal 11 Juni 2020	18 Juni 2020	Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur	845,8	PPKH
195	SUMATERA	BENGKULU	PT. Sara Indah Lestari	OP Batubara	005/VISIL-DIR/2020 tanggal 2 Juni 2020	23 Juni 2020	Kab. Seluma, Prov. Bengkulu	570,37	PPKH
196	SUMATERA	BENGKULU	PT. Inti Sara Perdana	OP Batubara	004/WBP-DIR/2020 tanggal 2 Juni 2020	23 Juni 2020	Kab. Bengkulu Tengah, Prov. Bengkulu	347,35	PPKH
197	SULAWESI	SULAWESI UTARA	PT. Sumber Energi Jaya	OP Emas	190/SEJ-JKT/RT/2020 tanggal 2 Juli 2020	02 Juli 2020	Kab. Minahasa Tenggara, Prov. Sulawesi Utara	187,91	PPKH
198	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	PT. Huma Amaz Indonesia	OP Batubara	01.023/HAI-ML-HK/IV/2020 tanggal 17 Juni 2020	09 Juli 2020	Kab. Murung Raya, Prov Kalimantan Tengah	336,7	PPKH
199	SULAWESI	SULAWESI SELATAN	PT. Vale Indonesia	OP Nikel	00373/SBC-JW/2020 tanggal 25 Mei 2020	13 Juli 2020	Kab. Luwu Timur, Prov. Sulawesi Selatan	8174,15	PPKH
200	SUMATERA	MALUKU	SKK Migas - Citic Seram Energy Limited	Eksplorasi Migas	SRT-0224/SKKM/2000/2020/S0 tanggal 18 Juni 2020	02 Juli 2020	Kab. Maluku Tengah, Prov. Maluku	25,32	Eksplorasi
201	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	PT. Asmin Bara Broneng	Eksplorasi Lanjutan Batubara	050/DIR-TEKYAS-ABB/IV/2020 tanggal 8 Juli 2020	09 Juli 2020	Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah	804,48	Eksplorasi
202	KALIMANTAN	KALIMANTAN BARAT	PT. Zikonia	Eksplorasi Zircon	001/ZR/IV/2020 tanggal 9 Juli 2020	09 Juli 2020	Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Barat	1519,1	Eksplorasi
203	KALIMANTAN	KALIMANTAN BARAT	PT. Tayan Alumina Abadi	Eksplorasi Lanjutan Bauksit	002-U-TAA/IV/2020 tanggal 9 Juli 2020	13 Juli 2020	Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat	16668,59	Eksplorasi
204	SUMATERA	SUMATERA SELATAN	PT. Pasir Gajah Utama	Eksplorasi Pasir Kaersa	14/PMH-PGU/IV/2020 tanggal 14 Juli 2020	15 Juli 2020	Kab. Ogan Komering Ilir, Prov Sumatera Selatan	95,3	Eksplorasi
205	SUMATERA	MALUKU	PT. UPC Arbon Bayu Energi	Survey Potensi Angin	0011.L/DIR/UPC-ABE/IV/20 tanggal 25 Juni 2020	29 Juni 2020	Kab. Serang Bagian Timur, Prov. Maluku	2,08	Survei
206	SUMATERA	JAMBI	SKK Migas - PT. Sele Raya Merangin Dua	Survey Minyak dan Gas Bumi	SRT-0234/SKKM/2000/2020/S0 tanggal 23 Juni 2020	13 Juli 2020	Kab. Sarolangun, Prov. Jambi	7318,55	Survei

No	pulau	Provinsi	Nama Perusahaan	Penggunaan	Nomor Permohonan	Tanggal Diberima	Kab/Kota	Luas (ha)	Ket. Permohonan
207	SUMATERA	SUMATERA UTARA	PT. Dairi Prima Mineral	OP Zeng, Timbal	L-048/OPM-CGR/W/2020 tanggal 28 April 2020	15 Mei 2020	Kab. Dairi, Prov. Sumatera Utara	53,11	Perpanjangan IPPKH
208	KALIMANTAN	KALIMANTAN SELATAN	PT. Ciba Budi Bina Makmur	OP Batubara	001/CBBM/W/2020 tanggal 12 Mei 2020	18 Mei 2020	Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan	108,77	Perpanjangan IPPKH
209	SUMATERA	MALUKU	SKK Migas - Cdic Seram Energy Limited	OP Minyak dan Gas Bumi	SRT-0187/SKKM/2000/2020/SO tanggal 08 Mei 2020	20 Mei 2020	Kab. Seram Bagian Timur, Prov. Maluku	552,42	Perpanjangan IPPKH
210	JAWA	JAWA TENGAH	PT. Sejahtera Alam Energy	Eksplorasi Panas Bumi	803-SAE-Ministry of Environment and Forestry RI-03-L-0023 tanggal 8 Mei 2020	06 Juni 2020	Kab. Banyumas dan Kab. Brebes, Prov. Jawa Tengah	662,5	Perpanjangan IPPKH
211	SUMATERA	SUMATERA UTARA	PT. Soporpa Eco Power	PLTA Siborpa 3 X 38 MW	SEP-20-130-0025 tanggal 19 Juni 2020	19 Juni 2020	Kab. Tapanuli Selatan, Prov. Sumatera Utara	140,58	Perpanjangan waktu
212	SULAWESI	SULAWESI UTARA	PT. Minahasa Brantas Energi	PLTA Poigar-2	010/MBE-OPS/W/2020 tanggal 24 Juni 2020	26 Juni 2020	Kab. Minahasa Selatan, Prov. Sulawesi Utara	504,33	Perpanjangan IPPKH
213	KALIMANTAN	KALIMANTAN TIMUR	PT. Mahakam Sumber Jaya	OP Batubara	123/MSJ/W/2020 tanggal 10 Juli 2020	15 Juli 2020	Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur	95,2	Perpanjangan IPPKH
214	JAWA	JAWA TIMUR	Pemerintah Kab. Trenggalek	Ruas Jalan Demosan-Tumpang	593.20213406.011/2020	01 Juli 2020	Kab. Trenggalek Provinsi Jawa Timur	25,001	IPPKH
215	KALIMANTAN	KALIMANTAN SELATAN	PT. Adaro Indonesia	OP Batubara	A/06-W/2014H-BRI/ERO tanggal 28 Mei 2020	02 Juni 2020	Kab. Tabalong dan Kab. Balangan Prov. Kalimantan		Perubahan Areal IPPKH
216	KALIMANTAN	KALIMANTAN TIMUR	CV. Kumala Etam Mining		001/KEM-Dir/W/2020 tanggal 10 Juni 2020	11 Juni 2020	Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur		Perubahan Areal IPPKH
217	SULAWESI	SULAWESI TENGGARA	PT. Antam, Tbk	Eksplorasi Lanjutan Nikel	191008/PAT/2020 tanggal 3 Juni 2020	18 Juni 2020	Kab. Kolaka, Prov. Sulawesi Tenggara	36,8	Perubahan Areal IPPKH
218	NUSA TENGGARA	NUSA TENGGARA	PT. Sumbawa Jata Raya	OP Emas	JEP/DIR-SJRLGL/W/2020 tanggal 9 Juli 2020	09 Juli 2020	Kab. Sumbawa, Prov. Nusa Tenggara Barat	921,17	Perubahan Areal IPPKH
219	JAWA	JAWA BARAT	PT. Solusi Bangun Indonesia	OP Batubara	321/SEBILDCS-DIR/W/2020 tanggal 22 Juni 2020	20 Juli 2020	Kab. , Prov. Jawa Barat	155	Perubahan Areal IPPKH
220	SULAWESI	SULAWESI TENGGARA	PT. Babarina Putra Sulung	OP Nikel	13EPS/W/2020 tanggal 25 Mei 2020	02 Juni 2020	Kab. Kolaka, Prov. Sulawesi Tenggara	35,13	PAK
221	SULAWESI	SULAWESI TENGAH	PT. Bina Cakra Perkasa Mineralindo	OP Nikel	L-005/BCPMDIR-JKT/W/2020 tanggal 12 Mei 2020	02 Juni 2020	Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Tengah	126,75	PAK
222	SULAWESI	SULAWESI TENGAH	PT. Bina Cakra Perkasa Mineralindo	OP Nikel	L-006/BCPMDIR-JKT/W/2020 tanggal 12 Mei 2020	02 Juni 2020	Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Tengah	70,11	PAK
223	KALIMANTAN	KALIMANTAN TIMUR	Pusat Koperasi Kartika Mulawaman	OP Batubara	B/Admin IPPKH/Mw/W/2020 tanggal 15 Mei 2020	08 Juni 2020	Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur	92,81	PAK
224	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	PT. Riyanta Jaya	OP Batubara	03/PLAK-RA/W/05/2020 tanggal 11 Juni 2020	11 Juni 2020	Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah	641,86	PAK
225	KALIMANTAN	KALIMANTAN TIMUR	PT. Mahakam Sumber Jaya	OP Batubara	089/MSJ/W/2020 tanggal 11 Juni 2020	18 Juni 2020	Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur	845,8	PAK
226	SUMATERA	BENGKULU	PT. Bara Indah Lestari	OP Batubara	005/VIBIL-Dir/2020 tanggal 2 Juni 2020	23 Juni 2020	Kab. Seluma, Prov. Bengkulu	570,37	PAK
227	SUMATERA	BENGKULU	PT. Inti Bara Perdana	OP Batubara	004/VIBP-Dir/2020 tanggal 2 Juni 2020	23 Juni 2020	Kab. Bengkulu Tengah, Prov. Bengkulu	347,35	PAK
228	SULAWESI	SULAWESI UTARA	PT. Sumber Energi Jaya	OP Emas	190/SEJ-JKT/RT/2020 tanggal 2 Juli 2020	02 Juli 2020	Kab. Minahasa Tenggara, Prov. Sulawesi Utara	187,91	PAK
229	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	PT. Huma Anas Indonesia	OP Batubara	01-023/HAI-MLHW/W/2020 tanggal 17 Juni 2020	09 Juli 2020	Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah	336,7	PAK

No	pulau	Provinsi	Nama Perusahaan	Penggunaan	Nomor Permohonan	Tanggal Diterima	Kab/Kota	Luas (ha)	Ket. Permohonan
230	SULAWESI	SULAWESI SELATAN	PT. Vale Indonesia	OP Nikel	00373/SSD-JW/2020 tanggal 26 Mei 2020	13 Juli 2020	Kab. Luwu Timur, Prov. Sulawesi Selatan	8174,15	PAK
231	JAWA	JAWA TENGAH	PT. Pertamina EP	OP Sumur Tua (Eksisting)	721EPO500/2020-S0 tanggal 11 Juni 2020	17 Juni 2020	Kab. Bora Provinsi Jawa Tengah	384864	Calakom
232	JAWA	JAWA TIMUR	SKK-Mgas-PT.Pertamina EP	OP Sumur Kawangan (KWG-PCA1)	SRT-0228/SKMM2000/2020/S0 tanggal 22 Juni 2020	25 Juni 2020	Kab. Tuban Provinsi Jawa Timur	2,24	IPPKH
233	KALIMANTAN	KALIMANTAN TIMUR	PT. Inti Pancar Dinamika	Jalan Angkut Batubara	021/PO-DIR/VI/2020 tanggal 11 Mei 2020	17 Mei 2020	Kab. Kotabaru Provinsi Kalimantan Timur	563,56	Perubahan Areal (PPKH)
234	JAWA	JAWA TENGAH	Eko Heri Paji Sulisty	Jalan angkut	0110/04.3/SEKPER/DIR/2020 tanggal 8 Mei 2020	03 Juli 2020	Kab. Pemalang Provinsi Jawa Tengah	0,14	Mekanisme Kerjasama
235	JAWA	JAWA BARAT	PT. Lintas Anugrah Indonesia	Angkutan Hasil Produksi	0085/044.3/SEKPER/DIR/2020 tanggal 14 April 2020	05 April 2020	Kab. Purwakarta Provinsi Jawa Barat		Mekanisme Kerjasama
236	JAWA	JAWA BARAT	PT. Sarana Inti Persda	Penempatan Menara Telekomunikasi	0040/044.3/SEKPER/DIR/2020 tanggal 20 Februari 2020	8 Mei 2020	Kab. Purwakarta Provinsi Jawa Barat		IPPKH
237	JAWA	JAWA TIMUR	PT. Widodo Makmur	Jalan Angkutan Bahan Baku	0130/044.3/SEKPER/DIR/2020 tanggal 20 Mei 2020	25 Mei 2020	Kab. Ngawi Provinsi Jawa Timur	0,21	Mekanisme Kerjasama
238	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	PT. Unggul Nusertara	OP Batubara dsp	08/SP-IPPKH/PT.UNLGL-CH/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020	20 Juni 2020	Kab. Berau Utara	2.539	IPPKH
239	SULAWESI	SULAWESI TENGGARA	Kementerian PUPR	Bendungan Pelosika dsp	PS. 03 01-Mh/457 tanggal 13 Maret 2020	27 Maret 2020	Kab. Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara	1123,61	IPPKH
240	NUSA TENGGARA	NUSA TENGGARA	PT. UPC Kupang Bayu	Potensi Sumber Daya Air	014.LIDIR/UPC-KB/W20 tanggal 27 Mei 2020	15 Juni 2020	Kab. Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	12,43	Survei
241	MALUKU	MALUKU UTARA	PT. Jaya Abadi Sentosa	OP Nikel	006/US/PPKH/W/2020 tanggal 16 Juni 2020	22 Juni 2020	Kab. Halmahera Timur, Prov. Maluku Utara	427,42	IPPKH
242	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	PT. Banyuresmi Artha	OP Galian C	001/PT. BRA/W/2020 tanggal 11 Juni 2020	24 Juni 2020	Kab. Indramayu, Prov. Kalimantan Tengah	20,51	IPPKH
243	JAWA	JAWA TENGAH	SKK Mgas - PT. Pertamina, EP	OP Minyak dan Gas Bumi Sumur Semanggi	SRT-0228/SKMM2000/2020/S0 tanggal 22 Juni 2020	25 Juni 2020	Kab. Bora, Prov. Jawa Tengah	2.3871	IPPKH
244	JAWA	JAWA TIMUR	SKK Mgas - PT. Pertamina, EP	OP Minyak dan Gas Bumi Sumur Kawangan	SRT-0228/SKMM2000/2020/S0 tanggal 22 Juni 2020	25 Juni 2020	Kab. Tuban, Prov. Jawa Timur	2,24	IPPKH
245	JAWA	JAWA TENGAH	PT. PLN (Persero)	Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi	11484/TRS.01.02/B01050000/2020 tanggal 23 Juni 2020	29 Juni 2020	Kab. Semarang, Prov. Jawa Tengah	5.3273	IPPKH
246	SULAWESI	SULAWESI TENGGARA	PT. PLN (Persero)	Transmisi SU/TT	10559/TRS.01.03/B01050000/2020 tanggal 15 Juni 2020	02 Juli 2020	Kab. Kolaka Utara, Kab. Kolaka, Kab. Kolaka Timur, Kab.	74,59	IPPKH
247	KALIMANTAN	KALIMANTAN BARAT	PT. Pusaka Jember Raja	OP Emas	034/LI-PUR/W/2020 tanggal 30 Juni 2020	02 Juli 2020	Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat	982,99	IPPKH
248	JAWA	JAWA TIMUR	PT. Pertamina EP Cepu	Pengembangan Gas Lapangan	SRT-0238/SKMM2000/2020/S0	17 Juli 2020	Kab. Bitar Provinsi Jawa Timur	165	BAST Lahan Kompensasi
249	SUMATERA	SUMATERA UTARA	SKK Mgas - PT. EMP Tonga	OP Minyak dan Gas Bumi	SRT-0214/SKMM2000/2020 tanggal 10 Juni 2020	09 Juli 2020	Kab. Padang Lawas, Prov. Sumatera Utara	2,98	IPPKH
250	MALUKU	MALUKU UTARA	PT. Halmahera Sukses Mineral	OP Bijih Nikel	035H-SMUKT/W/2020 tanggal 8 Juli 2020	13 Juli 2020	Kab. Halmahera Utara, Prov. Maluku Utara	906,2	IPPKH
251	PAPUA	PAPUA BARAT	PT. Kasei Sejahtera Mining	OP Bijih Nikel	008/KSM-JKT/W/2020 tanggal 30 Juni 2020	15 Juli 2020	Kab. Raja Ampat, Prov. Papua Barat	487,04	IPPKH
252	MALUKU	MALUKU UTARA	PT. Sambaki Tambang Sentosa	OP Bijih Nikel	08/STS-IPPKH/W/2020 tanggal 14 Juli 2020	15 Juli 2020	Kab. Halmahera Utara, Prov. Maluku Utara	680,97	IPPKH

No	pulau	Provinsi	Nama Perusahaan	Penggunaan	Nomor Permohonan	Tanggal Diterima	Kab/Kota	Luas (ha)	Ket. Permohonan
253	KALIMANTAN	KALIMANTAN BARAT	PT. Laman Mining	OP Baukit	27LM-PUS/TAM/VI/2020 tanggal 15 Juli 2020	20 Juli 2020	Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat	17,3	IPPKH
254	SUMATERA	JAMBI	SKK Migas - Petrochina Internasional Jabung, Ltd	OP Minyak dan Gas Bumi	SRT-0209/SKKM/2000/2020/S0 tanggal 5 Juni 2020	22 Juli 2020	Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi	46,08	IPPKH
255	SUMATERA	JAMBI	SKK Migas - Petrochina Internasional Jabung, Ltd	OP Minyak dan Gas Bumi	SRT-0212/SKKM/2000/2020/S0 tanggal 10 Juni 2020	22 Juli 2020	Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi	13,35	IPPKH
256	KALIMANTAN	KALIMANTAN UTARA	PT. Smar Kumala Naga	OP Batubara	001/SKN-KLHK/VI/20 tanggal 1 Juli 2020	24 Juli 2020	Kab. Kutai Kartanegara	31,3	IPPKH
257	JAWA	JAWA TIMUR	PT. Gema Nusantara Group	Jalan menuju wisata edukasi gondang outbond (WEGO)	0125/044.3/SEK/PERIODIR/2020 tanggal 20 Mei 2020	27 Juli 2020	Kab. Lamongan Provinsi Jawa Timur	0,3188	Kerjasama
258	SULAWESI	SULAWESI TENGGARA	PT. Bola Dunia Mandiri	OP. Nikel dmp	141/SOM/DIR/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020	25 Juni 2020	Kab. Kotaka Provinsi Sulawesi Tenggara	256,96	IPPKH
259	SUMATERA	SUMATERA UTARA	Pemerintah Kabupaten Tapanuli	Pembangunan tempat wisata rohani	660/223/2014/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020	27 Desember 2019	Kab. Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara	72,21	PAK
260	SUMATERA	LAMPUNG	PT. PLN (Persero)	Pembangunan Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150	6901/TRS.01.03/A/10400/2020 tanggal 13 Agustus 2020	04 Juni 2020	Kab. Pesisir Barat Provinsi Lampung	17,04	IPPKH
261	KALIMANTAN	KALIMANTAN TIMUR	PT. Ganda Alam Makmur	OP. Batubara	138/GAM/VI/2020		Kab. Kutai Provinsi Kalimantan Timur	1104,5	PAK
262	SULAWESI	SULAWESI TENGAH	PT. Anora Hydro	PLTM Koro Yaetu (2X5MW)	007/AHS/2020	14/7/2020	Kab. Poso Provinsi Sulawesi Tengah	51,52	PAK
263	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	PT. Tri Oetama Persada	Jalan Angkut Tambang dan Stockpile	002/TROPS/IPPKH/VI/2020	17 Juni 2020	Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah	10000	IPPKH
264	SULAWESI	SULAWESI TENGAH	PT. Vile Indonesia	OP Nikel	00562/CEO-J/VI/2020 tanggal 28 Juli 2020	03 Agustus 2020	Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Tengah	13029,26	IPPKH
265	KALIMANTAN	KALIMANTAN TIMUR	PT. Kalin Nusantara Coal	OP Batubara	122/KNC-KLHK/VI/2020 tanggal 27 Juli 2020	04 Agustus 2020	Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur	847,13	IPPKH
266	SUMATERA	LAMPUNG	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Jalan Tol Bakauheni -Terbanggi	PS.03.01-Mn/1315 tanggal 5 Agustus 2020	24 Agustus 2020	Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung	167,6	IPPKH
267	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	PT. Pada Id	OP Batubara	134/PTPI-LG/VI/2020 tanggal 10 Agustus 2020	25 Agustus 2020	Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah	994,99	IPPKH
268	SUMATERA	SUMATERA SELATAN	PT. Citra Multi Energi	Jaringan Transmisi 20 kV	059/CME-GR/VI/2020 tanggal 18 Agustus 2020	26 Agustus 2020	Kab. Humbang Hasundutan Prov. Sumatera Selatan	0,44	IPPKH
269	YOGYAKARTA	DI YOGYAKARTA	Kementerian Pertahanan	Bendungan sarana dan prasarana	B/1501/03/10/72/DJKUAT	31/8/2020	Kab. Gunung Kidul Provinsi Yogyakarta	42,45	IPPKH
270	SULAWESI	SULAWESI SELATAN	PLTA Kabeera	PLTA Kabeera	05/SRP-Leg-VI/2020 tanggal 28 Juli 2020	27 Agustus 2020	Kab. Luwu Timur, Prov. Sulawesi Selatan	80,45	IPPKH
271	PAPUA	PAPUA BARAT	SKK Migas - Petrogas (Basin) Ltd	Ekisting Minyak dan Gas Bumi	SRT-0290/SKKM/2000/2020/S0 tanggal 26 Agustus 2020	28 Agustus 2020	Kab. Sorong, Prov. Papua Barat	675,71	IPPKH
272	KALIMANTAN	KALIMANTAN SELATAN	PT. Bahari Cakrajaya Sebulka	OP Batubara	B/C3-SHL-068/IPPKH/VI/2020 tanggal 28 Agustus 2020	02 September 2020	Kab. Kotabaru, Prov. Kalimantan Selatan	1,61	IPPKH
273	SUMATERA	SUMATERA SELATAN	PT. Trans Power Indonesia	Jalan Angkut Batubara	065/TP-JKT/VI/2020 tanggal 24 Agustus 2020	02 September 2020	Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan	3,4	IPPKH
274	SUMATERA	SUMATERA UTARA	PT. Sjailendra Utama Energy	PLTM Aek Smonggo 2 x 4 MW	003/PT-SUE/VI/2020 tanggal 1 September 2020	03 September 2020	Kab. Humbang Hasundutan, Prov. Sumatera Utara	12,06	IPPKH
275	JAWA	JAWA BARAT	PT. Pusaka Marmor Indonesia	OP Batu Marmor	058/IPPKH-PM/IX/2020 tanggal 7 September 2020	08 September 2020	Kab. Bandung Barat, Prov. Jawa Barat	25,75	IPPKH

No	pusa	Provinsi	Nama Perusahaan	Penggunaan	Nomor Permohonan	Tanggal Diterima	Kab/Kota	Luas (ha)	Ket. Permohonan
276	KALIMANTAN	KALIMANTAN TIMUR	SKK Migas - PT. Pertamina Hulu Mahakam	OP Minyak dan Gas Bumi	SRT-0307/SKMM/2000/2020/S0 tanggal 4 September 2020	09 September 2020	Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur	0,591	PPKH
277	KALIMANTAN	KALIMANTAN TIMUR	PT. PLN (Persero)	Pembangunan PLTU Malinau	184729KT 02 01/BO1050000/2020 tanggal 24 Agustus 2020	10 September 2020	Kab. Malinau, Prov. Kalimantan Timur	6,087	PPKH
278	KALIMANTAN	KALIMANTAN TIMUR	PT. Giga Putra Kuari	OP Batuan	04/GPK/00/2020 tanggal 8 September 2020	10 September 2020	Kab. Paser, Prov. Kalimantan Timur	10,05	PPKH
279	SUMATERA	JAMBI	SKK Migas - PT. Sele Raya Merangin Dua	Operasi Produksi Minyak dan Gas Bumi	SRT-0308/SKMM/2000/2020/S0 tanggal 4 September 2020	10 September 2020	Kab. Sarolangun, Prov. Jambi	20,21	PPKH
280	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	PT. Permata Indah Energi	Terminal Khusus	11/SP-PPKH/PT. PIS/LGL-HOIX/2020 tanggal 11 September	10 September 2020	Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah	18	PPKH
281	SULAWESI	SULAWESI TENGAH	PT. Prima Mineral Abadi	OP Batuan	PMA-LDI001/IX/2020 tanggal 10 September 2020	11 September 2020	Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Tengah	317,55	PPKH
282	JAWA	JAWA BARAT	PT. Godda Wijaya	OP Marmor	10/GMIX/2020 tanggal 10 September 2020	14 September 2020	Kab. Cianjur, Prov. Jawa Barat	27,69	PPKH
283	SULAWESI	SULAWESI TENGAH	PT. PAM Mineral	OP Nikel	025/PAM-Mineral/UKT/Dir/IX/2020 tanggal 14 September 2020	14 September 2020	Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Tengah	206,49	PPKH
284	KALIMANTAN	KALIMANTAN SELATAN	PT. Wahana Baratana Mining	OP. Batubara tpp	2020WBM-MENLHKUKT/IX/2020 tanggal 30 September 2020	07 Oktober 2020	Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan	78,11	Perpanjangan dan Perubahan
285	JAWA	JAWA BARAT	PT. Jawa Satu Power	PLTGU Jawa 1 tpp	060/USP0000/2020	09 September 2020	Kab. Karawang Provinsi Jawa Barat	14.612	PAK
286	SUMATERA	SUMATERA BARAT	PT. Arojuka Mandiri	Jalan Angkut Tambang	7925-AM/PPKH/VI/2020 tanggal 25 Agustus 2020	14 September 2020	Kab. Solok, Prov. Sumatera Barat	3,32	PPKH
287	JAWA	JAWA BARAT	PT. Petro Inovasi Indonesia	OP Batu Trass	0109/SP-PPKH/PI-IX/2020 tanggal 17 September 2020	18 September 2020	Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat	4	PPKH
288	SULAWESI	SULAWESI UTARA	PT. Mega Energy Sulawesi	PLTA	0KRME/SIADM/2/IX/2020 tanggal 16 September 2020	18 September 2020	Kab. Mahesa Selatan dan Solikang Mongondow, Prov.	375,53 dan 54,47	PPKH
289	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	PT. Supraban Mepanindo Mineral	OP Batubara	132/SMMEXT/IX/2020 tanggal 9 September 2020	18 September 2020	Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah	1000	PPKH
290	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	PT. Adin Dara Bronang	OP Batubara	073DIR-TEKYAS-ABB/IX/2020 tanggal 17 September 2020	21 September 2020	Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah	1000	PPKH
291	KALIMANTAN	KALIMANTAN TIMUR	PT. Bera Tabang	OP Batubara	043BT-MENLHKUKT/IX/2020 tanggal 23 September 2020	24 September 2020	Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur	965,73	PPKH
292	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	PT. Sungai Batu Utama	OP Zircon	01/MS-GA/IX/2020 tanggal 17 September 2020	25 September 2020	Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah	89,78	PPKH
293	JAWA	JAWA TENGAH	PT. Akso Energy Indonesia	Pembangunan Menara Angin	0053/004 3/Sekep/Dir/2020	13 Mei 2020	Kab. Brebes Provinsi Jawa Tengah	0,78	Mekanisme Kerjasama
294	JAWA	JAWA TIMUR	PT. PLN (Persero)	Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan	DLHK.522/01/025/NTT-2020	04 September 2020	Provinsi Nusa Tenggara Timur		Mekanisme Kerjasama
295	SUMATERA	LAMPUNG	PT. Telekomunikasi Seluler (PT. Telkomsel)	Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi	522/105/M 24/K.14 2/2020	08 Nopember 2020	Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung	238n	Mekanisme Kerjasama
296	SULAWESI	SULAWESI TENGGARA	PT. Putra Mekongga Sejahtera	OP Nikel	135/PMS-EXST/VI/2020 tanggal 17 Juli 2020	28 Juli 2020	Kab. Kolaka, Prov. Sulawesi Tenggara	358,9	PAK
297	SULAWESI	SULAWESI TENGAH	PT. Anugerah Bangun Makmur	OP Nikel	02DIR/ABMKT/VI/2020 tanggal 30 Juli 2020	05 Agustus 2020	Kab. Banggai, Prov. Sulawesi Tengah	361,02	PAK
298	SUMATERA	SULAWESI TENGAH	PT. Yala Indonesia	OP Nikel	00608/SBD-J/VI/2020 tanggal 5 Agustus 2020	24 Agustus 2020	Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Tengah	8174,15	PAK

No	pusat	Provinsi	Nama Perusahaan	Penggunaan	Nomor Pemohonan	Tanggal Diterima	Kab/Kota	Luas (ha)	Kef. Pemohonan
299	SUMATERA	KEPULAUAN BANGKA	PT. Beltung Sand Mining	OP Pasir Kuarsa	112/BSM/VII/2020 tanggal 26 Agustus 2020	26 Agustus 2020	Kab. Belitung Timur, Prov. Kepulauan Bangka Belitung	133,87	PAK
300	KALIMANTAN	KALIMANTAN TIMUR	PT. Fajar Sakti Prima	Jalan Angkut Batubara	503FSP-KLHKUKTIX/2020 tanggal 2 September 2020	09 September 2020	Kab. Kutai Barat dan Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan	300,69	PAK
301	SULAWESI	SULAWESI TENGGARA	PT. Jagad Rayatama	OP Nikel	0011JR-BKPMIX/2020 tanggal 17 September 2020	24 September 2020	Kab. Konawe Selatan, Prov. Sulawesi Tenggara	20,84	PAK
302	KALIMANTAN	KALIMANTAN SELATAN	PT. Anugerah Tjahj Sejaht	OP Batubara	18ATS-SPIOFFIX/2020 tanggal 25 September 2020	25 September 2020	Kab. Tapin, Prov. Kalimantan Selatan	53,43	PAK
303	JAWA	JAWA BARAT	PT. Bahera Bayu Persada	PLTM Cibatuas	530BPM-PPW/2020 tanggal 17 Juli 2020	12 Juni 2020	Kab. Garut Provinsi Jawa Barat	8,5	Calakom
304	SUMATERA	MALUKU	SKK Migas-Inpek Masela Ltd	Migas	0277/SKKM/2000/2020/S0	15 Juli 2020	Kab. Tambora Provinsi Maluku	1406,525	Survei
305	JAWA	JAWA BARAT	PT. Mendin Sejahtera Sentra	OP Batu Andesit	016MSS-CORSELALDNIW/2020 tanggal 16 Juli 2020	25 Juli 2020	Kab. Purwakarta, Prov. Jawa Barat	25	Perpanjangan IPPKH
306	JAWA	JAWA BARAT	PT. Indonesia Power	PLTM Cieunca	0657/120/PI/2020	15 Juli 2020	Kab. Bandung Provinsi Jawa Barat	0,6015	PAK
307	SULAWESI	SULAWESI TENGGARA	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembangunan Bendungan Amero dso	PS.03.01-Mn/1192	20 Juli 2020	Kab. Konawe Prov. Sulawesi Tenggara	425,21	IPPKH
308	KALIMANTAN	KALIMANTAN SELATAN	PT. Eternal Richway	OP Batu Gamping	141ERVI/2020 tanggal 27 Juli 2020	11 Agustus 2020	Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan	5,99	Perpanjangan IPPKH
309	KALIMANTAN	KALIMANTAN TIMUR	PT. Indominco MANDIRI	OP Batubara	1132LUMWERTG/2020 tanggal 14 Agustus 2020	26 Agustus 2020	Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur	11718,2	Perpanjangan IPPKH
310	KALIMANTAN	KALIMANTAN TIMUR	PT. Indominco MANDIRI	OP Batubara	1733LUMWERT/2020 tanggal 14 Agustus 2020	26 Agustus 2020	Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur	4500,1	Perpanjangan IPPKH
311	JAWA	JAWA TENGAH	CY. Tasa Citra	OP Batu Feldspar	027DIX/2020 08/09/2020	10 September 2020	Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah	2,5	Perpanjangan IPPKH
312	JAWA	JAWA BARAT	PT. Atlasindo Utama	OP Batu Andesit	078GSAUIIX/2020 tanggal 9 September 2020	10 September 2020	Kab. Karawang, Prov. Jawa Barat	14	Perpanjangan IPPKH
313	JAWA	JAWA TIMUR	PT. Medco Cahaya Geothermal	Eksplorasi Panas Bumi	100G-555DIR/IX/2020 tanggal 14 September 2020	14 September 2020	Kab. Bondowoso, Prov. Jawa Timur	1303	Perpanjangan IPPKH
314	JAWA	JAWA TIMUR	Sah. Widodo	Jalan/Air untuk aksesibilitas Pengangkutan Bahan Material	0126/044.3/SEKPERDIR/2020	10 Juli 2020	Kab. Probolinggo, Prov. Jawa Timur		Mekanisme Kerjasama
315	SUMATERA	KEP. RIAU	Mentan PUPR	Pembangunan Bendungan Muara Sei Gong	PR.0101/BWS4/002 tanggal 26 Desember 2020	07 Januari 2020	Kota Batam Provinsi Riau	286,805	PAK
316	SUMATERA	SUMATERA SELATAN	PT. Sumbagsel Energi Sakti Paskel	PLTU	031/SSP-PEMVI/2020 tanggal 16 Juli 2020	21 Juli 2020	Kab. Ogan Komering Lili, Prov. Sumatera Selatan	102,51	PAK
317	SUMATERA	MALUKU	SKK Migas - Balan Energy, Ltd. Pa	Survei Migas	SRT-0125-SKKM/2000/2020/S0 tanggal 10 Maret 2020	23 April 2020	Kab. Serang Bagian Timur, Prov. Maluku	500 KM	
318	SULAWESI	SULAWESI UTARA	PT. Infrastruktur Terbanakan Kusuma	Survei Potensi Angin	0161TKVI/2020 tanggal 30 Juli 2020	04 Agustus 2020	Kab. Minahasa Utara, Prov. Sulawesi Utara	1,5881	Survei
319	KALIMANTAN	KALIMANTAN TIMUR	SKK Migas - PT. Pertamina EP	Survei Minyak dan Gas Bumi survei seismik 2D batu utak	SRT-0276-SKKM/2000/2020/S0 tanggal 5 Agustus 2020	10 Juli 2020	Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur	5763,93	Survei
320	KALIMANTAN	KALIMANTAN SELATAN	PD. Barataa Tumbang Pandang	OP Biji Besi	BTTP-25A/OPS/2020 tanggal 28 Februari 2020	04 Maret 2020	Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan	23,49	Perpanjangan IPPKH
321	JAWA	BANTEN	PT. Sintesa Banten Geothermal	Eksplorasi Panas Bumi	SBGDRLT/08/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020	03 Agustus 2020	Kab. Serang, Prov. Banten	16,61	Eksplorasi

No	ulas	Provinsi	Nama Perusahaan	Penggunaan	Nomor Permohonan	Tanggal Diterima	Kab/Kota	Luas (ha)	Ket. Permohonan
322	KALIMANTAN	KALIMANTAN TIMUR	PT. Mutiara Merdeka Jaya	OP Batubara	021/MMU-Di/UKT/IX/2020 tanggal 11 September 2020	15 September 2020	Kab. Kutai Provinsi Kalimantan Timur	139,58	PAK
323	SUMATERA	JAMBI	PT. Marga Bara Jaya	Jalan Angkut Batubara	033/MSJ/IX/2020 tanggal 01 Oktober 2020	06 Oktober 2020	Kab. Batanghari Provinsi Jambi	420,73	PAK
324	JAWA	JAWA BARAT	PT. Geo Dipa	Lokasi Sumur Panas Bumi	031/PST-30-GDE/IX/2020 tanggal 09 September 2020	15 Oktober 2020	Kab. Banjarnegara Provinsi Jawa Barat	1,5	Calakom
325	JAWA	JAWA BARAT	Cv. Kibar Sarimukid	Pemambangan Batu Gamping	055/VIK/SM/2020	29 Juli 2020	Kab. Bandung Jawa Barat	9.521	PAK
326	KALIMANTAN	KALIMANTAN UTARA	SKK-Migas PT. Pertamina EP	Eksplorasi Migas	Srj-0143/SKKM/2000/2020	17 Juni 2020	Kab. Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara	187,67	PPKH
327	JAWA	JAWA BARAT	PT. Geo Dipa Energi	PLTP Patuha unit 2	320/PST-00-GDE/IX/2020 tanggal 9 September 2020	01 Oktober 2020	Kab. Bandung , Prov. Jawa Barat	2,8	PPKH
328	SUMATERA	SUMATERA SELATAN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembangunan Jalan Tol Simpang Indralaya - Muara Enim Tahap 3	PS.03.01-Mh/21/30 tanggal 26 Oktober 2020	27 Oktober 2020	Kab. Muara Enim Prov. Sumatera Selatan	317,88	PPKH
329	SUMATERA	RIAU	SKK-Migas - EMP Buntu Ltd	Sesmk 2d dan 3d	SRT.0313/SKKM/2000/2020/S0 tanggal 9 September 2020	23 September 2020	Kab. Kampar Provinsi Riau	10247,53	Perpanjangan PKH
330	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	PT. Asmin Bara Bronang	OP Batubara	086/DR-TEKYAS-ABB/IX/2020 tanggal 20 Oktober 2020	04 Nopember 2020	Kab. Kapuas dan Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah	2990,16	PAK
331	KALIMANTAN	KALIMANTAN SELATAN	PT. Energi Batubara Lestari	OP Batubara	0901/EBL-UKT/DIR-LM051/IX-2020 tanggal 3 Oktober 2020	12 Oktober 2020	Kab. Tapin, Prov. Kalimantan Selatan	182,62	PAK
332	JAWA	JAWA TIMUR	Bupati Bojonegoro	Waduk Gongseng	522/6454/12.204/2020 tanggal 27 Oktober 2020	11 Oktober 2020	Kab. Bojonegoro Provinsi Jawa Timur	359,72	PAK
333	SUMATERA	BANGKA BELITUNG	PT. Budaya Tropis Indoperkasa	Pipa saluran Air	522/202/KPH-EP-III/2020 tanggal 31 Agustus 2020	12 Agustus 2020	Kab. Bangka kep. Babel	0,82	Kerjasama
334	KALIMANTAN	KALIMANTAN SELATAN	PT. Angsana Jaya Energi	Pembangunan Jalan Angkutan Batubara	451/AJE/PPKH-IX/2020 tanggal 7 Desember 2020	18 Nopember 2020	Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan	21,32	PPKH
335	KALIMANTAN	KALIMANTAN TIMUR	PT. Indo Bara Pratama	Jalan Angkut Batubara	06/EP-PPKH/IX/2020 tanggal 14 Februari 2020	14 Februari 2020	Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur	17,99	PPKH
336	SUMATERA	SUMATERA SELATAN	SKK Migas - PT. Pertamina, EP	OP Minyak dan Gas Bumi	SRT-0326/SKKM/2000/2020/S0 tanggal 22 September 2020	27 Oktober 2020	Kab. Muara Enim, Kota Prabumulih, Kab. Musi	92,43	PPKH
337	SUMATERA	SUMATERA SELATAN	SKK Migas - PT. Pertamina, EP	OP Minyak dan Gas Bumi	SRT-0311/SKKM/2000/2020/S0 tanggal 24 September 2020	27 Oktober 2020	Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan	1,30	PPKH
338	SUMATERA	SUMATERA SELATAN	SKK Migas - PT. Pertamina, EP	OP Minyak dan Gas Bumi	SRT-0333/SKKM/2000/2020/S0 tanggal 24 September 2020	27 Oktober 2020	Kab. Penakal Abab Lematang Ilir, dan Kab. Muara Enim, Prov.	54,44	PPKH
339	SUMATERA	KALIMANTAN TENGAH	CV. Delapan Enam	OP Batubara	045-EM/SP-PPKH/CD- LHK/IX/2020 tanggal 2 Nopember	03 Nopember 2020	Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Tengah	24,66	PPKH
340	SUMATERA	MALUKU UTARA	PT. Mineral Tobos	Jalan Angkutan Tambang	302/SK/MT-XI/2020 tanggal 2 Nopember 2020	03 Nopember 2020	Kab. Halmahera Tengah, Prov. Maluku Utara	1,23	PPKH
341	SUMATERA	SUMATERA SELATAN	PT. PLN (Persero)	Transmisi SUTT dan USC 150 kV GI Tanjung Api-Ai - Landing Point	14459/TRS.01.03/601050000/2020 tanggal 23 Oktober 2020	09 Nopember 2020	Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan	1,31	PPKH
342	KALIMANTAN	KALIMANTAN TIMUR	SKK Migas - PT. Pertamina Hulu Mahakam	OP Minyak dan Gas Bumi	SRT-0387/SKKM/2000/2020/S0 tanggal 5 Nopember 2020	10 Nopember 2020	Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur	315,61	PPKH
343	NUSA TENGGARA	NUSA TENGGARA	PT. PLN (Persero)	SUTT 150 KV Kupang Peaker - Nabonat	27881/TRS.01.03/601050000/2020 tanggal 11 Nopember 2020	18 Nopember 2020	Kab. Manggarai Barat, Kab. Kupang dan Kota Kupang, Prov.	2,5	PPKH
344	KALIMANTAN	KALIMANTAN TIMUR	PT. PLN (Persero)	Pembangunan SUTT 150 KV Kariangtu - Sepaku	28006/TRS.01.03/601050000/2020 tanggal 12 Nopember 2020	18 Nopember 2020	Kab. Kutai Timur dan Kab. Berau, Prov. Kalimantan Timur	98,24	PPKH



No	pulau	Provinsi	Nama Perusahaan	Penggunaan	Nomor Permohonan	Tanggal Diterima	Kab/Kota	Luas (ha)	Ket. Permohonan
345	KALIMANTAN	KALIMANTAN TIMUR	PT. PLN (Persero)	Pembangunan SUTT 150 kV Tanjung Redeb – Talisayan	28007/TRS.01.03/B01050000/2020 tanggal 12 Nopember 2020	18 Nopember 2020	Kab. Kutai Timur dan Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur	148,92	IPPKH
346	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	PT. Panca Duta Kalteng	OP Emas DMP	011/PDK/XI/2020 tanggal 5 Nopember 2020	20 Nopember 2020	Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah	173,17	IPPKH
347	SULAWESI	SULAWESI TENGGARA	PT. Apollo Nickel Indonesia	OP Nikel	01/ADM/APOLLO-KemLHK/PPKH/XI/2020 tanggal	20 Nopember 2020	Kab. Konawe Utara, Prov. Sulawesi Tenggara	99,3	IPPKH
348	KALIMANTAN	KALIMANTAN SELATAN	PT. Arutmin Indonesia	OP Batubara	5033/AI/XI/2020 tanggal 13 November 2020	19 Nopember 2020	Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan	336,96	IPPKH
349	SULAWESI	SULAWESI TENGGARA	PT. Bumi Sentosa Jaya	OP Nikel	001/BSJ-IPPKH/XI/2020 tanggal 27 November 2020	27 Nopember 2020	Kab. Konawe Utara, Prov. Sulawesi Tenggara	193,29	IPPKH
350	SULAWESI	SULAWESI TENGGARA	PT. Karya Alam Abadi	OP Nikel	008/KAA-IPPKH/XI/2020 tanggal 27 November 2020	27 Nopember 2020	Kab. Konawe Utara, Prov. Sulawesi Tenggara	230,78	IPPKH
351	KALIMANTAN	KALIMANTAN UTARA	Kementerian Pertahanan	Pembangunan sarana dan prasarana latihan tempur TNI AD	B/3099/03/10/832/DJKUAT	02 Desember 2020	Kab. Nunukan Provinsi Kalimantan Utara	310	IPPKH
352	SULAWESI	SULAWESI TENGGARA	PT. Citra Silika Mallawa	OP Nikel	068/B/Dir/DG-CSM/XI/2020 tanggal 26 November 2020	27 Nopember 2020	Kab. Kolaka Utara, Prov. Sulawesi Tenggara	230,47	IPPKH
353	MALUKU	MALUKU UTARA	PT. Bintani Megah Indah	OP Bijih Besi	06/DIR/BM/06/KT/XI/2020 tanggal 11 November 2020	27 Nopember 2020	Kab. Pulau Taliabu, Prov. Maluku Utara	105	IPPKH
354	SULAWESI	SULAWESI TENGAH	PT. Nusajaya Persadatama Mandiri	Eksplorasi Lanjutan Nikel	036/KLHK-ISS/IX/2020 tanggal 8 September 2020	08 September 2020	Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Tengah	1390	Eksplorasi
355	SUMATERA	SUMATERA UTARA	PT. Agincourt Resources	Eksplorasi Lanjutan Emas	PTAR-1139/X-20/DIR tanggal 8 September 2020	10 September 2020	Kab. Tapanuli Selatan, Prov. Sumatera Utara	9356	Eksplorasi
356	MALUKU	MALUKU UTARA	PT. Star Energy Geothermal Indonesia	Eksplorasi Panas Bumi	SEGI/14-PGPAS/VII/2020 tanggal 24 Agustus 2020	15 September 2020	Kab. Halmahera Utara, Prov. Maluku Utara	52,51	Eksplorasi
357	KALIMANTAN	KALIMANTAN TIMUR	PT. Tiwa Abadi	Eksplorasi Lanjutan Batubara	007/TA-MENLHK/JKT/IX/2020 tanggal 23 September 2020	24 September 2020	Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur	1516,07	Eksplorasi
358	SULAWESI	SULAWESI TENGAH	PT. Wosindo Perkasa	Pembangunan Jalan angkut tambang	WP/002/IX/2020 22/09/2020	28 September 2020	Kab. Morowali provinsi Sulawesi Tengah	477	IPPKH
359	KALIMANTAN	KALIMANTAN SELATAN	PT. Pelsart Tambang Kencana	Eksplorasi lanjutan Emas	009/PTK-HO/GH/LIC/IX/2020 tanggal 12 Oktober 2020	16 Oktober 2020	Kab. Kotabaru, Prov. Kalimantan Selatan	1871,29	Eksplorasi
360	SUMATERA	SUMATERA UTARA	SKK Migas - PT. Pertamina, EP	Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi	SRT-0344/SKKMI2000/2020/S0 tanggal 29 September 2020	22 Oktober 2020	Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara	4,21	Eksplorasi
361	SUMATERA	SUMATERA SELATAN	PT. Semen Baturaja	Eksplorasi Batu Gamping	HK.03.21/4061/2020 tanggal 28 Oktober 2020	03 Nopember 2020	Kab. Ogan Komering Ulu, Prov. Sumatera Selatan	4004	Eksplorasi
362	MALUKU	MALUKU UTARA	PT. Nusa Halmahera Mineral	Eksplorasi Lanjutan Emas	L272/11/2020/NHM-RNW tanggal 3 Nopember 2020	03 Nopember 2020	Kab. Halmahera Utara, Prov. Maluku Utara	4564,42	Eksplorasi
363	MALUKU	MALUKU UTARA	PT. Gunung Makmur Indah	Eksplorasi Emas	21/GMI/KX/1/2020 tanggal 5 Nopember 2020	16 Nopember 2020	Kab. Seram Bagian Barat, Prov. Maluku Utara	1196,6	Eksplorasi
364	KALIMANTAN	KALIMANTAN BARAT	Badan nasional Pengelola Perbatasan	Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sei Kelik	BWN/86.01/2231/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020	25 Oktober 2020	Kab. Sintang Provinsi Kalimantan Barat	4,21	IPPKH
365	SUMATERA	JAMBI	SKK Migas - Repsol Exploracion South East Jambi, BV	Survey Minyak dan Gas Bumi	SRT-0343/SKKMI2000/2020/S0 tanggal 29 September 2020	06 Oktober 2020	Kab. Sarolangun, Prov. Jambi	132 KM	Survei
366	SULAWESI	SULAWESI TENGGARA	PT. UPC Buton Energi Terbarukan	Survey Potensi Angin		13 Oktober 2020	Kab. Buton Selatan Prov. Sulawesi Tenggara	3,5	Survei
367	JAWA	JAWA BARAT	Geo Dipa Energi (Persero), PT	Permohonan persetujuan atas tambahan calon lahan kompensasi	126/PST 00-GDE/III/2020	19 Maret 2020	kab. Bandung Provinsi Jawa Barat	1,5	Persetujuan Calon Lahan

No	pulau	Provinsi	Nama Perusahaan	Penggunaan	Nomor Permohonan	Tanggal Diterima	Kab/Kota	Luas (ha)	Ket. Permohonan
368	JAWA	JAWA BARAT	Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) PT	Pembangunan Jalur Kereta Cepat Jakarta - Bandung	3547/DIRSECDIR/10.20	25 Oktober 2020	Kab. Sukabumi, Prov. Jawa Barat	63,89	Peretujuan Calon Lahan
369	JAWA	JAWA BARAT	Koperasi Keluarga Kasepuhan Sejahtera	IPPKH untuk Usaha Pertambangan Pasir	01/KKKSIX/2020	11 September 2020	Kab. Cirebon Provinsi Jawa Barat	8,8207	Peretujuan Calon Lahan
370	JAWA	JAWA TIMUR	Bupati Tulungagung	Permohonan Persetujuan Calon Lahan Kompensasi untuk Trase	660.1/900407.118/2019	02 Agustus 2019	Kab. Tulungagung Provinsi Jawa Timur		Peretujuan Calon Lahan
371	JAWA	JAWA TIMUR	PT. Pertamina Cepu ADK	Migas Eksistig di Cepu dan Bojonegara	255/CPA00/2020-S0	21 Oktober 2020	Provinsi Jawa Timur		BAST Lahan Kompensasi
372	KALIMANTAN	KALIMANTAN SELATAN	PT. Jorong Barutama Greston	Batubara dip	2091/LUBGIER/9/2020 tanggal 30 September 2020	13 Oktober 2020	Kab. Tanah Laut Provins Kalimantan selatan	4883	Perpanjangan IPPKH
373	SULAWESI	SULAWESI TENGAH	PT. Snergi Raya Utama	Pembangkit Listrik Tenaga Air	007/SRUITWS-AST/2020 tanggal 13 Nopember 2020	18 Nopember 2020	Kab. Morowali Utara, Prov. Sulawesi Tengah	53,27	Perpanjangan IPPKH
374	SUMATERA	SUMATERA BARAT	PT. Multi Energi Dinamika	Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro	0443/UMEDHSS/2020 tanggal 10 November 2020	20 Nopember 2020	Kab. Pesisir Selatan, Prov. Sumatera Barat	4,5	Perpanjangan IPPKH
375	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	PT. Berkah Bumi Persada	Jalan Angkut Batubara	027/BBP-JKT/W/2020 tanggal 24 Agustus 2020	02 September 2020	Kab. Bario Utara, Prov. Kalimantan Tengah	55,43	Perubahan Areal IPPKH
376	SUMATERA	KALIMANTAN TENGAH	PT. Yatra Energy	OP Batubara	201/NEY/2020 tanggal 2 September 2020	08 September 2020	Kab. Bario Utara, Prov. Kalimantan Tengah	95,5	Perubahan Areal IPPKH
377	SUMATERA	BANGKA BELITUNG	PT. Misa Stania Prima	OP Timah	201/MSP/DIR/UT/2020 tanggal 12 Oktober 2020	14 Oktober 2020	Kab. Bangka Tengah, Prov. Kep. Bangka Belitung	329,56	Perubahan Areal IPPKH
378	KALIMANTAN	KALIMANTAN SELATAN	PT. Kalimantan Energi Lestari	OP Batubara	0523/KEL-SKPM/2020 tanggal 12 Nopember 2020	18 Nopember 2020	Kab. Kotabaru, Prov. Kalimantan Selatan	438,44	Perubahan Areal IPPKH
379	SULAWESI	SULAWESI TENGGARA	PT. Konutera Sejaht	OP Nikel	KS/0301020-01/PPKH tanggal 30 Oktober 2020	23 Nopember 2020	Kab. Kolaka, Prov. Sulawesi Tenggara	995,68	Perubahan Areal IPPKH
380	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	PT. Batubara Dwaribu Abadi	OP Batubara	066/BOA/2020 tanggal 13 Oktober 2020	12 Oktober 2020	Kab. Bario Utara dan Kab. Bario Selatan, Prov. Kalimantan	9488,2	PAK
381	SUMATERA	SUMATERA SELATAN	PT. Bukit Asam	OP Batubara	T/126-J0400/HK.07.01/2020 tanggal 13 Oktober 2020	14 Oktober 2020	Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan	14958,62	PAK
382	KALIMANTAN	KALIMANTAN TIMUR	PT. Multi Harapan Utama	OP Batubara	435/OLM/BU-SOD/2020/22 Oktober 2020	06 Nopember 2020	Kab. Kutai, Provinsi Kalimantan Timur		PPKH
383	SUMATERA	BANGKA BELITUNG	PT. Tambang Jaya Indah	OP Pasir Kwarsa	070/TJIX/2020 tanggal 5 Oktober 2020	14 Oktober 2020	Kab. Bangka Tengah, Prov. Kep. Bangka Belitung	95,51	PAK
384	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	PT. Misa Bario	OP Batubara	067/DIR-MB/2020 tanggal 15 Oktober 2020	15 Oktober 2020	Kab. Bario Utara, Prov. Kalimantan Tengah	135,5	PAK
385	SUMATERA	JAMBI	SKK Migas-Petrochina Internasional Jabung, Ltd	OP Minyak dan Gas Bumi	SRT-0299/SKKM/2000/2020 tanggal 1 September 2020	11 Oktober 2020	Kab. Tanjung Jabung Barat, Prov. Jambi	1,71	PAK
386	SUMATERA	JAMBI	SKK Migas-Petrochina Internasional Jabung, Ltd	OP Minyak dan Gas Bumi	SRT-0297/SKKM/2000/2020 tanggal 31 Agustus 2020	11 Oktober 2020	Kab. Tanjung Jabung Barat, Prov. Jambi	12,53	PAK
387	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	DV. Permata Indah	OP Batubara	007/DIR-PI/2020 tanggal 15 Oktober 2020	16 Oktober 2020	Kab. Bario Utara, Prov. Kalimantan Tengah	658,53	PAK
388	SUMATERA	JAMBI	SKK Migas-Petrochina Internasional Jabung, Ltd	OP Minyak dan Gas Bumi	SRT-0330/SKKM/2000/2020 tanggal 24 September 2020	20 Oktober 2020	Kab. Tanjung Jabung Barat, Prov. Jambi	0,41	PAK
389	SUMATERA	JAMBI	SKK Migas-Petrochina Internasional Jabung, Ltd	OP Minyak dan Gas Bumi	SRT-0330/SKKM/2000/2020 tanggal 24 September 2020	20 Oktober 2020	Kab. Tanjung Jabung Barat, Prov. Jambi	16,1	PAK
390	SUMATERA	JAMBI	SKK Migas-Petrochina Internasional Jabung, Ltd	OP Minyak dan Gas Bumi	SRT-0330/SKKM/2000/2020 tanggal 24 September 2020	20 Oktober 2020	Kab. Tanjung Jabung Barat, Prov. Jambi	1,17	PAK

No	Daerah	Provinsi	Nama Perusahaan	Penggunaan	Nomor Permohonan	Tanggal Diterima	Kab/Kota	Luas (ha)	Ket. Pemohonan
391	SUMATERA	JAMBI	SKK Migas-Petrochina Internasional Jabung, Ltd	OP Minyak dan Gas Bumi	SRT-0330/SKMM/2000/2020 tanggal 24 September 2020	20 Oktober 2020	Kab. Tanjung Jabung Barat, Prov. Jambi	10,7	PAK
392	SUMATERA	JAMBI	SKK Migas-Petrochina Internasional Jabung, Ltd	OP Minyak dan Gas Bumi	SRT-0330/SKMM/2000/2020 tanggal 24 September 2020	20 Oktober 2020	Kab. Tanjung Jabung Barat, Prov. Jambi	2,08	PAK
393	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	PT. Asmin Bara Bhrang	OP Batubara	086/DIR-TEKYAS-ASB/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020	04 Nopember 2020	Kab. Kapuas dan Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah	2990,16	PAK
394	KALIMANTAN	KALIMANTAN UTARA	PT. Duta Tambang Rekayasa	Pembangunan Jembatan dan Sarana Penunjangnya	066/DTR/X/2020 tanggal 9 Nopember 2020	17 Nopember 2020	Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara	6,8	PAK
395	KALIMANTAN	KALIMANTAN SELATAN	PT. Bahari Cakraala Sebuk	OP Batu Bara	BCS-SHL 085/KLHK/X/2020 tanggal 9 Nopember 2020	11 Nopember 2020	Kab. Kotabaru, Prov. Kalimantan Selatan	649,76	PAK
396	SUMATERA	BANGKA BELITUNG	PT. Adhya Buana Inter	Sarana Penunjang Operasi Produksi Batu Granit	2elADITYABUANA.PLANCL OG/X/2020 tanggal 20 November 2020	20 Nopember 2020	Kab. Bangka Tengah, Prov. Kep. Bangka Belitung	6,09	PAK
397	KALIMANTAN	KALIMANTAN TIMUR	PT. Aragon Tambang Pratama	OP Batu Andesit	03/ATP-LGL/X/2020 tanggal 23 Nopember 2020	27 Nopember 2020	Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur	136,64	PAK
398	KALIMANTAN	KALIMANTAN SELATAN	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Banjarbaru - Batulicin	600/38/PP/DPUPR 18/11/2020 23 Oktober 2020	24 Nopember 2020	Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan	858,89	PAK
399	JAWA	JAWA BARAT	PT. Tiga Sebulur Sakti	Jalan Eksisting	0310/044.3/SEKPER/DIR/2020	05 Nopember 2020	Kab. Purwakarta Provinsi Jawa Barat	816603	Mekanisme Kerjasama
400	SULAWESI	SULAWESI TENGGARA	PT. Sumber Bumi Putera	OP Nikel dsp	16/SU-SBP/X/2019 tanggal 06 November 2020	15 Nopember 2020	Kab. Korawa Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara	216,21	PPKH
401	SUMATERA	SUMATERA UTARA	PT. Damar Jaya Utama	Sumber Daya Angin	005/MJUMF/X/2020 tanggal 4 November 2020	10 Nopember 2020	Ka. Tapanuli Selatan Kota Padang Sidempuan Provinsi	5085,45	Survei
402	KALIMANTAN	KALIMANTAN TIMUR	PT. Gunung Bara Utama	OP Batubara dsp	099/GBU-PER/X/2020	10 Nopember 2020	Kab. Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur	5350	PAK
403	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	OY. Eilan Indo Kalleng	OP Zircon	017/CV-EV/X/2020 tanggal 30 November 2020	01 Desember 2020	Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah	449,73	PPKH
404	KALIMANTAN	KALIMANTAN TIMUR	PT. Artha Tunggal Mandiri	OP Batubara	225/ATM-KLHK/X/2020 tanggal 1 Desember 2020	01 Desember 2020	Kab. Berau, Prov. Kalimantan Timur	624,66	PPKH
405	RIAU	RIAU	SKK Migas - EMP Malacca Strait, S.A	Pengembangan Lapangan Ringgit OP Minyak dan Gas Bumi	SRT-0426/SKMM/2000/2020/50 tanggal 25 November 2020	02 Desember 2020	Kab. Kep. Meranti Prov. Riau	1044,97	PPKH
406	SUMATERA	SUMATERA UTARA	PT. Aek Sibundong Energi	Pembangunan PLTM dan Jaringan Transmisi	075/ASE-800/X/2020 tanggal 23 November 2020	02 Desember 2020	Kab. Humbang Hasundutan, Prov. Sumatera Utara	16,33	PPKH
407	SUMATERA	SUMATERA SELATAN	SKK Migas - KSO Pertamina - Green World Nusantara	Eksplorasi, Pemboran Sumur Minyak dan Gas Bumi	SRT-0438/GAKM/2000/2020 tanggal 4 Desember 2020	04 Desember 2020	Kab. Mus Banyuwati, Prov. Sumatera Selatan	4,3	PPKH
408	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	PT. Atya Surya Gemilang	OP Batubara	011/Leg-ASG/PPKH/X/2020 tanggal 20 Nopember 2020	08 Desember 2020	Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah	647,64	PPKH
409	SULAWESI	SULAWESI TENGAH	PT. Mahigal Artha Sejahtera	OP Nikel	3g/MAS-MENHUT/X/2020 tanggal 14 Desember 2020	14 Desember 2020	Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Tengah	146	PPKH
410	KALIMANTAN	KALIMANTAN TIMUR	PT. Senyur Sukses Pratama	OP Batubara	34/SSP/Prak-IPKH/X/2020 tanggal 7 Desember 2020	14 Desember 2020	Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur	436,48	PPKH
411	SULAWESI	SULAWESI TENGAH	PT. Sulawesi Cahaya Mineral	Jalur Conveyor Nikel	175/X/2020/SCM tanggal 17 Desember 2020	17 Desember 2020	Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Tengah	239,44	PPKH
412	MALUKU	MALUKU UTARA	PT. Weda Bay Nikel	OP Nikel	0145/PWBV-PN/11/2020 tanggal 21 Desember 2020	23 Desember 2020	Kab. Halmahera Utara, Prov. Maluku Utara	999,96	PPKH
413	SULAWESI	SULAWESI SELATAN	PT. Vale Indonesia	OP Nikel	01062/LGD-JY/X/2020 tanggal 7 Desember 2020	28 Desember 2020	Kab. Luwu Timur, Prov. Sulawesi Selatan	4305,29	PPKH

No	pulau	Provinsi	Nama Perusahaan	Penggunaan	Nomor Permohonan	Tanggal Diterima	Kab/Kota	Luas (ha)	Ket. Permohonan
414	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	PT. Niaga Pratama Energi	Pembangunan Jalur Pipa Minyak dan Gas	148/OL-DIR/SP/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020	28 Desember 2020	Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah	17,86	IPPKH
415	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	PT. Kalimantan Surya Kencana	OP Emas DMP	3719/KSK/G-XII/2020 tanggal 22 Desember 2020	29 Desember 2020	Kab. Katingan dan Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah	998,93	IPPKH
416	MALUKU	MALUKU UTARA	PT. Trimegah Bangun Persada	Sarana Penunjang OP Nikel	307/TBP/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020	29 Desember 2020	Kab. Halmahera Selatan, Prov. Maluku Utara	105	IPPKH
417	SUKAWESI	SUKAWESI TENGGARA	PT. Ceria Nugraha Indotama	OP Nikel	CNI-SUK-BOD-01.A1.XII.2020-231 tanggal 29 Desember 2020	29 Desember 2021	Kab. Kolaka, Prov. Sulawesi Tenggara	933,68	IPPKH
418	SULAWESI	SULAWESI TENGGARA	PT. Rizqi Sinar Biokas	OP Nikel	088/IPPKH-RSB/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020	30 Desember 2021	Kab. Konawe Utara, Prov. Sulawesi Tenggara	85,14	IPPKH
419	SULAWESI	SULAWESI TENGGARA	PT. Primastian Metal Pratama	OP Nikel	027/PMP-XII/2020 tanggal 30 Desember 2020	30 Desember 2021	Kab. Konawe Utara, Prov. Sulawesi Tenggara	42,1	IPPKH
420	SUMATERA	SUMATERA UTARA	PT. Sorik Marapi Geothermal Power	Eksplorasi Lanjutan Panas Bumi	SM2753/200612/PRJ tanggal 11 Desember 2020	11 Desember 2020	Kab. Mandailing Natal, Prov. Sumatera Utara	156,41	Eksplorasi
421	PAPUA	PAPUA BARAT	PT. GAG Nikel	Eksplorasi Lanjutan Nikel	172/PTGN/DU/2020 tanggal 10 Desember 2020	16 Desember 2020	Kab. Raja Ampat, Prov. Papua Barat	226,7	Eksplorasi
422	KALIMANTAN	KALIMANTAN SELATAN	SKK Migas - PT. Pertamina, EP	Survey Minyak dan Gas Bumi	SRT-0409/SKMMI2000/2020/SO tanggal 18 Nopember 2020	10 Nopember 2020	Prov. Kalimantan Tengah dan Prov. Kalimantan Selatan	1314,37	Survei
423	SULAWESI	SULAWESI TENGAH	PT. Arkora Hydro Sulawesi	PLTM Koro Yaentu	017/4/AHS/2020 tanggal 2 Desember 2020	11 Desember 2020	Kab. Poso, Prov. Sulawesi Tengah	51,52	perpanjangan IPPKH
424	JAWA	JAWA BARAT	PT. Bumi Cikeupeul Abadi	OP Batu Andesit	016/DIR/SP/XII/BCA/2020 tanggal 16 Desember 2020	18 Desember 2020	Kab. Purwakarta, Prov. Jawa Barat	24,27	perpanjangan IPPKH
425	KALIMANTAN	KALIMANTAN SELATAN	PT. Tunas Inti Abadi	OP Batubara	L-129/TIA/DIR-JKT/XII/2020, 21 Desember 2020	23 Desember 2021	Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan	994,53	perpanjangan IPPKH
426	KALIMANTAN	KALIMANTAN SELATAN	PT. Tunas Inti Abadi	OP Batubara	L-130/TIA/DIR-JKT/XII/2020, 21 Desember 2020	23 Desember 2021	Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan	308,53	perpanjangan IPPKH
427	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	PT. Padang Anugerah	OP Batubara	029/DIR-EXT/PA1.Jkt/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020	30 Desember 2021	Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah	483,96	perpanjangan IPPKH
428	JAWA	JAWA BARAT	Koperasi Karya Mandiri Nunggal Sejahtera	OP Batu Andesit	40/KMNS/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020	23 Desember 2021	Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat		perpanjangan IPPKH
429	SULAWESI	SULAWESI TENGGARA	PT. Tonia Mitra Sejahtera	OP Nikel	01/SP-IPPKH/TMS/XI/20 tanggal 25 November 2020	02 Desember 2020	Kab. Bombana, Prov. Sulawesi Tenggara	487,86	Perubahan Areal IPPKH
430	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	PT. Batubara Duaribu Abadi	OP Batubara	086/BDA/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020	28 Desember 2020	Kab. Barito Utara dan Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan	955,28	Perubahan Areal IPPKH
431	KALIMANTAN	KALIMANTAN SELATAN	PT. Adaro Indonesia	OP Batubara	AI/12-XII/20/HG-PR/ERD 23 Desember 2020	11 Desember 2020	Kab. Balangan Provinsi Kalimantan Selatan		PAK
432	SULAWESI	SULAWESI TENGAH	PT. Kencana Bumi Mineral	Nikel dsp	0027/KBM-LHK/XII/2020	10 Desember 2019	Kab. Morowali Provinsi Sulawesi Tengah	982,1	PAK
433	SUMATERA	BENGKULU	PT. Bara Mega Quantum	OP Batubara	001/X/DIR-BMQ/2020	17 Desember 2020	Kab. Bengkulu Provinsi Bengkulu		Perpanjangan IPPKH
434	SUMATERA	LAMPUNG	PT. Natarang Mining	Emas dmp	194/NM/XI/2019	06 Desember 2020	Kab. Tanggamus Provinsi Lampung	8355,17	Eksplorasi

Lampiran 5 : Update Peta Penetapan Kelembagaan KPH - Pemutahiran Wilayah KPHL dan KPHP

PROVINGI	UNIT SESUAI SK	JENIS KPH SK	Luas Pada SK Penetapan				UNIT 2020	JENIS	Update 2020				Selisih	Perubahan Jenis	
			HL_SK	HPT_SK	HP_SK	Total			HL	HP	HPT	Jumlah			
SUMATERA BARAT	UNIT I - KPHL	KPHL	352,613	14,585	22,037	389,235	UNIT I	KPHL	273,801	18,223	34,086	326,110	-	63,124	TETAP
SUMATERA BARAT	UNIT II - KPHL	KPHL	113,783	2,944	9,262	125,986	UNIT II	KPHL	89,203	3,895	17,970	111,072	-	14,914	TETAP
SUMATERA BARAT	UNIT III - KPHL	KPHL	62,283	23,038	8,521	93,842	UNIT III	KPHL	46,011	2,495	30,084	58,589	-	35,253	TETAP
SUMATERA BARAT	UNIT IV - KPHL	KPHL	75,334	2,462	27,527	105,323	Unit IV	KPHL	65,609	14,770	384	80,764	-	28,539	TETAP
SUMATERA BARAT	UNIT IX - KPHP	KPHP	33,075	87,427		120,502	UNIT IX	KPHP	8,485	3,962	43,662	56,088	-	64,434	TETAP
SUMATERA BARAT	UNIT V - KPHL	KPHL	83,952	25,755	48,785	158,492	UNIT V	KPHL	77,782	19,452	28,216	125,460	-	25,032	TETAP
SUMATERA BARAT	UNIT VI - KPHL	KPHL	117,942	18,989	8,982	145,913	Unit VI	KPHL	113,472	3,486	30,941	127,898	-	19,015	TETAP
SUMATERA BARAT	UNIT VII - KPHL	KPHL	99,157	73,486	7,235	179,878	Unit VII	KPHL	97,478	21,767	66,076	185,321	5,443		TETAP
SUMATERA BARAT	UNIT VIII - KPHP	KPHP		16,670	37,509	54,179	UNIT VIII	KPHP		17,655	15,582	33,238	-	20,941	TETAP
SUMATERA BARAT	UNIT X - KPHP	KPHP			156,365	156,365	UNIT X	KPHP	3,459	128,078		129,536	-	32,629	TETAP
SUMATERA BARAT	UNIT XI - KPHP	KPHP	4,573		148,495	153,068	Unit XI	KPHP	3,762	130,891		134,652	-	18,416	TETAP
SUMATERA UTARA	UNIT I - KPHP	KPHP	3,745	57,375	40,085	101,205	UNIT I	KPHP	5,184	24,773	39,172	69,129	-	32,680	TETAP
SUMATERA UTARA	UNIT II - KPHL	KPHL	75,525	14,624	14,468	104,617	UNIT II	KPHL	64,549	6,628	9,235	80,412	-	24,595	TETAP
SUMATERA UTARA	UNIT III - KPHP	KPHP	10,182		69,395	79,578	UNIT III	KPHP	8,966	29,171		38,137	-	51,440	TETAP
SUMATERA UTARA	UNIT IV - KPHP	KPHP	24,470	41,346	9,073	74,889	Unit IV	KPHL	23,173	8,876	30,681	42,729	-	32,559	BERUBAH
SUMATERA UTARA	UNIT V - KPHP	KPHP	8,963	7,754	41,510	58,258	UNIT V	KPHP	8,384	26,246	3,040	37,670	-	20,588	TETAP
SUMATERA UTARA	UNIT VI - KPHP	KPHP			37,994	37,994	Unit VI	KPHP	1,168	44,535		45,638	-	32,356	TETAP
SUMATERA UTARA	UNIT VII - KPHL	KPHL	27,123		26,753	53,876	Unit VII	KPHL	17,673	14,578	512	32,764	-	13,112	TETAP
SUMATERA UTARA	UNIT VIII - KPHL	KPHL	36,338	23,051		59,389	UNIT VIII	KPHL	29,580	91	29,710	49,381	-	10,007	TETAP
SUMATERA UTARA	UNIT IX - KPHP	KPHP	3,077	8,303	22,813	32,283	UNIT IX	KPHL	5,451	4,045	65	9,561	-	22,712	BERUBAH
SUMATERA UTARA	UNIT X - KPHP	KPHP	4,135	18,957		24,092	UNIT X	KPHL	2,962		1,752	4,714	-	19,318	BERUBAH
SUMATERA UTARA	UNIT XI - KPHP	KPHP	12,889	3,874	44,593	61,356	Unit XI	KPHP	6,885	28,342	3,358	38,585	-	22,791	TETAP
SUMATERA UTARA	UNIT XII - KPHP	KPHP	27,808	10,763	20,068	58,639	UNIT XII	KPHP	22,695	24,063	9,703	56,461	-	2,178	TETAP
SUMATERA UTARA	UNIT XIII - KPHL	KPHL	61,238	8,936	34,272	104,446	UNIT XIII	KPHL	44,753	9,368	405	54,536	-	49,809	TETAP
SUMATERA UTARA	UNIT XIV - KPHL	KPHL	75,762	6,294	5,192	87,247	UNIT XIV	KPHL	40,749	10,979	1,914	53,643	-	33,604	TETAP

PROVINSI	UNIT SESUAI SK	JENIS KPH SK	Luas Pada SK Penetapan				UNIT 2020	Jenis	Update 2020				Selisih	Perubahan Jenis	
			HL_SK	HPT_SK	HP_SK	Total			HL	HP	HPT	Jumlah			
SUMATERA UTARA	UNIT XII - KPHL	KPHL	39,426			39,426	UNIT XII	KPHL	19,808			19,808	-	19,618	TETAP
SUMATERA UTARA	UNIT XV - KPHP	KPHP	41,641	70,525		112,166	UNIT XV	KPHP	40,562	1,206	46,362	88,130	-	24,035	TETAP
SUMATERA UTARA	UNIT XVI - KPHL	KPHL	47,436	30,384		77,821	UNIT XVI	KPHL	46,585	48	24,207	70,840	-	6,980	TETAP
SUMATERA UTARA	UNIT XVII - KPHP	KPHP	8,606	3,779	78,223	90,608	UNIT XVII	KPHP	7,371	75,547	3,051	86,369	-	4,240	TETAP
SUMATERA UTARA	UNIT XVIII - KPHL	KPHL	72,271		607	72,878	Unit XVIII	KPHL	46,472	1,780		48,252	-	24,625	TETAP
SUMATERA UTARA	UNIT XIX - KPHP	KPHP	26,505	41,810	37,207	105,522	Unit XIX	KPHP	18,964	38,162	30,449	88,604	-	16,917	TETAP
SUMATERA UTARA	UNIT XX - KPHP	KPHP	31,137	13,959	21,676	66,771	Unit XX	KPHP	16,019	19,588	2,784	38,391	-	28,380	TETAP
SUMATERA UTARA	UNIT XXI - KPHL	KPHL	54,605	51,004		115,609	Unit XXI	KPHL	51,492		46,457	97,948	-	17,662	TETAP
SUMATERA UTARA	UNIT XXII - KPHL	KPHL	52,743	23,698		76,441	Unit XXII	KPHL	42,683		21,959	64,641	-	11,800	TETAP
SUMATERA UTARA	UNIT XXIII - KPHP	KPHP	12,833	69,445	66,792	149,070	Unit XXIII	KPHL	97,375		27,040	124,415	-	24,655	BERUBAH
SUMATERA UTARA	UNIT XXIV - KPHP	KPHP	12,681	131,780	14,704	159,166	Unit XXIV	KPHP	11,960	13,255	107,861	133,076	-	26,089	TETAP
SUMATERA UTARA	UNIT XXV - KPHL	KPHL	14,762	26,597	2,135	58,694	UNIT XXV	KPHL	43,487	2,645	13,538	59,669	975		TETAP
SUMATERA UTARA	UNIT XXVI - KPHL	KPHL	137,313	57,295	28,132	212,740	UNIT XXVI	KPHL	110,597	17,701	44,935	173,233	-	39,507	TETAP
SUMATERA UTARA	UNIT XXVII - KPHP	KPHP	2,222		46,289	48,511	UNIT XXVII	KPHP	17,659	20,169		37,829	-	10,682	TETAP
SUMATERA UTARA	UNIT XXVIII - KPHP	KPHP	55,953	48,718	32,661	117,331	UNIT XXVIII	KPHP	53,472	23,680	48,999	127,151	-	10,180	TETAP
SUMATERA UTARA	UNIT XXIX - KPHL	KPHL	104,428	25,304		129,732	UNIT XXIX	KPHL	116,881		38,950	155,831	26,099		TETAP
SUMATERA UTARA	UNIT XXX - KPHP	KPHP	40,882	40,984	230,589	292,455	Unit XXX	KPHP	40,344	162,357	39,718	242,419	-	50,036	TETAP
SUMATERA UTARA	UNIT XXXI - KPHL	KPHL	144,296	32,223	4,732	181,251	Unit XXXI	KPHL	115,654	4,680	21,536	141,870	-	39,421	TETAP
SUMATERA UTARA	UNIT XXXII - KPHP	KPHP	11,374	16,634	73,042	101,049	UNIT XXXII	KPHP	19,616	-72,373	17,054	109,043	7,994		TETAP
SUMATERA SELATAN	UNIT I - KPHL	KPHL	62,190		6,762	68,952	UNIT I	KPHL	62,808	5,664		68,502	-	420	TETAP
SUMATERA SELATAN	UNIT II - KPHP	KPHP			82,315	82,315	UNIT II	KPHP		62,527		62,527	-	19,788	TETAP
SUMATERA SELATAN	UNIT III - KPHP	KPHP			265,903	265,903	UNIT III	KPHP		259,269	0	259,269	-	6,634	TETAP
SUMATERA SELATAN	UNIT IV - KPHP	KPHP	20,082	97,588	134,597	252,267	Unit IV	KPHP	16,371	127,055	94,664	238,091	-	14,176	TETAP
SUMATERA SELATAN	UNIT IX - KPHL	KPHL	26,220	4,584	3,123	33,928	UNIT IX	KPHL	25,732	3,232	4,553	33,516	-	411	TETAP
SUMATERA SELATAN	UNIT V - KPHP	KPHP		32,074	85,511	117,585	UNIT V	KPHP	398	85,005	36,489	119,892	-	1,693	TETAP
SUMATERA SELATAN	UNIT VI - KPHP	KPHP			75,970	75,970	Unit VI	KPHP		59,224	5,177	64,401	-	11,569	TETAP
SUMATERA SELATAN	UNIT VII - KPHP	KPHP			256,394	256,394	Unit VII	KPHP		246,370		246,370	-	10,024	TETAP

PROVINSI	UNIT SESUAI SK	JENIS KPH SK	Lain Pada SK Penetapan				UNIT 2020	JENIS	Update 2020				Salah	Perubahan Jenis	
			HL_SK	HPT_SK	HP_SK	Total			HL	HP	HPT	Jumlah			
SUMATERA SELATAN	UNIT VIII - KPHP	KPHP	1,839	5,538		7,377	UNIT VIII	KPHP	2,057		4,407	6,504	-	873	TETAP
SUMATERA SELATAN	UNIT X - KPHL	KPHL	41,457			41,457	UNIT X	KPHL	40,404			40,404	-	1,052	TETAP
SUMATERA SELATAN	UNIT XI - KPHL	KPHL	41,063	5,516		46,579	Unit XI	KPHL	57,267		4,351	41,618	-	4,961	TETAP
SUMATERA SELATAN	UNIT XII - KPHL	KPHL	24,618			24,618	UNIT XII	KPHL	25,520			25,520		902	TETAP
SUMATERA SELATAN	UNIT XIII - KPHL	KPHL	73,966			73,966	UNIT XIII	KPHL	69,280			69,280	-	4,686	TETAP
SUMATERA SELATAN	UNIT XIV - KPHP	KPHP	2,322	43,160	135,570	181,052	Unit XIV	KPHP	3,191	133,157	42,803	179,131	-	1,921	TETAP
SUMATERA SELATAN	UNIT XIX - KPHP	KPHP	3,006	9,751	17,351	30,108	UNIT XIX	KPHP	2,822	17,857	10,245	30,923		815	TETAP
SUMATERA SELATAN	UNIT XV - KPHL	KPHL	66,776	26,857		93,633	UNIT XV	KPHL	68,018	24,454	2,437	94,909		1,276	TETAP
SUMATERA SELATAN	UNIT XVI - KPHL	KPHL	30,296			30,296	UNIT XVI	KPHL	29,719			29,719	-	577	TETAP
SUMATERA SELATAN	UNIT XVII - KPHL	KPHL	33,358			33,358	UNIT XVII	KPHL	43,195			43,195		9,837	TETAP
SUMATERA SELATAN	UNIT XVIII - KPHL	KPHL	52,115			52,115	Unit XVIII	KPHL	50,895			50,895	-	1,220	TETAP
SUMATERA SELATAN	UNIT XX - KPHP	KPHP			22,264	22,264	Unit XX	KPHP		27,098		27,098		4,834	TETAP
SUMATERA SELATAN	UNIT XXI - KPHP	KPHP		9,945	39,385	49,331	Unit XXI	KPHP		35,555	10,043	45,598	-	3,733	TETAP
SUMATERA SELATAN	UNIT XXII - KPHP	KPHP	27,213		64,440	91,653	Unit XXII	KPHP	26,726	64,760		91,486	-	164	TETAP
SUMATERA SELATAN	UNIT XXIII - KPHP	KPHP	4,220		203,358	207,577	Unit XXIII	KPHP	4,285	202,039		206,324	-	1,253	TETAP
SUMATERA SELATAN	UNIT XXIV - KPHP	KPHP	22,359		342,249	414,608	Unit XXIV	KPHP	66,006	342,330		408,336	-	6,272	TETAP
KALIMANTAN BARAT	UNIT I	KPHP	25,616	91,519	31,182	118,317	UNIT I	KPHP	25,430	90,294	11,182	126,906	-	1,411	TETAP
KALIMANTAN BARAT	UNIT II	KPHP	29,749	69,696	46,113	145,558	UNIT II	KPHP	29,796	69,682	46,147	145,595		36	TETAP
KALIMANTAN BARAT	UNIT III	KPHP	49,570	37,927	36,116	123,612	UNIT III	KPHP	49,543	37,927	36,136	123,606	-	6	TETAP
KALIMANTAN BARAT	UNIT IV	KPHP	42,839	223,344		266,183	Unit IV	KPHP	42,839	223,180		266,019	-	164	TETAP
KALIMANTAN BARAT	UNIT IX	KPHP	64,547		70,735	135,282	UNIT IX	KPHP	64,547		70,735	135,282		0	TETAP
KALIMANTAN BARAT	UNIT V	KPHP	12,559	98,833		111,392	UNIT V	KPHP	12,559	98,833		111,392		0	TETAP
KALIMANTAN BARAT	UNIT VI	KPHP	25,152	40,191		65,343	Unit VI	KPHP	25,152	40,191		65,343		0	TETAP
KALIMANTAN BARAT	UNIT VII	KPHP	32,399	72,588		104,987	Unit VII	KPHP	28,498	72,588		101,086	-	3,901	TETAP
KALIMANTAN BARAT	UNIT VIII	KPHP	4,574	68,853	21,138	94,565	UNIT VIII	KPHP	4,575	68,854	21,138	94,566		1	TETAP
KALIMANTAN BARAT	UNIT X	KPHP	11,229	39,275		50,504	UNIT X	KPHP	11,229	39,275		50,504		0	TETAP
KALIMANTAN BARAT	UNIT XI	KPHP		68,505		68,505	Unit XI	KPHP		63,747		63,747	-	4,758	TETAP

Provinsi	UNIT SEJUAL SK	JNS SK	Lamp Pada SK Penetapan					UNIT 2020	JNS	Update 2020				Sektor	Pembayaran Jenis								
			HL SK	HPT SK	HR SK	HR	HP			HPT	HL	HP	HPT			HL							
KALIMANTAN BARAT	UNIT XI	KPH	34.254	30.241	132.425	67.562	32.639	30.120	30.120	130.321	-	2.104	1374P	UNIT XI	KPH	67.562	32.639	30.120	30.120	130.321	-	2.104	1374P
KALIMANTAN BARAT	UNIT XII	KPH	43.519	4.257	2.827	56.043	43.918	4.273	2.827	55.968	-	75	1374P	UNIT XII	KPH	43.918	4.273	2.827	55.968	-	75	1374P	
KALIMANTAN BARAT	UNIT XIII	KPH	28.426	7.896	71.271	107.644	28.426	7.896	71.271	107.644	0	0	1374P	UNIT XIII	KPH	28.426	7.896	71.271	107.644	0	0	1374P	
KALIMANTAN BARAT	UNIT XIV	KPH	38.426	7.896	71.271	107.644	38.426	7.896	71.271	107.644	0	0	1374P	UNIT XIV	KPH	38.426	7.896	71.271	107.644	0	0	1374P	
KALIMANTAN BARAT	UNIT XIX	KPH	104.532	36.205	101.148	312.405	104.532	36.205	101.148	312.405	0	0	1374P	UNIT XIX	KPH	104.532	36.205	101.148	312.405	0	0	1374P	
KALIMANTAN BARAT	UNIT XX	KPH	60.523	35.258	110.984	207.275	60.523	35.258	110.984	207.275	346	346	1374P	UNIT XX	KPH	60.523	35.258	110.984	207.275	346	346	1374P	
KALIMANTAN BARAT	UNIT XXI	KPH	159.251		125.304	325.063	159.251		125.304	325.063	0	0	1374P	UNIT XXI	KPH	159.251		125.304	325.063	0	0	1374P	
KALIMANTAN BARAT	UNIT XXII	KPH	77.205	543	245.906	323.664	77.205	543	245.906	323.664	0	0	1374P	UNIT XXII	KPH	77.205	543	245.906	323.664	0	0	1374P	
KALIMANTAN BARAT	UNIT XXIII	KPH	27.439	44.228	151.387	444.288	27.439	44.228	151.387	444.288	0	0	1374P	UNIT XXIII	KPH	27.439	44.228	151.387	444.288	0	0	1374P	
KALIMANTAN BARAT	UNIT XXIV	KPH	33.638	35.000	107.487	474.245	33.638	35.000	107.487	474.245	0	0	1374P	UNIT XXIV	KPH	33.638	35.000	107.487	474.245	0	0	1374P	
KALIMANTAN BARAT	UNIT XXV	KPH	201.848	80.694	156.386	438.927	201.848	80.694	156.386	438.927	200	200	1374P	UNIT XXV	KPH	201.848	80.694	156.386	438.927	200	200	1374P	
KALIMANTAN BARAT	UNIT XXVI	KPH	25.295	101.631	100.000	273.427	25.301	100.651	99.999	272.430	4	4	1374P	UNIT XXVI	KPH	25.295	101.631	100.000	273.427	4	4	1374P	
KALIMANTAN BARAT	UNIT XXVII	KPH	29.138	14.596	95.024	198.249	29.138	14.596	95.024	198.249	0	0	1374P	UNIT XXVII	KPH	29.138	14.596	95.024	198.249	0	0	1374P	
KALIMANTAN BARAT	UNIT XXVIII	KPH	20.227	42.689	60.980	125.488	20.227	42.689	60.980	125.488	1.858	1.858	1374P	UNIT XXVIII	KPH	20.227	42.689	60.980	125.488	1.858	1.858	1374P	
KALIMANTAN BARAT	UNIT XXIX	KPH	41.695	38.195	100.241	180.311	41.695	38.195	100.239	180.311	0	0	1374P	UNIT XXIX	KPH	41.695	38.195	100.239	180.311	0	0	1374P	
KALIMANTAN BARAT	UNIT XXX	KPH	25.229	2.269	230.361	258.233	25.229	2.269	230.304	258.233	0	0	1374P	UNIT XXX	KPH	25.229	2.269	230.304	258.233	0	0	1374P	
KALIMANTAN BARAT	UNIT XXXI	KPH	133.810	47.444	144.628	326.137	133.813	47.389	144.636	326.038	94	94	1374P	UNIT XXXI	KPH	133.810	47.444	144.628	326.137	94	94	1374P	
KALIMANTAN BARAT	UNIT XXXII	KPH	23.220	71.689	98.326	197.339	23.220	71.689	98.326	197.339	0	0	1374P	UNIT XXXII	KPH	23.220	71.689	98.326	197.339	0	0	1374P	
KALIMANTAN BARAT	UNIT XXXIII	KPH	19.623	17.024	203.463	263.629	19.623	17.024	203.463	263.629	0	0	1374P	UNIT XXXIII	KPH	19.623	17.024	203.463	263.629	0	0	1374P	
KALIMANTAN BARAT	UNIT XXXIV	KPH	157.404	84.048	263.463	464.048	157.427	84.004	263.463	464.004	2	2	1374P	UNIT XXXIV	KPH	157.427	84.004	263.463	464.004	2	2	1374P	
KALIMANTAN BARAT	UNIT XXXV	KPH	154.426	172.827	327.403	493.656	154.428	172.827	327.403	493.656	10	10	1374P	UNIT XXXV	KPH	154.428	172.827	327.403	493.656	10	10	1374P	
KALIMANTAN BARAT	UNIT XXXVI	KPH	140.064	113.681	493.656	674.403	140.064	113.677	493.656	674.403	830	830	1374P	UNIT XXXVI	KPH	140.064	113.681	493.656	674.403	830	830	1374P	
KALIMANTAN BARAT	UNIT XXXVII	KPH	82.348	1.130	82.428	82.428	82.428	1.130	82.428	82.428	890	890	1374P	UNIT XXXVII	KPH	82.428	1.130	82.428	82.428	890	890	1374P	
KALIMANTAN BARAT	UNIT XXXVIII	KPH	56.829		56.829	56.829	56.829		56.829	56.829	0	0	1374P	UNIT XXXVIII	KPH	56.829		56.829	56.829	0	0	1374P	
KALIMANTAN UTARA	UNIT I - KPH	KPH	56.829		56.829	56.829	56.829		56.829	56.829	-	-	1374P	UNIT I - KPH	KPH	56.829		56.829	56.829	-	-	1374P	
KALIMANTAN UTARA	UNIT II - KPH	KPH	153.693	166.826	25.126	345.930	153.295	166.726	24.726	345.205	11.295	11.295	1374P	UNIT II - KPH	KPH	153.693	166.826	25.126	345.930	11.295	11.295	1374P	
KALIMANTAN UTARA	UNIT III - KPH	KPH	123.889	92.329	123.889	123.889	123.889	92.329	123.889	92.329	-	-	1374P	UNIT III - KPH	KPH	123.889	92.329	123.889	92.329	-	-	1374P	
KALIMANTAN UTARA	UNIT IV - KPH	KPH	408.131	282.229	408.131	408.131	408.131	282.229	408.131	282.229	-	-	1374P	UNIT IV - KPH	KPH	408.131	282.229	408.131	282.229	-	-	1374P	



PROVINSI	UNIT SESUAI SK	JENIS KPH SK	Luas Pada SK Penetapan				UNIT 2020	JENIS	Update 2020				Salah	Perubahan Jenis
			HL_SK	HPT_SK	HP_SK	Total			HL	HP	HPT	Jumlah		
KALIMANTAN UTARA	UNIT IX - KPHP	KPHP	5.985	434	198.503	204.922	UNIT IX	KPHP	172.267	26.035	289.684	487.986	283.064	TETAP
KALIMANTAN UTARA	UNIT V - KPHP	KPHP	158.198	309.868	9.776	467.842	UNIT V	KPHP		31.785	9.091	42.376	445.466	TETAP
KALIMANTAN UTARA	UNIT VI - KPHL	KPHL	2.400		2.223	4.623	Unit VI	KPHL	7.002			7.002	2.379	TETAP
KALIMANTAN UTARA	UNIT VII - KPHP	KPHP		9.504	37.849	47.353	Unit VII	KPHP		121.501		121.501	74.148	TETAP
KALIMANTAN UTARA	UNIT VIII - KPHP	KPHP			140.334	140.334	UNIT VIII	KPHP	6.578	187.683	3.089	197.350	57.416	TETAP
KALIMANTAN UTARA	UNIT X - KPHP	KPHP	212.622	358.083	106.298	676.903	UNIT X	KPHP	213.210	78.432	353.291	644.933	32.030	TETAP
KALIMANTAN UTARA	UNIT XI - KPHP	KPHP	65.556	309.233	267.546	642.475	UNIT XI	KPHP	84.250	268.692	303.704	656.647	35.828	TETAP
KALIMANTAN TIMUR	UNIT XIX - KPHP	KPHP	73.350	223.443	418.708	715.501	UNIT XIX	KPHP	222.522	306.054	500.045	928.621	211.120	TETAP
KALIMANTAN TIMUR														TETAP
KALIMANTAN UTARA	UNIT XIV - KPHP	KPHP		133.149	189.290	322.439	Unit XIV	KPHP		168.248	132.375	300.623	21.816	TETAP
KALIMANTAN TIMUR	UNIT XV - KPHP	KPHP	183.638	547.273	232.896	963.807	UNIT XV	KPHP	70.860	133.692	321.438	525.990	633.817	TETAP
KALIMANTAN TIMUR	UNIT XVI - KPHP	KPHP	69.487	130.548	161.194	361.229	UNIT XVI	KPHP	33.909	95.879	791	130.579	231.650	TETAP
KALIMANTAN TIMUR	UNIT XVII - KPHP	KPHP	48.358	2.345	142.277	193.980	UNIT XVII	KPHP	6.909	233.038		239.947	46.747	TETAP
KALIMANTAN TIMUR	UNIT XVIII - KPHP	KPHP	6.713		256.650	263.363	Unit XVIII	KPHP	75.848	366.023	214.822	656.693	383.329	TETAP
KALIMANTAN TIMUR	UNIT XX - KPHP	KPHP	144.518	393.431		537.949	Unit XX	KPHP	179.559	1.288	379.584	560.431	22.502	TETAP
KALIMANTAN TIMUR	UNIT XXI - KPHP	KPHP	55.822	372.510		428.332	Unit XXI	KPHP	57.780		350.828	448.608	19.505	TETAP
KALIMANTAN UTARA	UNIT XII - KPHP	KPHP	240.305	431.506	114.210	786.021	UNIT XII	KPHP	257.752	105.271	454.543	717.566	8.655	TETAP
KALIMANTAN UTARA	UNIT XIII - KPHP	KPHP	29.580	117.378	79.501	216,459	UNIT XIII	KPHP	27.095	81.924	122.121	211,540	6.319	TETAP
KALIMANTAN TIMUR	UNIT XXII - KPHL	KPHL	462.244	179.859	16.248	658.351	Unit XXII	KPHL	444.500	15.632	189.566	650.108	8.243	TETAP
KALIMANTAN TIMUR	UNIT XXIII - KPHP	KPHP	65.957	78.765	64.502	213.264	Unit XXIII	KPHP	64.263	99.126	80.272	203.662	9.602	TETAP
KALIMANTAN TIMUR	UNIT XXIV - KPHP	KPHP	147.318	130.403	281.989	559.710	Unit XXIV	KPHP	146.929	267.946	119.242	534.116	25.594	TETAP
KALIMANTAN TIMUR	UNIT XXIX - KPHP	KPHP			289	289	Unit XXIX	KPHP		108.163		108.163	107.874	TETAP
KALIMANTAN TIMUR	UNIT XXXV - KPHP	KPHP			110.153	110.153	UNIT XXXV	KPHP	70.202	126.589	213.474	410.265	300.512	TETAP
KALIMANTAN TIMUR	UNIT XXXVI - KPHP	KPHP	67.719	288.415	94.975	451.109	UNIT XXXVI	KPHP	207.869	263.771	508.297	979.937	528.767	TETAP
KALIMANTAN TIMUR	UNIT XXXVII - KPHP	KPHP	209.814	531.382	251.955	1.053,151	UNIT XXXVII	KPHP	203,71	240,579		261,350	771,001	TETAP
KALIMANTAN TIMUR	UNIT XXXVIII - KPHP	KPHP	23.424		247.133	270,557	UNIT XXXVIII	KPHP		296		296	270,261	TETAP
KALIMANTAN TIMUR	UNIT XXX - KPHL	KPHL	14.832			14,832	UNIT XXX	KPHL	14,985	216		15,241	409	TETAP

PROVINSI	UNIT SESUAI SK	JENIS KPH SK	Luas Pada SK Penetapan				UNIT 2020	JENIS	Update 2020				Selisih	Perubahan Jenis	
			HL_SK	HPT_SK	HP_SK	Total			HL	HP	HPT	Jumlah			
KALIMANTAN TIMUR	UNIT XXXI - KPHP	KPHP		113,329	274,359	387,688	Unit XXXI	KPHP	1,415	256,389	113,727	371,531	-	15,957	TETAP
KALIMANTAN TIMUR	UNIT XXXII - KPHP	KPHP	31,953	264,575	125,217	421,745	Unit XXXII	KPHP	32,010	166,025	136,543	334,577	-	87,168	TETAP
KALIMANTAN TIMUR	UNIT XXXIII - KPHP	KPHP	85,139	62,367	128,255	275,761	Unit XXXIII	KPHP	76,091	102,183	77,021	255,295	-	20,466	TETAP
KALIMANTAN TIMUR	UNIT XXXIV - KPHP	KPHP	44,061	33,872	95,775	143,708	Unit XXXIV	KPHP	42,589	60,698	34,095	137,381	-	6,328	TETAP
MALUKU	UNIT I - KPHP	KPHP	52,262	45,949	44,362	142,573	UNIT I	KPHP	50,123	46,707	48,398	144,227	-	1,654	TETAP
MALUKU	UNIT II - KPHP	KPHP	73,478	95,033	62,921	231,432	UNIT II	KPHP	76,537	64,978	96,901	241,416	-	8,984	TETAP
MALUKU	UNIT III - KPHP	KPHP	53,162	69,360	94,998	217,520	UNIT III	KPHP	51,413	86,767	65,998	204,178	-	11,342	TETAP
MALUKU	UNIT IV - KPHP	KPHP	59,261	81,302	3,552	144,115	Unit IV	KPHP	64,329	1,591	74,032	140,952	-	2,883	TETAP
MALUKU	UNIT V - KPHL	KPHL	63,025	22,561		85,586	UNIT V	KPHL	55,967		23,989	79,956	-	5,629	TETAP
MALUKU	UNIT VI - KPHL	KPHL	54,896	36,632	7,100	98,628	UNIT VI	KPHL	47,858	7,225	36,443	91,526	-	7,102	TETAP
MALUKU	UNIT VII - KPHP	KPHP	32,628	99,032		131,660	Unit VII	KPHP	30,184		97,760	127,944	-	3,716	TETAP
MALUKU	UNIT VIII - KPHP	KPHP	4,545	34,609	27,903	67,057	Unit VIII	KPHP	4,205	23,086	34,060	61,351	-	5,706	TETAP
MALUKU	UNIT IX - KPHP	KPHP	18,422	78,177	5,627	102,226	UNIT IX	KPHP	19,210	5,593	70,155	94,957	-	7,269	TETAP
MALUKU	UNIT X - KPHP	KPHP	3,607	49,957	12,759	66,323	UNIT X	KPHP	12,634	30,707	42,754	66,094	-	229	TETAP
MALUKU	UNIT XI - KPHP	KPHP	38,896	98,025	5,072	141,993	Unit XI	KPHP	38,899	400	97,102	136,401	-	5,592	TETAP
MALUKU	UNIT XII - KPHP	KPHP	50,689	129,056	29,076	208,821	UNIT XII	KPHP	56,629	15,679	120,065	192,373	-	16,448	TETAP
MALUKU	UNIT XIII - KPHL	KPHL	30,469			30,469	UNIT XIII	KPHL	35,932			35,932	-	5,463	TETAP
MALUKU	UNIT XIV - KPHL	KPHL	10,964			10,964	Unit XIV	KPHL	10,294			10,294	-	670	TETAP
MALUKU	UNIT XV - KPHP	KPHP	9,253	9,657	28,849	47,759	UNIT XV	KPHP	17,046	29,301	4,586	46,934	-	1,825	TETAP
MALUKU	UNIT XVI - KPHL	KPHL	13,646			13,646	UNIT XVI	KPHL	9,114		986	10,100	-	3,546	TETAP
MALUKU	UNIT XVII - KPHP	KPHP	5,824	2,986	3,802	12,612	UNIT XVII	KPHL	6,353	2,964	2,397	11,714	-	898	BERUBAH
MALUKU	UNIT XVIII - KPHP	KPHP	2,019	26,791	42,517	71,327	UNIT XVIII	KPHP	2,002	43,035	25,814	70,851	-	475	TETAP
MALUKU	UNIT XIX - KPHP	KPHP	10,168	51,420	72,595	134,183	Unit XIX	KPHP	11,075	68,735	52,298	132,108	-	2,075	TETAP
MALUKU	UNIT XX - KPHP	KPHP	23,093		48,681	71,774	Unit XX	KPHP	22,338	41,930		64,267	-	7,507	TETAP
MALUKU	UNIT XXI - KPHP	KPHP	3,042		57,948	60,990	Unit XXI	KPHP	3,506	65,748		69,254	-	8,234	TETAP
MALUKU	UNIT XXII - KPHP	KPHP	2,624		114,862	117,486	Unit XXII	KPHP	2,663	128,119		130,782	-	13,296	TETAP
KALIMANTAN SELATAN	UNIT I - KPHP	KPHP	50,507	26,129	85,299	161,935	UNIT I	KPHP	49,074	85,822	26,109	161,005	-	1,130	TETAP

PROVINSI	UNIT SESUAI SK	JENIS KPHI SK	Isas Pada SK Penetapan				UNIT 2020	JENIS	Update 2020				Selisih	Perubahan Jenis
			HL_SK	HPT_SK	HP_SK	Total			HL	HP	HPT	Jumlah		
KALIMANTAN SELATAN	UNIT II - KPHP	KPHP	52,785	1,747	153,673	207,635	UNIT II	KPHP	53,420	154,162	1,747	208,829	1,194	TETAP
KALIMANTAN SELATAN	UNIT III - KPHP	KPHP	12,863		99,395	112,258	UNIT III	KPHP	12,148	98,730		110,878	- 1,380	TETAP
KALIMANTAN SELATAN	UNIT IV - KPHL	KPHL	104,290		41,501	145,791	Unit IV	KPHL	103,615	41,015		144,630	- 1,161	TETAP
KALIMANTAN SELATAN	UNIT IX - KPHL	KPHL	53,639	13,908	27,371	94,918	UNIT IX	KPHL	53,280	25,130	14,058	92,467	- 2,451	TETAP
KALIMANTAN SELATAN														TETAP
KALIMANTAN SELATAN	UNIT V - KPHP	KPHP	48,776	23,822	44,759	117,357	UNIT V	KPHP	29427.02295	44390.60471	16497.9794	300,316	- 17,041	TETAP
KALIMANTAN SELATAN	UNIT VI - KPHP	KPHP	83,328	25,519	154,074	262,921	Unit VI	KPHP	83,381	144,741	24,626	252,748	- 10,172	TETAP
KALIMANTAN SELATAN	UNIT VII - KPHP	KPHP	15,862	5,289	71,490	92,641	Unit VII	KPHP	13,840	70,810	5,290	89,940	- 2,701	TETAP
KALIMANTAN SELATAN	UNIT VIII - KPHL	KPHL	66,383	-	24,326	90,709	UNIT VIII	KPHL	66,385	24,391		90,776	67	TETAP
KALIMANTAN SELATAN	UNIT X - KPHP	KPHP	37,425	29,875	50,096	117,396	UNIT X	KPHP	22,370	37,977	13,159	73,506	- 43,890	TETAP
MALUKU UTARA	UNIT I - KPHL	KPHL	98,149	57,157		255,306	UNIT I	KPHL	93,267		56,521	149,788	- 5,518	TETAP
MALUKU UTARA	UNIT II - KPHL	KPHL	60,063	40,081	6,160	106,304	UNIT II	KPHL	60,089	8,024	35,415	103,528	- 2,716	TETAP
MALUKU UTARA	UNIT III - KPHL	KPHL	91,479	61,710	22,474	175,663	UNIT III	KPHL	91,525	36,255	58,672	186,452	- 12,211	TETAP
MALUKU UTARA	UNIT IV - KPHP	KPHP	44,204	88,906	58,734	201,844	Unit IV	KPHP	36,961	51,029	110,998	199,008	- 2,836	TETAP
MALUKU UTARA	UNIT IX - KPHP	KPHP		16,325		16,325	UNIT IX	KPHP	544		17,414	17,958	1,633	TETAP
MALUKU UTARA	UNIT V - KPHP	KPHP	25,396	49,770	6,204	81,370	UNIT V	KPHP	18,816	6,718	52,561	78,095	- 3,274	TETAP
MALUKU UTARA	UNIT VI - KPHL	KPHL	38,698	14,312	18,266	71,276	Unit VI	KPHL	38,304	19,644	14,890	72,838	1,562	TETAP
MALUKU UTARA	UNIT VII - KPHP	KPHP	23,174	57,914	14,792	95,880	Unit VII	KPHP	10,364	14,597	66,064	91,225	- 4,655	TETAP
MALUKU UTARA	UNIT VIII - KPHP	KPHP	8,606	28,663		37,269	UNIT VIII	KPHP	9,224	3,418	24,377	37,019	- 250	TETAP
MALUKU UTARA	UNIT X - KPHP	KPHP	21,056	13,917	9,604	44,577	UNIT X	KPHP	29,691	7,750	15,062	42,464	- 2,113	TETAP
MALUKU UTARA	UNIT XI - KPHL	KPHL	9,705			9,705	Unit XI	KPHL	7,848	480	75	8,404	- 3,301	TETAP
MALUKU UTARA	UNIT XII - KPHP	KPHP	51,226	45,829	78,620	175,675	UNIT XII	KPHP	56,265	73,504	41,219	170,989	- 4,686	TETAP
MALUKU UTARA	UNIT XIII - KPHP	KPHP	53,424	73,024	8,278	134,726	UNIT XIII	KPHP	62,857	7,770	70,314	140,951	6,225	TETAP
MALUKU UTARA	UNIT XIV - KPHP	KPHP	11,990	67,004	94,624	173,618	Unit XIV	KPHP	18,503	105,188	67,023	190,714	17,095	TETAP
MALUKU UTARA	UNIT XV - KPHP	KPHP	24,213	34,420	36,989	95,622	UNIT XV	KPHP	29,799	32,001	35,317	97,116	1,494	TETAP
MALUKU UTARA	UNIT XVI - KPHP	KPHP	21,061	4,473	166,794	192,328	UNIT XVI	KPHP	21,792	135,621	10,485	167,897	- 24,431	TETAP
SULAWESI UTARA	UNIT I - KPHP	KPHP	33,073	95,343	15,507	143,923	UNIT I	KPHP	33,126	15,506	95,324	143,956	33	TETAP

PROVINSI	UNIT SESUAI SK	JENIS KPH SK	Luas Pada SK Penetapan				UNIT 2020	JENIS	Update 2020				Selisih	Perubahan Jenis	
			HL_SK	HPT_SK	HP_SK	Total			HL	HP	HPT	Jumlah			
SULAWESI UTARA	UNIT II - KPHP	KPHP	54,530	60,799	23,573	138,902	UNIT II	KPHP	53,670	23,741	61,286	138,396	-	306	TETAP
SULAWESI UTARA	UNIT III - KPHL	KPHL	24,405	2,196		26,605	UNIT III	KPHL	24,395		1,918	26,312	-	293	TETAP
SULAWESI UTARA	UNIT IV - KPHP	KPHP	5,398	19,257	17,067	41,722	Unit IV	KPHP	5,391	17,093	19,601	42,084		362	TETAP
SULAWESI UTARA	UNIT IX - KPHL	KPHP	26,768	22,441	8,246	57,455	UNIT V	KPHP	26,633	8,246	22,431	57,310	-	145	TETAP
SULAWESI UTARA	UNIT V - KPHL	KPHL	17,620	9,468		27,088	Unit VI	KPHL	17,544		9,769	27,313		225	TETAP
SULAWESI BARAT	UNIT I - KPHL	KPHL	16,050	9,612		25,662	UNIT I	KPHL	16,131		9,062	25,193	-	469	TETAP
SULAWESI BARAT	UNIT II - KPHL	KPHL	34,512	21,010	2,394	57,917	UNIT II	KPHL	40,626	2,316	20,604	63,546		5,629	TETAP
SULAWESI BARAT	UNIT III - KPHL	KPHL	46,516	27,329		73,825	UNIT III	KPHL	43,199		25,211	68,410	-	5,216	TETAP
SULAWESI BARAT	UNIT IV - KPHL	KPHL	61,211	49,778		110,989	Unit IV	KPHP	15,139		47,973	63,112	-	47,877	BERUBAH
SULAWESI BARAT	UNIT IX - KPHL	KPHL	38,539	9,378		47,917	UNIT IX	KPHL	42,302		9,046	51,348		3,231	TETAP
SULAWESI BARAT	UNIT V - KPHP	KPHP	20,914	96,545	48,774	167,243	UNIT V	KPHP	8,667	32,729	82,219	123,114	-	44,129	TETAP
SULAWESI BARAT	UNIT VI - KPHP	KPHP	52,888	90,434	15,033	158,356	Unit VI	KPHP	55,614	16,176	64,894	136,884	-	1,472	TETAP
SULAWESI BARAT	UNIT VII - KPHP	KPHP	17,352	36,203		53,554	Unit VII	KPHP	17,490		35,504	52,994	-	560	TETAP
SULAWESI BARAT	UNIT VIII - KPHL	KPHL	33,218	4,704		37,962	UNIT VIII	KPHL	24,950		6,528	31,479	-	6,484	TETAP
SULAWESI BARAT	UNIT X - KPHL	KPHL	45,109	6,962		52,071	UNIT X	KPHL	44,525	0	7,618	52,543		472	TETAP
SULAWESI BARAT	UNIT XI - KPHL	KPHL	53,485	23,711		77,196	Unit XI	KPHL	55,650		21,439	77,089	-	107	TETAP
SULAWESI BARAT	UNIT XII - KPHL	KPHL	157,598			157,598	UNIT XII	KPHL	49,546		4	49,550	-	108,048	TETAP
SULAWESI BARAT	UNIT XIII - KPHL	KPHL	79,738			79,738	UNIT XIII	KPHL	41,614		707	42,321	-	37,417	TETAP
SULAWESI SELATAN	UNIT I	KPHP	22,264	9,418	15,341	47,023	UNIT I	KPHP	22,264	15,341	9,418	47,023	-	0	TETAP
SULAWESI SELATAN	UNIT II	KPHL	51,663	17,551		69,213	UNIT II	KPHL	51,663		17,551	69,213	-	0	TETAP
SULAWESI SELATAN	UNIT III	KPHL	48,426	24,781		73,207	UNIT III	KPHL	48,426		24,781	73,207	-	0	TETAP
SULAWESI SELATAN	UNIT IV	KPHL	46,649	25,321		71,970	Unit IV	KPHL	46,649		25,321	71,970	-	0	TETAP
SULAWESI SELATAN	UNIT IX	KPHL	50,916	3,240	19,000	73,155	UNIT IX	KPHL	50,916	19,000	3,240	73,155		0	TETAP
SULAWESI SELATAN	UNIT V	KPHL	65,364	5,697	3,725	74,785	UNIT V	KPHL	65,364	3,725	5,697	74,785		0	TETAP
SULAWESI SELATAN	UNIT VI	KPHL	84,170	19,781		103,951	Unit VI	KPHL	84,176		19,781	103,957		6	TETAP
SULAWESI SELATAN	UNIT VII	KPHL	50,397		429	50,825	Unit VII	KPHL	50,397	429		50,825	-	0	TETAP
SULAWESI SELATAN	UNIT VIII	KPHL	30,363	607	1,421	32,390	UNIT VIII	KPHL	30,363	1,421	607	32,390		0	TETAP

PROVINSI	UNIT SESUAI SK	JENIS KPH SK	Luas Pada SK Penetapan				UNIT 2020	JENIS	Update 2020				Selisih	Perubahan Jenis	
			HL_SK	HPT_SK	HP_SK	Total			HL	HP	HPT	Jumlah			
SULAWESI SELATAN	UNIT X	KPHL	202,109	24,527	4,506	131,342	UNIT X	KPHL	202,109	4,506	24,527	131,342	-	0	TETAP
SULAWESI SELATAN	UNIT XI	KPHL	297,154	8,157	6,323	212,827	Unit XI	KPHL	298,339	6,323	8,157	212,829	-	8	TETAP
SULAWESI SELATAN	UNIT XII	KPHP	37,256	50,045	1,494	88,795	UNIT XII	KPHP	37,254	1,494	50,045	88,794	-	2	TETAP
SULAWESI SELATAN	UNIT XIII	KPHP	82,282	69,809	6,671	173,562	UNIT XIII	KPHP	82,173	6,671	69,809	173,449	-	113	TETAP
SULAWESI SELATAN	UNIT XIV	KPHP	21,626	86,579	13,057	121,262	Unit XIV	KPHP	21,632	13,057	86,579	121,268	6		TETAP
SULAWESI SELATAN	UNIT XIX	KPHP	9,866	42,364	12,395	64,625	UNIT XIX	KPHP	9,866	12,395	42,364	64,625	-	0	TETAP
SULAWESI SELATAN	UNIT XV	KPHL	112,983	10,853	4,018	127,873	UNIT XV	KPHL	112,980	4,018	10,853	127,870	-	3	TETAP
SULAWESI SELATAN	UNIT XVI	KPHL	28,528	4,386	5,771	38,685	UNIT XVI	KPHL	28,528	5,771	4,386	38,685	0		TETAP
SULAWESI SELATAN	XVII	KPHP	2,499		13,502	16,001	UNIT XVII	KPHP	2,499	13,502		16,001	0		TETAP
SULAWESI SELATAN	UNIT XVIII	KPHP	17,083	37,572	2,356	57,011	Unit XVIII	KPHP	17,083	2,356	37,572	57,011	0		TETAP
SULAWESI SELATAN	UNIT XX	KPHP	20,578	12,419	16,397	49,394	Unit XX	KPHP	20,578	16,397	12,419	49,394	0		TETAP
SULAWESI SELATAN	UNIT XXI	KPHL	6,276	260	2,945	9,481	Unit XXI	KPHL	6,276	2,945	260	9,481	-	0	TETAP
SULAWESI SELATAN	UNIT XXII	KPHL	7,292	989	3,406	11,686	Unit XXII	KPHL	7,292	3,406	989	11,686	0		TETAP
SULAWESI SELATAN	UNIT XXIII	KPHL	9,558	6,912		16,470	Unit XXIII	KPHL	9,558		6,912	16,470	0		TETAP
SULAWESI SELATAN	UNIT XXIV	KPHL	9,992	5,693	2,888	18,573	Unit XXIV	KPHL	9,992	2,888	5,693	18,573	-	0	TETAP
BAJU	UNIT I	KPHL	35,672	2,429	436	38,537	UNIT I	KPHL	35,672	379	2,486	38,537	-	0	TETAP
BAJU	UNIT II	KPHL	30,129	3,633	1,564	35,317	UNIT II	KPHL	30,120	1,564	3,636	35,320	3		TETAP
BAJU	UNIT III	KPHL	20,209	668		20,808	UNIT III	KPHL	20,209		668	20,808	-	0	TETAP
BAJU	UNIT IV	KPHL	10,504	235		10,739	Unit IV	KPHL	10,714		235	10,949	210		TETAP
NUSA TENGGARA BARAT	UNIT I - KPHL	KPHL	28,911	5,075	6,397	40,383	UNIT I	KPHL	27,903	4,843	6,956	39,702	-	1,281	TETAP
NUSA TENGGARA BARAT	UNIT I - KPHP	KPHP	8,890	394	10,352	19,636	UNIT I	KPHP	7,745	476	9,400	17,620	-	2,016	TETAP
NUSA TENGGARA BARAT	UNIT III - KPHL	KPHL	12,562	4,967	-	17,529	UNIT III	KPHL	11,824	5,082		16,906	-	623	TETAP
NUSA TENGGARA BARAT	UNIT IV - KPHL	KPHL	31,987	5,902	-	37,589	Unit IV	KPHL	30,385	5,579	1,133	37,108	-	481	TETAP
NUSA TENGGARA BARAT	UNIT IX - KPHP	KPHP	14,308	14,842	3,631	32,776	UNIT IX	KPHP	12,385	14,879	4,246	31,510	-	1,266	TETAP
NUSA TENGGARA BARAT	UNIT V - KPHP	KPHP	15,942	5,909	19,728	41,579	UNIT V	KPHP	15,481	5,827	19,214	40,522	-	1,047	TETAP
NUSA TENGGARA BARAT	UNIT VI - KPHL	KPHL	22,656	6,185	5,627	34,468	Unit VI	KPHL	21,667	4,796	5,901	32,375	-	2,073	TETAP
NUSA TENGGARA BARAT	UNIT VII - KPHL	KPHL	27,709	7,109	10,484	45,302	Unit VII	KPHL	21,540	7,910	13,220	42,690	-	2,612	TETAP

PROVINSI	UNIT SESUAI SK	JENIS KPH SK	Luas Pada SK Penetapan				UNIT 2020	JENIS	Update 2020				Salah	Perubahan Total	
			HL_SK	HPT_SK	HP_SK	Total			HL	HP	HPT	Jumlah			
NUSA TENGGARA BARAT	UNIT VIII - KPHL	KPHL	27,873	976	16,636	45,485	UNIT VIII	KPHL	30,154	1,469	13,721	45,344	-	141	TETAP
NUSA TENGGARA BARAT	UNIT X - KPHP	KPHP	22,289	9,135	25,715	57,139	UNIT X	KPHP	22,585	5,968	25,750	54,303	-	2,836	TETAP
NUSA TENGGARA BARAT	UNIT XI - KPHP	KPHP	11,981	13,081	38,319	63,401	Unit XI	KPHP	14,076	11,580	38,255	63,910	509		TETAP
NUSA TENGGARA BARAT	UNIT XII - KPHL	KPHL	55,662	1,519	15,788	73,369	UNIT XII	KPHL	54,383	2,317	16,788	73,488	119		TETAP
NUSA TENGGARA BARAT	UNIT XIII - KPHP	KPHP	2,239	600	25,806	28,725	UNIT XIII	KPHP	12,806	980	17,742	31,528	2,803		TETAP
NUSA TENGGARA BARAT	UNIT XIV - KPHL	KPHL	24,168	8,761	6,252	38,881	Unit XIV	KPHL	23,602	9,533	7,372	40,506	1,625		TETAP
NUSA TENGGARA BARAT	UNIT XIX - KPHL	KPHL	36,098	3,603	5,866	45,522	UNIT XIX	KPHL	33,827	3,606	6,378	43,812	-	1,710	TETAP
NUSA TENGGARA BARAT	UNIT XV - KPHP	KPHP	18,728	5,960	17,819	42,507	UNIT XV	KPHP	17,330	3,968	22,967	44,255	1,748		TETAP
NUSA TENGGARA BARAT	UNIT XVI - KPHL	KPHL	13,653	2,611	9,926	26,190	UNIT XVI	KPHL	12,996	2,787	9,675	25,462	-	728	TETAP
NUSA TENGGARA BARAT	UNIT XVIII - KPHP	KPHP	9,736	13,620	6,249	29,605	UNIT XVIII	KPHP	11,416	14,317	6,290	32,024	2,419		TETAP
NUSA TENGGARA BARAT	UNIT XVIII - KPHP	KPHP	-	15,293	12,383	27,576	Unit XVIII	KPHP	-	14,656	12,700	27,356	-	220	TETAP
NUSA TENGGARA BARAT	UNIT XX - KPHP	KPHP	23,645	11,218	14,859	49,722	Unit XX	KPHP	18,861	12,365	14,853	46,079	-	3,643	TETAP
NUSA TENGGARA BARAT	UNIT XXI - KPHP	KPHP	3,174	5,176	12,345	20,695	Unit XXI	KPHP	3,255	4,852	12,798	20,905	210		TETAP
NUSA TENGGARA BARAT	UNIT XXI - KPHL	KPHL	22,608	10,244	10,167	43,019	Unit XXI	KPHL	23,791	6,809	12,804	43,414	395		TETAP
NUSA TENGGARA BARAT	UNIT XXII - KPHP	KPHP	8,525	4,554	14,563	27,632	Unit XXII	KPHP	7,912	5,072	13,788	26,772	-	860	TETAP
PAPUA	UNIT I	KPHL	124,664	4,972	14,542	144,178	UNIT I	KPHL	136,806	26,187	18,549	183,542	39,364		TETAP
PAPUA	UNIT II	KPHL	225,286	18,710	95,954	349,950	UNIT II	KPHL	225,286	36,347	103,704	365,337	15,387		TETAP
PAPUA	UNIT III	KPHP	36,184	41,130	117,652	194,965	UNIT III	KPHP	36,184	41,130	117,652	194,965	0		TETAP
PAPUA	UNIT IV	KPHP	77,726	102,427	135,999	317,151	Unit IV	KPHP	77,726	102,426	135,999	317,151	-	0	TETAP
PAPUA	UNIT V	KPHP	131,858	121,222	13,514	266,595	UNIT V	KPHP	131,858	121,222	13,514	266,595	-	0	TETAP
PAPUA	UNIT VI	KPHP	40	163,704	145,964	309,709	UNIT VI	KPHP	40	163,704	145,964	309,709	-	0	TETAP
PAPUA	UNIT VII	KPHP	12,507	314,454	339,034	665,995	UNIT VII	KPHP	12,507	314,454	339,034	665,995	0		TETAP
PAPUA	UNIT VIII	KPHP	151,681	333,974	15,081	500,736	UNIT VIII	KPHP	151,681	333,974	15,081	500,736	-	0	TETAP
PAPUA	UNIT IX	KPHP		561,577	89,538	651,270	UNIT IX	KPHP		561,577	89,538	651,215	-	55	TETAP
PAPUA	UNIT X	KPHP		248,976		248,976	UNIT X	KPHP		248,976		248,976	-	0	TETAP
PAPUA	UNIT XI	KPHP	23,147	770,061	143,842	937,070	UNIT XI	KPHP	23,147	770,104	143,829	937,070	-	0	TETAP
PAPUA	UNIT XII	KPHL	251,849	17,772	94,918	364,540	UNIT XII	KPHL	251,849	17,772	94,918	364,540	-	0	TETAP

PROVINSI	UNIT SESUAI SK	JENIS KPH SK	Luas Pada SK Penetapan				UNIT 2020	JENIS	Update 2020				Selisih	Perubahan Jenis	
			HL_SK	HPT_SK	HP_SK	Total			HL	HP	NPT	Jumlah			
PAPUA	UNIT LVII	KPHL	78,838		20,665	99,503	UNIT LVII	KPHL	78,838		20,665	99,503	0	TETAP	
PAPUA	UNIT V	KPHL	308,488	19,238	66,762	394,488	UNIT V	KPHL	317,610	28,004	84,121	429,735	35,246	TETAP	
PAPUA	UNIT VI	KPHL	139,519	37,704	97,292	274,515	Unit VI	KPHL	139,519	37,704	97,292	274,515	0	TETAP	
PAPUA	UNIT VII	KPHL	427,667	4,239	239,479	671,385	Unit VII	KPHL	427,667	4,239	239,479	671,385	-	0	TETAP
PAPUA	UNIT VIII	KPHL	225,578		9,057	234,635	UNIT VIII	KPHL	225,578		9,057	234,635	0	TETAP	
PAPUA	UNIT X	KPHL	407,377	76,833	144,706	628,916	UNIT X	KPHL	407,377	76,833	144,706	628,916	0	TETAP	
PAPUA	UNIT XI	KPHL	224,416			224,416	Unit XI	KPHL	224,416			224,416	-	0	TETAP
PAPUA	UNIT XII	KPHL	218,148		183,802	401,950	UNIT XII	KPHL	218,148		183,802	401,950	0	TETAP	
PAPUA	UNIT XIII	KPHP	139,821	145,488	345,949	631,258	UNIT XIII	KPHP	139,821	145,488	345,949	631,258	0	TETAP	
PAPUA	UNIT XIV	KPHP	28,215	37,305	133,527	199,047	Unit XIV	KPHP	28,215	37,305	133,527	199,047	-	0	TETAP
PAPUA	UNIT XIX	KPHP	18,699	2,382	74,779	95,860	UNIT XIX	KPHP	18,699	2,382	74,779	95,860	17	TETAP	
PAPUA	UNIT XXI	KPHL	382,624			382,624	UNIT XXI	KPHL	382,624			382,624	-	0	TETAP
PAPUA	UNIT XLJ	KPHL	244,138		46,894	291,032	UNIT XLJ	KPHL	244,138		46,894	291,032	-	0	TETAP
PAPUA	UNIT XLII	KPHL	51,247		12,560	63,807	UNIT XLII	KPHL	51,248		12,560	63,808	1	TETAP	
PAPUA	UNIT XLIII	KPHP	837	175,196	86,930	262,963	UNIT XLIII	KPHP	837	175,196	86,930	262,963	-	0	TETAP
PAPUA	UNIT XLIV	KPHL	523,600	44,185	312,835	880,620	UNIT XLIV	KPHL	523,600	44,185	312,835	880,620	0	TETAP	
PAPUA	UNIT XLIX	KPHP	168,907	211,182	158,784	538,874	UNIT XLIX	KPHP	168,907	211,182	158,784	538,874	-	0	TETAP
PAPUA	UNIT XLV	KPHL	492,179		152,234	644,413	UNIT XLV	KPHL	492,179		152,234	644,413	-	0	TETAP
PAPUA	UNIT XLVI	KPHP		27	449,706	449,732	UNIT XLVI	KPHP		27	449,706	449,732	14	TETAP	
PAPUA	UNIT XLVII	KPHP	144,690	29,964	288,031	462,685	UNIT XLVII	KPHP	144,690	29,964	288,017	462,671	-	14	TETAP
PAPUA	UNIT XLVIII	KPHP		257,519	316,649	574,168	UNIT XLVIII	KPHP		257,519	316,649	574,168	0	TETAP	
PAPUA	UNIT XV	KPHP	234,936	70,305	167,461	472,706	UNIT XV	KPHP	234,936	70,305	167,461	472,706	0	TETAP	
PAPUA	UNIT XVI	KPHP	63,358	42,278	208,936	314,572	UNIT XVI	KPHP	63,358	42,278	208,936	314,572	-	0	TETAP
PAPUA	UNIT XVII	KPHP	83,282	97,380	6,628	187,290	UNIT XVII	KPHP	83,282	97,380	6,628	187,290	0	TETAP	
PAPUA	UNIT XVIII	KPHL	177,259	75,999	17,771	271,029	Unit XVIII	KPHL	177,259	75,999	17,771	271,029	-	0	TETAP
PAPUA	UNIT XX	KPHL	117,403	24,236	34,386	176,026	Unit XX	KPHL	117,403	24,236	34,386	176,026	8	TETAP	
PAPUA	UNIT XXI	KPHP	51,544	48,802	160,074	258,420	Unit XXI	KPHP	51,544	48,802	160,074	258,420	-	0	TETAP

PROVINGI	UNIT SESUAI SK	JENIS KPH SK	Isian Pada SK Penetapan				UNIT 2020	JENIS	Update 2020				Solusih	Perubahan Basis	
			HL_SK	HPT_SK	HP_SK	Total			HL	HP	HPT	Jumlah			
PAPUA	UNIT XXXI	KPHP	39,265	50,050	97,648	186,964	Unit XXXI	KPHP	39,264	50,050	97,630	186,964	-	0	TETAP
PAPUA	UNIT XXXII	KPHP	61,907	124,167	38,727	224,800	Unit XXXII	KPHP	61,904	124,167	38,729	224,800	0		TETAP
PAPUA	UNIT XXXIV	KPHP	46,347	48,311	141,280	236,940	Unit XXXIV	KPHP	46,347	48,311	141,281	236,940	-	0	TETAP
PAPUA	UNIT XXXIX	KPHP	48,741	34,121	94,171	178,033	Unit XXXIX	KPHP	48,741	34,121	94,171	178,033	-	0	TETAP
PAPUA	UNIT XXXV	KPHP	144,696	62,218	149,421	356,335	UNIT XXXV	KPHP	144,696	62,218	149,421	356,335	-	0	TETAP
PAPUA	UNIT XXXVI	KPHL	225,878	9,380	6,804	242,063	UNIT XXXVI	KPHL	225,878	9,380	6,804	242,063	0		TETAP
PAPUA	UNIT XXXVII	KPHP	153,788	5,968	199,573	359,330	UNIT XXXVII	KPHP	153,788	5,968	199,573	359,330	0		TETAP
PAPUA	UNIT XXXVIII	KPHP	7,266	24,655	16,238	48,158	UNIT XXXVIII	KPHP	7,260	24,655	16,238	48,253	95		TETAP
PAPUA	UNIT XXX	KPHP	72,834	35,665	41,739	150,238	UNIT XXX	KPHP	72,834	35,665	41,739	150,238	0		TETAP
PAPUA	UNIT XXXI	KPHP	102,457	158,123	51,713	312,293	Unit XXXI	KPHP	102,457	158,123	51,713	312,293	0		TETAP
PAPUA	UNIT XXXII	KPHP	73,864	118,170	78,229	270,264	Unit XXXII	KPHP	73,864	118,170	78,229	270,264	0		TETAP
PAPUA	UNIT XXXIII	KPHP	50,174	129,619	62,666	242,459	UNIT XXXIII	KPHP	50,174	129,619	62,666	242,459	0		TETAP
PAPUA	UNIT XXXIV	KPHL	23,502			23,502	Unit XXXIV	KPHL	23,502			23,502	-	0	TETAP
PAPUA	UNIT XXXIX	KPHL	141,932		77,551	219,484	UNIT XXXIX	KPHL	141,932		77,551	219,484	-	0	TETAP
PAPUA	UNIT XXXV	KPHL	269,284	12,739	15,640	297,663	UNIT XXXV	KPHL	269,284	12,739	15,640	297,663	0		TETAP
PAPUA	UNIT XXXVI	KPHL	88,547			88,547	UNIT XXXVI	KPHL	88,547			88,547	-	0	TETAP
PAPUA	UNIT XXXVII	KPHL	111,128		911	112,039	UNIT XXXVII	KPHL	111,128		911	112,039	-	0	TETAP
PAPUA	UNIT XXXVIII	KPHL	297,872	3,878	32,085	333,836	UNIT XXXVIII	KPHL	297,872	3,878	32,085	333,836	-	0	TETAP
YOGYAKARTA	KPH YOGYAKARTA	KPHP	2,313		13,412	15,725		KPHP	2,297	13,567	9	15,872	148		TETAP
KEPULAUAN RIAU	UNIT I - KPHL	KPHP	8,711	06,942	4,579	20,633	UNIT I	KPHP	8,578	4,469	15,825	28,863	-	770	TETAP
KEPULAUAN RIAU	UNIT II - KPHP	KPHL	20,941	9,297	2,234	32,472	UNIT II	KPHL	20,420	2,362	9,248	31,930	-	542	TETAP
KEPULAUAN RIAU	UNIT III - KPHP	KPHP	31,934	49,756	17,044	98,735	UNIT III	KPHP	31,989	17,192	49,408	98,589	-	146	TETAP
KEPULAUAN RIAU	UNIT IV - KPHL	KPHP	20,336	7,728	18,794	46,858	Unit IV	KPHP	20,346	18,474	7,846	46,668	-	190	TETAP
KEPULAUAN RIAU	UNIT V - KPHP	KPHP	12,392	34,166	15,245	61,403	UNIT V	KPHP	12,235	15,255	34,129	61,609	206		TETAP
KEPULAUAN RIAU	UNIT VI - KPHP	KPHP	3,748	1,545	20,934	26,227	Unit VI	KPHP	3,647	17,601	1,261	22,509	-	3,718	TETAP
JAMBI	UNIT I - KPHP	KPHP	-	-	30,688	30,688	UNIT I	KPHP		34,208		34,208	3,520		TETAP
JAMBI	UNIT II - KPHP	KPHP	-	-	56,728	56,728	UNIT II	KPHP		45,460		45,460	-	11,268	TETAP



PROVINSI	UNIT SESUAI SK	JENIS KPH SK	Luas Pada SK Penetapan				UNIT 2020	JENIS	Update 2020				Selisih	Perubahan jenis
			HL_SK	HPT_SK	HP_SK	Total			HL	HP	HPT	Jumlah		
JAMBI	UNIT III - KPHP	KPHP	13,039	-	56,025	69,064	UNIT III	KPHP	22,075	47,417		69,492	428	TETAP
JAMBI	UNIT IV - KPHP	KPHP	-	-	52,156	52,156	Unit IV	KPHP		50,930		50,930	- 1,226	TETAP
JAMBI	UNIT IX - KPHP	KPHP	6,750	6,350	135,585	148,685	UNIT IX	KPHP	6,700	133,259	6,413	146,373	- 2,312	TETAP
JAMBI	UNIT V - KPHP	KPHP	2,748	10,436	61,993	75,177	UNIT V	KPHP	2,465	42,284	8,963	53,412	- 21,765	TETAP
JAMBI	UNIT VI - KPHP	KPHP	36,088	30,105	5,944	76,137	Unit VI	KPHP	36,578	30,016	28,960	75,553	- 584	TETAP
JAMBI	UNIT VI - KPHP	KPHP	54,793	27,502	43,807	121,102	Unit VII	KPHP	52,687	42,467	20,960	116,114	- 4,988	TETAP
JAMBI	UNIT VII - KPHP	KPHP	-	56,438	53,338	109,766	UNIT VIII	KPHP		71,914	37,026	108,939	- 827	TETAP
JAMBI	UNIT X - KPHP	KPHP	-	14,566	91,890	106,456	UNIT X	KPHP		91,826	13,603	105,428	- 1,028	TETAP
JAMBI	UNIT XI - KPHP	KPHP	-	11,119	96,552	107,671	Unit XI	KPHP		89,812	11,794	101,606	- 6,065	TETAP
JAMBI	UNIT XII - KPHP	KPHP	-	42,648	37,861	80,509	UNIT XII	KPHP		41,897	39,164	81,061	552	TETAP
JAMBI	UNIT XIII - KPHP	KPHP	27,428	62,208	28,204	117,838	UNIT XIII	KPHP	24,783	26,029	57,498	98,289	- 9,549	TETAP
JAMBI	UNIT XIV - KPHP	KPHP	18,674	-	65,841	84,515	Unit XIV	KPHP	21,097	64,933		86,030	1,515	TETAP
JAMBI	UNIT XV - KPHP	KPHP	-	-	91,091	91,091	UNIT XV	KPHP	22	91,434		91,457	366	TETAP
JAMBI	UNIT XVI - KPHP	KPHP	-	45,518	79,827	125,386	UNIT XVI	KPHP		90,328	35,291	125,619	233	TETAP
JAMBI	UNIT XVII - KPHL	KPHL	15,965	-	-	15,965	UNIT XVII	KPHL	15,014	21		15,035	- 930	TETAP
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	UNIT I - KPHP	KPHP	8,803		50,819	59,622	UNIT I	KPHP	12,400	56,733		69,133	9,510	TETAP
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	UNIT II - KPHP	KPHP	6,015		47,468	53,483	UNIT II	KPHP	16,562	35,232		51,794	- 1,689	TETAP
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	UNIT III - KPHP	KPHP	10,777		35,175	45,953	UNIT III	KPHP	10,728	33,102		43,830	- 2,123	TETAP
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	UNIT IV - KPHP	KPHP	5,237		25,873	31,109	Unit IV	KPHP	5,049	17,292		22,342	- 8,768	TETAP
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	UNIT IX - KPHP	KPHP	11,946		45,575	57,521	UNIT IX	KPHP	11,589	43,467		55,056	- 2,465	TETAP
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	UNIT V - KPHP	KPHP	5,185		34,228	39,413	UNIT V	KPHP	5,283	33,075		38,359	- 1,054	TETAP
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	UNIT VI - KPHP	KPHP	3,137		27,275	30,412	Unit VI	KPHP	1,546	25,728		27,274	- 3,138	TETAP
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	UNIT VII - KPHP	KPHP	14,483		34,127	48,610	Unit VII	KPHL	23,486	21,765		45,251	- 3,359	BERUBAH
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	UNIT VIII - KPHP	KPHP	12,777		78,367	91,144	UNIT VIII	KPHP	17,178	67,568		84,746	- 6,398	TETAP
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	UNIT X - KPHL	KPHL	28,207		20,642	48,849	UNIT X	KPHL	26,645	21,999		48,643	- 205	TETAP
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	UNIT XI - KPHP	KPHP	12,057		20,610	32,667	Unit XI	KPHP	12,746	18,091		30,837	- 1,830	TETAP
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	UNIT XII - KPHL	KPHL	32,996		11,786	44,783	UNIT XII	KPHL	35,187	12,450		47,637	2,854	TETAP

PROVINSI	UNIT SESUAI SK	JENIS KPH SK	Luas Pada SK Penetapan				UNIT 2020	JENIS	Update 2020				Salah	Perubahan Jenis	
			HL_SK	HPT_SK	HP_SK	Total			HL	HP	HPT	Jumlah			
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	UNIT XIII - KPHP	KPHP	12,615		45,620	58,235	UNIT XIII	KPHP	10,611	44,973		55,583	-	2,652	TETAP
NUSA TENGGARA TIMUR	UNIT I	KPHL	54,283	-	18,145	72,424	UNIT I	KPHL	54,203	17,749		71,952	-	472	TETAP
NUSA TENGGARA TIMUR	UNIT II	KPHL	17,366	-	-	17,366	UNIT II	KPHL	17,366			17,366	0		TETAP
NUSA TENGGARA TIMUR	UNIT III	KPHL	32,764	-	15,570	48,335	UNIT III	KPHL	32,764	15,570		48,333	-	2	TETAP
NUSA TENGGARA TIMUR	UNIT IV	KPHL	29,042	-	6,328	35,370	Unit IV	KPHL	29,042	6,328		35,370	0		TETAP
NUSA TENGGARA TIMUR	UNIT IX	KPHL	46,664	-	605	47,269	UNIT IX	KPHL	46,664	605		47,270	0		TETAP
NUSA TENGGARA TIMUR	UNIT V	KPHP	9,626	9,180	9,743	28,549	UNIT V	KPHP	9,626	9,743	9,179	28,548	-	1	TETAP
NUSA TENGGARA TIMUR	UNIT VI	KPHP	21,272	385	32,197	53,854	Unit VI	KPHP	21,565	32,606	385	54,556	702		TETAP
NUSA TENGGARA TIMUR	UNIT VII	KPHL	33,748	722	1,009	35,479	VII	KPHL	33,748	1,009	722	35,479	-	0	TETAP
NUSA TENGGARA TIMUR	UNIT VIII	KPHL	36,317	11,133	4,414	51,864	UNIT VIII	KPHL	36,317	4,414	11,133	51,864	-	0	TETAP
NUSA TENGGARA TIMUR	UNIT X	KPHL	51,341	26,695	19,348	97,384	UNIT X	KPHL	51,341	19,348	26,695	97,383	-	1	TETAP
NUSA TENGGARA TIMUR	UNIT XI	KPHL	10,998	-	8,468	19,466	Unit XI	KPHL	10,997	8,468		19,465	-	1	TETAP
NUSA TENGGARA TIMUR	UNIT XII	KPHP	1,208	1,211	5,125	7,544	UNIT XII	KPHP	1,208	5,125	1,211	7,544	-	0	TETAP
NUSA TENGGARA TIMUR	UNIT XIII	KPHP	6,162	14,862	5,144	26,168	UNIT XIII	KPHP	6,159	5,144	14,862	26,165	-	3	TETAP
NUSA TENGGARA TIMUR	UNIT XIV	KPHL	75,286	19,048	25,381	119,715	Unit XIV	KPHL	75,274	25,381	19,048	119,703	-	12	TETAP
NUSA TENGGARA TIMUR	UNIT XIX	KPHP	3,862	2,566	2,562	9,442	UNIT XIX	KPHP	3,861	2,562	2,566	9,441	-	1	TETAP
NUSA TENGGARA TIMUR	UNIT XV	KPHL	9,970	-	-	9,970	UNIT XV	KPHL	9,970			9,970	0		TETAP
NUSA TENGGARA TIMUR	UNIT XVI	KPHP	7,517	-	9,360	16,877	UNIT XVI	KPHP	7,541	9,368		16,909	32		TETAP
NUSA TENGGARA TIMUR	UNIT XVII	KPHP	204,488	41,503	60,897	206,888	UNIT XVII	KPHL	104,520	60,899	39,441	204,860	-	4,028	BERUBAH
NUSA TENGGARA TIMUR	UNIT XVIII	KPHL	1,440	-	59	1,499	Unit XVIII	KPHL	1,440	59		1,499	0		TETAP
NUSA TENGGARA TIMUR	UNIT XX	KPHP	35,576	2,794	40,566	78,936	XX	KPHP	35,576	40,566	2,794	78,936	-	0	TETAP
NUSA TENGGARA TIMUR	UNIT XXI	KPHP	42,012	53,903	12,944	108,858	Unit XXI	KPHP	42,001	12,944	53,903	108,848	-	10	TETAP
NUSA TENGGARA TIMUR	UNIT XXII	KPHL	36,706	-	962	37,668	XXII	KPHL	36,697	962		37,659	-	9	TETAP
RIAU	UNIT I - KPHP	KPHP	100	91,058	58,591	155,749	UNIT I	KPHP	100	58,584	97,061	155,745	-	4	TETAP
RIAU	UNIT II - KPHP	KPHP	-	20,441	74,514	94,955	UNIT II	KPHP		74,514	20,368	95,082	127		TETAP
RIAU	UNIT III - KPHP	KPHP	3,387	32,192	130,103	165,682	UNIT III	KPHP	3,387	130,103	32,192	165,682	-	0	TETAP
RIAU	UNIT IV - KPHP	KPHP	31	40,025	40,353	80,408	Unit IV	KPHP	31	40,353	40,031	80,414	6		TETAP

PROVINSI	UNIT SESUAI SK	JENIS KPH SK	Luas Pada SK Penetapan				UNIT 2020	JENIS	Update 2020				Selisih	Perubahan Jenis	
			HL_SK	HPT_SK	HP_SK	Total			HL	HP	HPT	Jumlah			
RIAU	UNIT II - KPH	KPH	-	11,241	90,382	107,795	UNIT IX	KPH	90,382	11,241	108,074	279	TETAP		
RIAU	UNIT V - KPH	KPH	-	11,906	11,406	23,312	UNIT V	KPH	11,406	11,908	23,394	82	TETAP		
RIAU	UNIT VI - KPH	KPH	-	3,823	245,416	249,240	Unit VI	KPH	245,416	3,823	249,240	0	TETAP		
RIAU	UNIT VII - KPH	KPH	-	5,122	88,432	93,554	Unit VII	KPH	88,432	5,122	93,554	-	0	TETAP	
RIAU	UNIT VIII - KPH	KPH	-	18,270	61,503	80,274	UNIT VIII	KPH	61,503	18,270	80,274	0	TETAP		
RIAU	UNIT X - KPH	KPH	-	25,287	41,270	66,457	UNIT X	KPH	41,270	25,287	66,457	0	TETAP		
RIAU	UNIT XI - KPH	KPH	-	25,716	33,106	48,821	Unit XI	KPH	33,106	25,716	48,821	-	0	TETAP	
RIAU	UNIT XII - KPH	KPH	4	15,580	79,740	95,324	UNIT XII	KPH	5	79,740	15,580	95,325	1	TETAP	
RIAU	UNIT XIII - KPH	KPH	36,680	45,866	11,733	94,280	UNIT XIII	KPH	36,680	11,733	45,866	94,280	-	0	TETAP
RIAU	UNIT XIV - KPH	KPH	501	53,349	8,774	62,624	Unit XIV	KPH	503	8,774	53,347	62,624	-	0	TETAP
RIAU	UNIT XIX - KPH	KPH	-	30,965	108,292	139,257	UNIT XIX	KPH		108,256	30,965	139,019	-	338	TETAP
RIAU	UNIT XX - KPH	KPH	622	940	31,995	33,557	UNIT XX	KPH	622	31,995	940	33,557	-	0	TETAP
RIAU	UNIT XXV - KPH	KPH	49,766	12,140	-	61,906	UNIT XXV	KPH	49,765		12,140	61,906	-	0	TETAP
RIAU	UNIT XXVI - KPH	KPH	9,838	17,553	2,041	29,432	UNIT XXVI	KPH	9,838	1,925	17,553	29,316	-	116	TETAP
RIAU	UNIT XXVII - KPH	KPH	35,794	73,097	34,447	143,338	Unit XXVII	KPH	35,795	34,447	73,096	143,338	-	0	TETAP
RIAU	UNIT XXVIII - KPH	KPH	-	63,052	100,729	163,820	Unit XXVIII	KPH		100,729	63,052	163,820	-	0	TETAP
RIAU	UNIT XXIX - KPH	KPH	400	30	133,530	133,959	Unit XXIX	KPH	400	133,530	30	133,959	-	0	TETAP
RIAU	UNIT XXX - KPH	KPH	8,928	3,454	516,293	528,675	Unit XXX	KPH	8,926	516,375	3,454	528,755	-	52	TETAP
RIAU	UNIT XXXI - KPH	KPH	-	69,240	-	69,240	Unit XXXI	KPH			69,520	69,520	281	TETAP	
RIAU	UNIT XXXIV - KPH	KPH	794	64,936	17,147	82,876	Unit XXXIV	KPH	794	17,147	64,936	82,876	0	TETAP	
RIAU	UNIT XXXV - KPH	KPH	-	64,629	2	64,621	Unit XXXV	KPH		2	64,629	64,621	0	TETAP	
RIAU	UNIT XXXVI - KPH	KPH	1,700	15,536	25,649	42,885	UNIT XXXVI	KPH	1,700	25,649	15,536	42,885	-	0	TETAP
RIAU	UNIT XXXVII - KPH	KPH	19,888	97,263	7	117,678	UNIT XXXVII	KPH	19,888	7	98,207	118,202	425	TETAP	
RIAU	UNIT XXXVIII - KPH	KPH	7	-	181,746	181,753	UNIT XXXVIII	KPH	7	181,746		181,753	0	TETAP	
RIAU	UNIT XXXIX - KPH	KPH	162	2,876	93,043	96,081	UNIT XXXIX	KPH	162	93,043	2,876	96,081	0	TETAP	
RIAU	UNIT XXXX - KPH	KPH	20,078	65,094	44,814	129,986	UNIT XXXX	KPH	20,078	44,814	65,094	129,986	-	0	TETAP
RIAU	UNIT XXXXI - KPH	KPH	42,907	5,974	45,561	94,442	Unit XXXXI	KPH	41,970	45,565	5,974	93,509	-	534	TETAP

PROVINSI	UNIT SESUAI SK	JENIS KPH SK	Izin Pada SK Penetapan				UNIT 2020	JENIS	Update 2020				Solusih	Perubahan Suku	
			HL_SK	HPT_SK	HP_SK	Total			HL	HP	HPT	Jumlah			
BAU	UNIT XXXI - KPHP	KPHP	-	32,947	25,907	58,854	Unit XXXI	KPHP	-	25,907	32,947	58,854	-	0	TETAP
GORONTALO	UNIT I - KPHP	KPHP	18,104	18,870	16,084	53,058	UNIT I	KPHP	17,925	16,087	17,967	52,000	-	1,058	TETAP
GORONTALO	UNIT II - KPHL	KPHL	58,624	20,380	11,881	90,885	UNIT II	KPHL	58,730	11,523	20,386	90,639	-	246	TETAP
GORONTALO	UNIT III - KPHL	KPHL	59,301	43,369	13,605	116,275	UNIT III	KPHL	58,912	13,608	43,113	115,633	-	643	TETAP
GORONTALO	UNIT IV - KPHP	KPHP	18,632	71,417	15,759	105,808	Unit IV	KPHP	7,787	15,524	64,992	88,302	-	17,506	TETAP
GORONTALO	UNIT V - KPHP	KPHP	29,383	55,140	12,403	96,926	UNIT V	KPHP	25,532	14,224	45,952	85,708	-	7,217	TETAP
GORONTALO	UNIT VI - KPHP	KPHP	20,713	45,294	18,942	84,949	Unit VI	KPHP	13,112	17,669	40,730	71,511	-	13,438	TETAP
GORONTALO	UNIT VII - KPHL	KPHL	25,876	4,915	2,808	33,599	Unit VII	KPHP	16,115	819	18,809	35,743	2,144	BERUBAH	
SULAWESI TENGAH	UNIT I - KPHP	KPHP	44,257	101,268	54,008	199,533	UNIT I	KPHP	52,590	47,938	96,682	197,210	-	2,323	TETAP
SULAWESI TENGAH	UNIT II - KPHP	KPHP	44,097	85,476	38,410	167,983	UNIT II	KPHP	46,174	34,586	82,387	163,147	-	4,836	TETAP
SULAWESI TENGAH	UNIT III - KPHL	KPHL	83,154	47,144	-	140,298	UNIT III	KPHL	95,809	-	38,475	134,284	-	6,014	TETAP
SULAWESI TENGAH	UNIT IV - KPHP	KPHP	23,211	81,055	10,762	114,928	Unit IV	KPHP	27,142	10,087	65,630	103,862	-	8,666	TETAP
SULAWESI TENGAH	UNIT IX - KPHP	KPHP	17,651	25,951	19,008	62,610	UNIT IX	KPHP	23,483	15,857	30,757	70,096	-	3,514	TETAP
SULAWESI TENGAH	UNIT V - KPHP	KPHP	50,312	66,766	991	118,069	UNIT V	KPHP	46,157	739	64,311	111,206	-	6,855	TETAP
SULAWESI TENGAH	UNIT VI - KPHL	KPHL	40,143	31,997	-	72,140	Unit VI	KPHL	34,830	-	23,757	58,588	-	13,152	TETAP
SULAWESI TENGAH	UNIT VII - KPHP	KPHP	42,323	67,826	7,123	117,272	Unit VII	KPHP	40,006	6,879	62,825	109,710	-	7,562	TETAP
SULAWESI TENGAH	UNIT VIII - KPHL	KPHL	116,417	100,945	2,808	220,170	UNIT VIII	KPHL	125,613	3,012	98,176	226,801	6,631	TETAP	
SULAWESI TENGAH	UNIT X - KPHL	KPHL	64,427	35,533	-	99,960	UNIT X	KPHL	64,179	-	26,463	90,642	-	9,318	TETAP
SULAWESI TENGAH	UNIT XI - KPHP	KPHP	46,341	62,346	28,740	137,427	Unit XI	KPHP	45,813	32,221	62,782	140,816	3,386	TETAP	
SULAWESI TENGAH	UNIT XII - KPHP	KPHP	16,779	69,624	4,517	90,920	UNIT XII	KPHP	15,850	4,337	71,991	92,178	1,399	TETAP	
SULAWESI TENGAH	UNIT XIII - KPHL	KPHL	127,196	13,265	44,798	185,259	UNIT XIII	KPHL	100,950	34,203	37,097	172,250	-	13,009	TETAP
SULAWESI TENGAH	UNIT XIV - KPHP	KPHP	95,233	93,395	25,037	213,665	Unit XIV	KPHP	69,056	25,469	120,999	215,524	1,859	TETAP	
SULAWESI TENGAH	UNIT XIX - KPHP	KPHP	134,699	89,539	56,055	280,293	UNIT XIX	KPHP	122,759	45,223	90,838	258,720	-	21,573	TETAP
SULAWESI TENGAH	UNIT XV - KPHP	KPHP	78,208	31,182	55,427	164,817	UNIT XV	KPHP	74,571	47,407	32,712	154,689	-	10,127	TETAP
SULAWESI TENGAH	UNIT XVI - KPHL	KPHL	101,772	62,963	39,787	204,522	UNIT XVI	KPHL	105,804	36,350	67,132	209,286	4,754	BERUBAH	
SULAWESI TENGAH	UNIT XVI - KPHP	KPHP	63,673	118,313	9,390	191,376	UNIT XVI	KPHP	65,903	10,560	108,779	185,241	-	6,135	TETAP
SULAWESI TENGAH	UNIT XVII - KPHP	KPHP	50,978	126,355	-	177,333	Unit XVII	KPHP	54,293	-	123,331	177,624	291	TETAP	

Provinsi	Unit Sekolah SK KPH	Jenis SK	Luas Pada SK Penerimaan			Unit 2020	Jenis	Update 2020			Jumlah	Skolah	Penduduk Total
			Total	HP SK	HP SK			HL	HP	HP			
SUMBER TENGAH	UNIT XX - KPH	KPH	30,418	38,936	28,048	117,403	KPH	81,342	33,291	53,527	108,100	-	9,303
SUMBER TENGAH	UNIT XX - KPH	KPH	33,077	48,516	38,456	119,049	KPH	38,383	33,548	48,574	118,505	456	456
PALU BAKAT	UNIT I - KPH	KPH	137,057	4,503	49,932	192,142	KPH	151,651	50,270	2,022	208,943	16,800	16,800
PALU BAKAT	UNIT II - KPH	KPH	38,406	106,812	162,527	207,746	KPH	18,668	110,369	108,326	235,364	-	50,382
PALU BAKAT	UNIT III - KPH	KPH	253,049	4,660	251,718	509,427	KPH	223,401	4,004	8,494	235,899	-	21,819
PALU BAKAT	UNIT IV - KPH	KPH	30,813	308,825	139,738	448,376	KPH	54,007	129,335	158,342	191,604	13,604	13,604
PALU BAKAT	UNIT IX - KPH	KPH	82,176	15,082	140,306	237,564	KPH	70,241	157,373	14,945	242,559	25,045	25,045
PALU BAKAT	UNIT V - KPH	KPH	121,381	35,663	88,710	245,754	KPH	121,240	153,306	27,616	302,162	56,428	56,428
PALU BAKAT	UNIT VI - KPH	KPH	104,061	9,853	74,486	188,400	KPH	81,389	76,008	2,980	160,377	-	28,023
PALU BAKAT	UNIT VI - KPH	KPH	15,069	15,725	110,615	141,409	KPH	37,934	102,944	20,375	260,854	39,485	39,485
PALU BAKAT	UNIT VIII - KPH	KPH	33,223	39,355	51,344	124,922	KPH	34,848	51,432	38,317	122,593	-	1,841
PALU BAKAT	UNIT X - KPH	KPH	43,698	140,758	143,960	300,414	KPH	38,694	165,377	133,723	337,794	7,380	7,380
PALU BAKAT	UNIT II - KPH	KPH	12,426	241,428	50,288	294,142	KPH	12,358	57,960	233,425	302,713	1,611	1,611
PALU BAKAT	UNIT XI - KPH	KPH	208,663	54,004	10,403	273,070	KPH	205,207	8,154	44,535	259,796	-	14,574
PALU BAKAT	UNIT XII - KPH	KPH	163,884	85,302	28,607	278,793	KPH	162,827	25,307	71,363	259,947	-	18,446
PALU BAKAT	UNIT XIII - KPH	KPH	67,134	182,461	54,936	304,531	KPH	52,913	55,280	170,641	279,854	-	25,677
PALU BAKAT	UNIT XIII - KPH	KPH	124,423	112,969	13,473	250,865	KPH	108,353	18,708	508,389	335,430	-	15,135
PALU BAKAT	UNIT XV - KPH	KPH	10,188	86,863	942,458	940,508	KPH	9,467	704,957	55,668	770,092	128,585	128,585
PALU BAKAT	UNIT XVI - KPH	KPH	31,419	168,344	9,792	209,554	KPH	31,278	10,002	171,496	213,777	1,722	1,722
PALU BAKAT	UNIT XVII - KPH	KPH	53,223	104,501	158,090	315,814	KPH	172	115,597	43,629	158,398	1,308	1,308
PALU BAKAT	UNIT XVIII - KPH	KPH	50,487	52,942	30,902	134,331	KPH	52,856	125,463	52,450	230,768	56,218	56,218
PALU BAKAT	UNIT XX - KPH	KPH	34,082	114,576	182,661	330,319	KPH	27,432	173,095	110,997	315,124	-	15,195
PALU BAKAT	UNIT XX - KPH	KPH	255,542	129,678	5,996	401,217	KPH	146,031	5,870	238,547	390,448	-	10,668
PALU BAKAT	UNIT I - KPH	KPH	381,721	72,230	117,320	571,271	KPH	375,279	117,725	71,789	564,893	-	7,028
ALDI	UNIT I - KPH	KPH	150,524	13,957	30,278	194,759	KPH	149,306	89,995	13,529	252,760	-	1,699
ALDI	UNIT II - KPH	KPH	405,606	5,243	256,380	667,239	KPH	397,430	250,520	8,008	653,938	-	13,801

PROVINSI	UNIT SESUAI SK	JENIS KPH SK	Luas Pada SK Penetapan				UNIT 2020	JENIS	Update 2020				Salah	Perubahan Jenis	
			HL_SK	HPT_SK	HP_SK	Total			HL	HP	HPT	Jumlah			
ACEH	UNIT IV - KPHL	KPHL	362,253		45,148	407,401	Unit IV	KPHL	356,659	44,544		401,603	-	5,798	TETAP
ACEH	UNIT V - KPHL	KPHL	248,116	41,986	4,951	295,053	UNIT V	KPHL	242,487	4,950	41,807	289,244	-	5,809	TETAP
ACEH	UNIT VI - KPHL	KPHL	275,807	7,941	40,512	324,260	Unit VI	KPHL	260,138	40,259	11,647	312,023	-	12,237	TETAP
BENGKULU	UNIT I - KPHP	KPHP		66,357	11,937	78,274	UNIT I	KPHP	0	11,469	64,681	76,150	-	2,124	TETAP
BENGKULU	UNIT II - KPHP	KPHP		48,589	20,866	69,455	UNIT II	KPHP		9,486	42,612	52,098	-	17,357	TETAP
BENGKULU	UNIT III - KPHL	KPHL	52,375	2,397		54,772	UNIT III	KPHL	89,586	1,017	5,434	96,036	1,264		TETAP
BENGKULU	UNIT IV - KPHL	KPHL	68,830	13,686		82,516	Unit IV	KPHL	66,580		15,693	82,272	-	244	TETAP
BENGKULU	UNIT V - KPHL	KPHL	33,076	14,321	1,735	49,133	UNIT V	KPHL	32,360	1,701	14,274	48,336	-	797	TETAP
BENGKULU	UNIT VI - KPHL	KPHL	46,363	33,488	2,015	81,866	Unit VI	KPHL	44,388	2,077	31,408	77,873	-	4,103	TETAP
BENGKULU	UNIT VII - KPHL	KPHL	16,658			16,658	Unit VII	KPHL	17,300			17,300		642	TETAP
LAMPUNG	UNIT I - KPHP	KPHP	8,882	34,746		43,628	UNIT I	KPHP	9,793		28,938	38,731	-	4,897	TETAP
LAMPUNG	UNIT II - KPHL	KPHL	41,165			41,165	UNIT II	KPHL	41,253			41,253	88		TETAP
LAMPUNG	UNIT III - KPHP	KPHP	19,131		21,995	41,126	UNIT III	KPHP	20,657	22,328		42,985	1,859		TETAP
LAMPUNG	UNIT IV - KPHP	KPHP			49,134	49,134	Unit IV	KPHP		49,320		49,320	186		TETAP
LAMPUNG	UNIT IX - KPHL	KPHL	58,174			58,174	UNIT IX	KPHL	60,532			60,532	2,358		TETAP
LAMPUNG	UNIT V - KPHP	KPHP			42,548	42,548	UNIT V	KPHP		44,004		44,004	1,456		TETAP
LAMPUNG	UNIT VI - KPHP	KPHP	5,050		13,880	18,930	Unit VI	KPHP	3,861	13,783		17,644	-	1,286	TETAP
LAMPUNG	UNIT VII - KPHL	KPHL	24,443			24,443	Unit VII	KPHL	26,797			26,797	2,354		TETAP
LAMPUNG	UNIT VII - KPHL	KPHL	21,084			21,084	UNIT VIII	KPHL	24,004			24,004	2,920		TETAP
LAMPUNG	UNIT X - KPHL	KPHL	56,020			56,020	UNIT X	KPHL	55,811			55,811	-	209	TETAP
LAMPUNG	UNIT XI - KPHL	KPHL	32,878			32,878	Unit XI	KPHL	32,779			32,779	-	99	TETAP
LAMPUNG	UNIT XII - KPHL	KPHL	9,944		1,260	11,204	UNIT XII	KPHL	8,799	1,351		10,150	-	1,054	TETAP
LAMPUNG	UNIT XIII - KPHL	KPHL	7,707			7,707	UNIT XIII	KPHL	8,005	69		8,077	370		TETAP
LAMPUNG	UNIT XIV - KPHP	KPHP	5,160		10,454	15,614	Unit XIV	KPHP	5,282	9,888		15,490	-	164	TETAP
LAMPUNG						-						-			TETAP
LAMPUNG	UNIT XV - KPHL	KPHL	25,025			25,025	UNIT XV	KPHL	22,899			22,899	-	2,126	TETAP
LAMPUNG	UNIT XVI - KPHP	KPHP			30,243	30,243	UNIT XVI	KPHP	8	28,277		28,284	-	1,956	TETAP

PROVINSI	UNIT SESUAI SK	JENIS KPH SK	Luas Pada SK Penetapan				UNIT 2020	JENIS	Update 2020				Salah	Perubahan Jenis	
			HL_SK	HPT_SK	HP_SK	Total			HL	HP	HPT	Jumlah			
KALIMANTAN TENGAH	UNIT I - KPHP	KPHP	395,084	671,279	4,238	1,060,601	UNIT I	KPHP	390,266	4,232	683,013	1,057,510	-	3,091	TETAP
KALIMANTAN TENGAH	UNIT II - KPHP	KPHP	102,938	598,938	205,156	907,043	UNIT II	KPHP	102,751	204,951	595,873	904,575	-	2,468	TETAP
KALIMANTAN TENGAH	UNIT III - KPHP	KPHP			57,129	57,129	UNIT III	KPHP		57,880		57,880	751		TETAP
KALIMANTAN TENGAH	UNIT IV - KPHL	KPHL	7,805			7,805	Unit IV	KPHL	7,788			7,788	-	16	TETAP
KALIMANTAN TENGAH	UNIT IX - KPHL	KPHL	92,420	26,959	42,322	155,701	UNIT IX	KPHL	93,909	53,653	20,890	168,473	12,772		TETAP
KALIMANTAN TENGAH	UNIT V - KPHP	KPHP	13,901	185,331	171,988	325,220	UNIT V	KPHP	13,849	121,414	186,262	321,525	-	3,695	TETAP
KALIMANTAN TENGAH	UNIT VI - KPHP	KPHP	22,820	67,234	88,771	178,825	Unit VI	KPHP	21,788	87,858	66,760	176,406	-	2,419	TETAP
KALIMANTAN TENGAH	UNIT VII - KPHP	KPHP	138	26,169	199,579	265,886	Unit VII	KPHP	144	127,387	25,117	152,648	-	13,237	TETAP
KALIMANTAN TENGAH	UNIT VIII - KPHP	KPHP			113,625	113,625	UNIT VIII	KPHP		111,823		111,823	-	1,802	TETAP
KALIMANTAN TENGAH	UNIT X - KPHP	KPHP	23	11,668	233,314	245,005	UNIT X	KPHP		232,219	11,636	243,854	-	1,151	TETAP
KALIMANTAN TENGAH	UNIT XI - KPHP	KPHP		24,820	248,967	273,787	Unit XI	KPHP		249,313	24,711	274,023	846		TETAP
KALIMANTAN TENGAH	UNIT XII - KPHP	KPHP	6,925	150,671	25,795	183,491	UNIT XII	KPHP	6,937	26,738	150,335	183,109	-	382	TETAP
KALIMANTAN TENGAH	UNIT XIII - KPHP	KPHP			177,710	177,710	UNIT XIII	KPHP		177,319		177,319	-	391	TETAP
KALIMANTAN TENGAH	UNIT XIV - KPHP	KPHP		12,802	38,285	51,087	Unit XIV	KPHP		32,818	13,643	46,462	-	4,625	TETAP
KALIMANTAN TENGAH	UNIT XIX - KPHP	KPHP	30,604	195,062	156,879	386,545	UNIT XIX	KPHP	11,130	155,189	198,748	365,067	-	1,478	TETAP
KALIMANTAN TENGAH	UNIT XV - KPHP	KPHP		56,309	152,215	208,524	UNIT XV	KPHP		137,691	56,281	193,972	-	14,552	TETAP
KALIMANTAN TENGAH	UNIT XVI - KPHP	KPHP	57,337	187,291	50,107	294,735	UNIT XVI	KPHP	57,079	50,010	186,402	293,491	-	1,244	TETAP
KALIMANTAN TENGAH	UNIT XVII - KPHP	KPHP	54,690	342,344	309,345	711,379	UNIT XVII	KPHP	49,778	277,686	348,125	675,590	-	35,789	TETAP
KALIMANTAN TENGAH	UNIT XVIII - KPHP	KPHP	67,040		73,014	140,054	Unit XVIII	KPHP	67,259	72,908		140,168	114		TETAP
KALIMANTAN TENGAH	UNIT XX - KPHP	KPHP		101,346	85,756	187,102	Unit XX	KPHP		85,625	101,232	186,857	-	245	TETAP
KALIMANTAN TENGAH	UNIT XXI - KPHP	KPHP	58,970	328,827	6,112	373,909	Unit XXI	KPHP	57,672	6,115	378,628	372,415	-	1,494	TETAP
KALIMANTAN TENGAH	UNIT XXII - KPHP	KPHP	25,432	180,951	19,906	226,289	Unit XXII	KPHP	30,828	19,831	181,086	231,746	5,457		TETAP
KALIMANTAN TENGAH	UNIT XXIV - KPHP	KPHP	4,516	43,458	43,112	91,087	Unit XXIV	KPHP	5,562	41,974	42,573	90,109	-	1,378	TETAP
KALIMANTAN TENGAH	UNIT XXX - KPHP	KPHP	1,559		195,384	196,943	Unit XXX	KPHP	1,313	189,200		190,513	-	6,430	TETAP
KALIMANTAN TENGAH	UNIT XXV - KPHP	KPHP		21,293	126,227	147,520	UNIT XXV	KPHP		135,819	21,291	157,110	9,611		TETAP
KALIMANTAN TENGAH	UNIT XXVI - KPHP	KPHP			299,950	299,950	UNIT XXVI	KPHP		302,259		302,259	2,300		TETAP
KALIMANTAN TENGAH	UNIT XXVIII - KPHP	KPHP	4,799	5,574	133,308	143,681	UNIT XXVIII	KPHP	4,888	120,518	5,658	131,162	-	12,519	TETAP

PROVINSI	UNIT SESUAI SK	JENIS KPH SK	Luas Pada SK Penetapan				UNIT 2020	JENIS	Update 2020				Selisih	Perubahan Jenis	
			HL_SK	HPT_SK	HP_SK	Total			HL	HP	HPT	Jumlah			
KALIMANTAN TENGAH	UNIT XXX - KPHP	KPHP	3,738		248,206	251,944	UNIT XXX	KPHP	3,834	213,856		217,690	-	34,254	TETAP
KALIMANTAN TENGAH	UNIT XXXI - KPHP	KPHP	149,376	10,068	210,514	369,958	Unit XXXI	KPHP	149,345	212,355	10,010	371,710	1,752		TETAP
KALIMANTAN TENGAH	UNIT XXXII - KPHL	KPHL	165,663	19,902		185,565	Unit XXXII	KPHL	162,832		18,714	181,546	-	4,019	TETAP
KALIMANTAN TENGAH	UNIT XXXIII - KPHL	KPHL	105,372			105,372	UNIT XXXIII	KPHL	105,443			105,443	71		TETAP
KALIMANTAN TENGAH	UNIT XXXI - KPHP	KPHP	9,404	49,303	143,967	202,704	Unit XXXI, XXXI	KPHP	9,704	257,148	49,275	316,128	113,424		TETAP
KALIMANTAN TENGAH	UNIT XXXI - KPHP	KPHP	269		104,270	104,539						-	-	104,539	BERUBAH
SULAWESI TENGGARA	Unit I	KPHP	2,624	279	10,890	13,793	UNIT I	KPHP	2,624	10,938	279	13,841	48		TETAP
SULAWESI TENGGARA	Unit II	KPHP	6,534	19,474	22,174	48,282	UNIT II	KPHP	6,546	22,196	19,474	48,215	-	67	TETAP
SULAWESI TENGGARA	Unit III	KPHP	12,410	6,209	10,116	28,735	UNIT III	KPHP	12,410	30,116	6,209	28,735	-	0	TETAP
SULAWESI TENGGARA	Unit IV	KPHL	8,671		7,029	15,700	Unit IV	KPHL	8,671	7,029		15,701	1		TETAP
SULAWESI TENGGARA	Unit IX	KPHP	22,927	10,748	12,640	46,315	UNIT IX	KPHP	22,945	12,738	10,939	46,121	-	194	TETAP
SULAWESI TENGGARA	Unit V	KPHP	4,506	4,808	2,553	11,867	UNIT V	KPHP	4,506	2,521	4,808	11,835	-	32	TETAP
SULAWESI TENGGARA	Unit VI	KPHP	29,596		44,376	73,972	Unit VI	KPHP	30,922	42,896	0	73,818	-	153	TETAP
SULAWESI TENGGARA	Unit VII	KPHL	15,176	2,573		17,749	Unit VII	KPHL	15,090		2,573	17,664	-	85	TETAP
SULAWESI TENGGARA	Unit VIII	KPHP	2,497	8,227	7,854	18,578	UNIT VIII	KPHP	2,497	7,854	8,227	18,578	-	0	TETAP
SULAWESI TENGGARA	Unit X	KPHP	25,326	18,668	71,088	115,082	UNIT X	KPHP	25,326	83,203	18,668	113,298	-	1,784	TETAP
SULAWESI TENGGARA	Unit XI	KPHP	11,776	21,354	18,035	51,165	Unit XI	KPHP	11,776	17,528	21,355	50,658	-	507	TETAP
SULAWESI TENGGARA	Unit XII	KPHP	9,557	26,968	7,387	43,912	UNIT XII	KPHP	9,557	5,708	26,862	43,126	-	786	TETAP
SULAWESI TENGGARA	Unit XIII	KPHL	102,218	5,405	18,222	125,845	UNIT XIII	KPHL	102,218	18,211	5,405	125,834	-	11	TETAP
SULAWESI TENGGARA	Unit XIV	KPHL	128,363	36,891	48	165,302	Unit XIV	KPHL	128,258	48	36,871	165,177	-	125	TETAP
SULAWESI TENGGARA	Unit XIX	KPHP	22,877	27,041	63,462	113,379	UNIT XIX	KPHP	25,693	52,485	11,221	89,404	-	23,975	TETAP
SULAWESI TENGGARA	Unit XV	KPHP	42,430	45,248	5,436	93,114	UNIT XV	KPHP	42,430	5,385	45,225	93,041	-	74	TETAP
SULAWESI TENGGARA	Unit XVI	KPHL	122,768	4,072		126,840	UNIT XVI	KPHL	122,720		4,070	126,790	-	60	TETAP
SULAWESI TENGGARA	Unit XVII	KPHP	36,857	88,692		125,549	UNIT XVII	KPHP	30,302		57,961	88,262	-	17,287	TETAP
SULAWESI TENGGARA	Unit XVIII	KPHL	91,939	56,090	20,596	168,625	Unit XVIII	KPHL	88,466	20,574	56,960	165,999	-	2,626	TETAP
SULAWESI TENGGARA	Unit XX	KPHL	177,686	48,099	5,790	231,575	Unit XX	KPHL	177,686	5,790	48,082	231,568	-	7	TETAP
SULAWESI TENGGARA	Unit XXI	KPHL	42,047	6,596	16,415	65,058	Unit XXI	KPHL	41,852	16,404	6,593	64,849	-	209	TETAP



PROVINS	UNIT KERJA	Jenis Unit Kerja	Jumlah Pendaftar Peserta				Jumlah KTP 2019	Jenis	Maret 2019			Status	Perkiraan Tahun
			Jumlah Pendaftar			Total			JK	JKP	JKP		
			JK	JKP	JKP								
SUMBER HAYATI	000.000	000	17.714	14.974	8.022	348.165	000	16.112	1.000	16.112	00.774	000	000P
MUATAN HAYATI	000.000	000	11.662	10.612	2.478	16.531	000	25.478	1.442	26.920	16.531	00	000P
SUMBER HAYATI	000.000	000	41.638	1.623	10.499	138.165	000	41.590	10.029	51.619	16.441	00	000P
SUMBER HAYATI	000.000	000	10.000			10.000	000	10.000			10.000	00	000P